



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN AFRICAN UNION (AU) DALAM MISI PERDAMAIAN DI
SOMALIA (2007-2011)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**GITA WIDHASMARA
0806465541**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN AFRICAN UNION (AU) DALAM MISI PERDAMAIAN DI
SOMALIA (2007-2011)**

SKRIPSI

**GITA WIDHASMARA
0806465541**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : GITA WIDHASMARA
NPM : 0806465541
Tanda Tangan : 
Tanggal : 21 JUNI 2012

HALAMAN PENGESAHAN

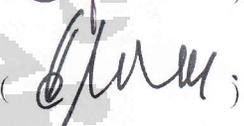
Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : GITA WIDHASMARA
NPM : 0806465541
Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Judul Skripsi :

“Peran African Union (AU) dalam Misi Perdamaian di Somalia (2007-2011)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Fredy B.L. Tobing, Ph.D ()
Sekretaris : Aninda Tirtawinata, M.Litt. ()
Penguji Ahli : Edy Prasetyono, Ph.D ()
Pembimbing : Artanti Wardhani, M.Phil. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini tidak lain merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Konflik internal di Somalia adalah salah satu konflik yang berlangsung paling lama sejak akhir perang dingin hingga sekarang. Konflik di Somalia ini adalah salah satu contoh konflik yang rumit karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi perdamaian dan kondisi konflik sudah berlarut-larut. Perdamaian di Somalia tidak kunjung tercipta, walaupun dunia internasional sudah melakukan banyak upaya untuk menciptakan perdamaian. Dua misi PBB dan satu pasukan multilateral untuk mendukung misi tersebut gagal menciptakan perdamaian pada tahun 1990-an. Namun, pada perkembangannya, AU sebagai sebuah organisasi regional melaksanakan sebuah misi perdamaian yang bernama AMISOM yang diluncurkan pada tahun 2007. Hingga tahun 2011, banyak perkembangan yang terjadi, sehingga penulis lihat, menarik untuk diteliti misi AMISOM ini, karena beberapakeunikan yang ada dalam misi ini, diantaranya pencapaian AMISOM yang cepat, dan bagaimana AMISOM ini adalah salah satu misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional.

Penulis di satu sisi menyadari banyaknya kekurangan dan kelemahan yang telah dilakukan selama penulisan skripsi ini, baik secara teknis maupun substansi. Atas dasar inilah penulis sangat mengharapkan berbagai saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk semakin memperkaya skripsi ini. Pada akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang bersangkutan.

Depok, 21 Juni 2012

Gita W.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan berkah dan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan juga mengerjakan skripsi ini. Dengan berkat-Nya lah, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang segala aspek kehidupannya menjadi panduan bagi kehidupan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dari penulis, Sigit Waluyo dan Widiarti Purnaminingsih atas kesabaran, kepercayaan, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga pada penulis. Kepada mereka berdua, skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih juga kepada Michiko Nur Widawati atas segala macam tingkah lakunya waktu penulis menulis skripsi ini dengan segala keluh kesah dan tindakan yang mengesalkan. Maap yak dek. hehe. Kalau pake bahasa kuliah sih, we are in a love hate relationship. ;)
2. Artanti Wardhani, S.Sos., M.Phil. selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing jalannya penelitian ini. Terima kasih atas fleksibilitasnya dalam menentukan waktu dan tempat untuk bimbingan mengingat padatnya pekerjaan dan kegiatan beliau.. Terima kasih juga atas saran-saran yang berkaitan dengan usaha pencarian data, serta atas dorongan psikologis yang diberikan Mbak Dhani selama penulis mengerjakan skripsi. Terima kasih atas peyakinan Mbak Dhani juga mengenai kelayakan topik skripsi, serta pemikiran mengenai sudut pandang masalah. Tidak lupa terima kasih atas bantuan bahan yang sangat membantu pengerjaan skripsi ini.
3. Andi Widjajanto, MA selaku Ketua Program yang telah banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan memberikan *deadline* yang jelas.
4. Dwi Ardhanariswari S., S.Sos., M.A., selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis berkuliah di Universitas Indonesia dari semester I sampai semester terakhir. Terima kasih untuk segala kemudahan dan segala kefleksibelan yang menjadikan masa kuliah penulis menjadi sangat lancar dan mudah.

5. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si., Ph.D selaku dosen pengajar SPM yang telah membantu penulis dalam memetakan alur berpikir sehingga dapat menyelesaikan Bab I dengan baik. Masukan-masukan yang diberikan Mas Freddy dalam kelas SPM ikut membantu penulis dalam mengarahkan penulisan skripsi agar tetap fokus.
6. Segenap dewan penguji sidang, Ketua Sidang Drs. Fredy B.L. Tobing, M.Si., Ph.D, Sekretaris Sidang Aninda Tirtawinata, M.Litt., Penguji Ahli Edy Prasetyono, Ph.D, dan Pembimbing Artanti Wardhani, M.Phil., yang memberikan kemudahan selama sidang berlangsung.
7. Dosen-dosen cluster Pengkajian Keamanan Internasional seperti Mas Edy, Mas Andy, Mas Kus, Mas Itok, Mas Yere, Mbak Dhani, Mbak Anin, Mbak Amalia, dan lain-lain yang telah membantu memperkaya pengetahuan penulis dalam memahami fenomena-fenomena keamanan strategis internasional.
8. Keluarga besar HMHI UI sebagai payung penabung penulis selama penulis menjadi mahasiswa hubungan internasional.
9. Terima kasih kepada seluruh teman HI UI 2008 yang memberikan warna kehidupan, hitam gelap, terang putih, pelangi kehidupan yang berjalan seiring sejalan menghadapi arus selama perjalanan di lautan dinamika kehidupan perkuliahan hubungan internasional. Kun, Machfudz, Joan, Kohar, Adhy, terima kasih atas kehidupan asrama yang sangat hidup. What happens there, stay there yak. Heuheu. Pemikir strategis, Dhani, Emir, Citra, Sorang, Yusdam, Palar, Robi, Aria, setahun terakhir, setahun yang panjang, setahun yang berharga. Terima kasih. Teman-teman HI, Bom-bom, Ady, OK, Agung, TB, Iqbal, Yona, Arjo, Deni, Nasrul, Niko, Tulus, Dafy, Lesly, Yari, Ipeh, Dwi, Marga, Sri, Chei, Raisa, Min Ah, Weki, Gya, Mita, Melisa, Fadlin, Riza, Vina, Vivi, Yanti, Ria, Ria Febrian, Ulpa, terima kasih atas seberkas warna yang kalian torehkan dalam kehidupan saya. Teman sekali, teman selamanya.
10. Keluarga besar K2N UI 2011, kalian adalah guru dan teman yang sangat berharga. Entah bagaimana jadinya bila kita tidak pernah bertemu. Teman-teman titik Liran, Elwindari, Puji, Sopi, Urfi, Jati, Adis, Dewa, Pipin, Eki, Fina, Salira, Asih, Ana, Nindya, Shabrina, Almas, Antika, Yucil. Teman-teman K2N UI lain dan juga keluarga Sabantara yang jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan satu-persatu. Kalian adalah keluarga. Keluarga itu selamanya.

11. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu proses penulisan dan percetakan dari awal sampai akhir. Mas-mas dan mbak-mbak jurusan, Mas Andre, Mas Rony, Mbak Ayu, Pak Dahlan, mas-mas fotokopian warpostel dan semua mas-mas fotokopi dan cetak yang sangat membantu dan baik. Teman satpam-satpam perpus, teman kantor komunikasi UI, Bu Farida, Ana, Mbak Youwa, Fandi, Vida, Molly, Pak Rahmat, Maya, Jeffri, Wisnu, Gita Gusti, Mbak Ida, Mas Ardi, Adit, Pak Ubay, dan semua pihak lain yang pasti tidak tertulis hari ini, namun tetap teringat selamanya. Terima kasih atas dukungan selama penulisan. Terima kasih.

Depok, 21 Juni 2012



Gita W.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Widhasmara
NPM : 0806465541
Program Studi : SI-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

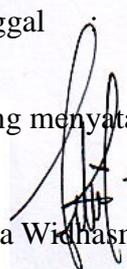
“Peran African Union (AU) dalam Misi Perdamaian di Somalia (2007-2011)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan


Gita Widhasmara

ABSTRAK

Nama : Gita Widhasmara
Program Studi : Sarjana Reguler Hubungan Internasional
Judul : Peran African Union (AU) dalam Misi Perdamaian di Somalia (2007-2011)

Skripsi ini membahas mengenai keberhasilan misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional Afrika, African Union (AU) yang bernama AMISOM sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 di Somalia. Penelitian ini menemukan bahwa AMISOM relatif cukup berhasil dan bisa dilihat sebagai sebuah tanda mengenai pergeseran trend pelaksanaan misi perdamaian yang sebelumnya sering dilakukan oleh PBB, menjadi dilakukan oleh organisasi regional. Ditemukan bahwa dalam misi perdamaian di Somalia, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perdamaian di Somalia. Penelitian ini membuktikan asumsi bahwa AMISOM relatif berhasil dalam upaya menciptakan perdamaian di Somalia dari pertama kali misi dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun 2011 pada saat kota Mogadishu berhasil direbut.

Kata kunci: Misi Perdamaian, Africa, African Union, AMISOM, Somalia

ABSTRACT

Name : Gita Widhasmara
Study Program : Sarjana Reguler Hubungan Internasional
Title : African Union (AU) Role in Peace Mission in Somalia
(2007-2011)

This thesis discusses the success of peace mission undertaken by African regional organizations, African Union (AU) called AMISOM since 2007 until 2011 in Somalia. This study found that AMISOM relatively successful and could be seen as a sign of the shifting trend which the previous implementation of peace missions are often carried out by the United Nations, to be undertaken by regional organizations. It was found that in the peace mission in Somalia there are many factors that affect peace in Somalia. This study proves the assumption that AMISOM is relatively successful in fostering peace in Somalia of the mission that was first implemented in 2007 until 2011 when the city of Mogadishu been won.

Key words: Peace Mission, Africa, African Union, AMISOM, Somalia

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.1.i. Somalia.....	2
I.1.ii. AMISOM.....	4
I.2. Permasalahan	6
I.3. Tinjauan Pustaka	8
I.4. Kerangka Konseptual	12
I.4.i.Organisasi Internasional.....	12
I.4.ii.Misi Perdamaian.....	15
I.4.iii.Kriteria Kesuksesan Misi Perdamaian.....	18
I.4.iv. Regional Peacekeeping.....	21
I.4.v.Peran Organisasi Regional dalam Misi/Penciptaan Perdamaian..	25
I.5. Model Analisa.....	27
I.6. Asumsi Penelitian.....	27
I.7. Metodologi Penelitian.....	27
I.8. Rencana Pembabakan.....	28
I.9. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	29
BAB II. KONFLIK SOMALIA.....	31
II.1. Pihak yang Terlibat Konflik di Somalia.....	32
II.1.i. UNOSOM I, UNOSOM II, UNITAF.....	32
II.1.ii. ICU (Islamic Court Union).....	35
II.1.iii. Al-Shabaab.....	35
II.1.iv. TFG (Transitional Federal Government)	36
II.1.v. African Union (AU)	37

II.1.vi. African Union Mission in Somalia (AMISOM)	37
II.2. Konflik yang Asimetris.....	39
II.3. Kekacauan Pemerintahan.....	41
II.4. Masalah yang timbul karena konflik.....	43
II.5. Respon Dunia Internasional.....	47
BAB III. MISI AMISOM.....	49
III.1.Latar Belakang Misi AMISOM.....	49
III.2.Mandat Misi AMISOM.....	51
III.3. Status of Mission Agreement.....	52
III.3.i. Latar Belakang SOMA.....	52
III.3.ii. Penjelasan SOMA.....	54
III.4. Kinerja AMISOM.....	65
III.4.i. Mendukung TFIs Menciptakan Kestabilan.....	66
III.4.ii. Memfasilitasi Bantuan Kemanusiaan.....	69
III.4.iii.Mendukung Proses Dialog dengan Semua Pemangku Kepentingan.....	72
III.4.iv. Mempertahankan Daerah Operasi dan Mengamankan Jalur Masuk.....	74
BAB IV. KEBERHASILAN AMISOM.....	77
IV.1. Keberhasilan misi perdamaian AMISOM.....	77
IV.1.i. Kriteria Keberhasilan Misi Perdamaian.....	77
IV.1.ii.Analisa Misi AMISOM.....	79
IV.2. Dinamika Aspek Sosial Politik Lokal-Regional.....	88
IV.2.i. Adanya Kepentingan Aktor Luar.....	88
IV.2.ii.Politik Lokal di Somalia.....	92
IV.2.iii. Kenetralan AMISOM.....	93
IV.2.iv. Faktor Sosial Masyarakat Somalia.....	94
IV.2.v. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan misi.....	95
IV.3. AU Sebagai Organisasi Regional yang Melakukan Misi Perdamaian...	99
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai hubungan internasional, pasti tidak akan jauh dari bicara mengenai hubungan langsung antara dua negara atau banyak negara, yaitu keadaan antara negara-negara tersebut. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan perang atau damai. Kedua keadaan ini cenderung diasosiasikan dengan keadaan antara aktor dalam hubungan internasional, yaitu negara, karena ada sebuah peraturan di mana hanya negara yang berhak mengumumkan perang dan damai. Namun, pada perkembangannya, perang dan damai dalam dunia internasional tidak lagi hanya melihat keadaan antara negara saja, namun juga *inter* (dalam) negara. Aktor yang dilihat dalam dunia internasional juga sudah mulai berkembang, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang dapat mempengaruhi situasi dunia internasional. Kelompok-kelompok pengganggu keamanan dalam suatu negara, juga menjadi aktor yang dipertimbangkan.

Perang paska Perang Dingin yang terjadi, kebanyakan konflik yang terjadi adalah konflik dalam negara. Salah satu diantaranya adalah konflik internal di Somalia, setelah rezim pemerintahan Siad Barre diruntuhkan pada tahun 1991 oleh sekumpulan pemimpin klan dan *warlord* yang hanya ingin menurunkan Siad Barre tanpa memikirkan bagaimana kelanjutannya. Hal ini mengakibatkan negara ini terpecah dan dilanda konflik internal dari tahun 1991 hingga sekarang. Dalam skripsi ini, konflik mengenai Somalia akan dibahas dari sudut pandang misi perdamaian yang dilakukan *African Union* (AU) di Somalia, yaitu *African Union Mission in Somalia* (AMISOM), yang dimulai sejak tahun 2007.

African Union (AU) adalah sebuah organisasi kontinental yang berada di Afrika dan membawahi beberapa organisasi regional yang ada di Afrika, seperti IGAD dan ECOWAS. AU adalah sebuah organisasi perkembangan dari OAU. AU ini memiliki mekanisme dalam menghadapi masalah keamanan dan

perdamaian karena Afrika adalah benua yang memiliki jumlah konflik yang tinggi.

I.1.a. Somalia

Somalia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Tanduk Afrika (Horn of Africa). Kawasan ini terletak di daerah barat Afrika dan berbatasan dengan Jazirah Arab. Kawasan ini memegang peranan penting dalam perdagangan dan transportasi dunia, karena berbatasan dengan Teluk Aden yang berhubungan dengan laut merah, salah satu jalur laut untuk perdagangan yang sangat sibuk. Namun demikian, kawasan ini terkenal dengan kekacauan dan konflik yang sepertinya tidak selesai-selesai. Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, dan Republik Djibouti adalah negara-negara yang paling tidak pernah terlibat konflik di daerah ini dalam artian walaupun ada konflik, namun intensitasnya tidak tinggi.¹ Namun hingga kini, Somalia adalah salah satu konflik yang paling parah. Konflik yang terjadi di Somalia adalah konflik internal. Konflik internal yang terjadi adalah adanya perang sipil yang dimulai dari tahun 1991, antara pemerintahan Somalia dengan beberapa kekuatan pemberontak, dan berlangsung hingga saat ini. Konflik di Somalia ini cukup rumit, karena rupanya, di Somalia ini, tidak hanya terjadi konflik internal dalam bentuk perang saudara. Namun juga konflik internasional dengan adanya serangan yang dilancarkan oleh negara-negara tetangga, dan banyak faktor-faktor lain yang disebabkan oleh konflik internal yang ada di Somalia. Terjadinya persebaran masalah yang muncul, seperti maraknya pembajakan di perairan Somalia dan kasus terorisme Al-Qaeda yang bergabung dengan gerilyawan Al-Shabab², membuat konflik ini menjadi konflik yang rumit dan berimbas kepada dunia internasional.

Dalam konflik internal ini, kita melihat adanya hal yang menarik. Konflik internal ini adalah salah satu konflik internal yang pada akhirnya tidak dapat

¹ Yussuf Kalib, Horn of Africa: Conflict and Consequences, Diakses dari <http://www.shebacss.com/docs/poeyh005-09.pdf> pada 6 Maret 2012, 09.44 WIB

² Diakses dari <http://www.voanews.com/indonesian/news/Menlu-Somalia-Aliansi-Al-Shabab-dan-al-Qaida-Bukan-Berita-Baru-139136629.html> pada 6 Maret 2012, 10.35 WIB

diselesaikan oleh negara itu sendiri, sehingga dunia internasional mau tidak mau harus bertindak untuk membantu pemerintahan Somalia untuk mencegah konflik ini berkepanjangan dan akhirnya meluas dan terjadi *spill over conflict* ke daerah di sekitar Somalia. Apalagi melihat bahwa perairan di sekitar Somalia adalah perairan yang penting untuk perdagangan dunia, karena kapal-kapal dari Asia, jauh lebih dekat untuk ke Eropa bila melewati Terusan Suez. Untuk mencapai terusan suez ini, kapal-kapal dagang harus melewati perairan Somalia. Karena adanya pemberontakan di Somalia, maka otomatis perairan di daerah ini menjadi tidak aman. Hal ini dapat dilihat dengan banyak terjadinya pembajakan kapal dagang oleh pemberontak somalia untuk ditukar dengan tebusan uang. Disinyalir, uang ini digunakan untuk membiayai gerakan dalam konflik internal di Somalia. Dari hal ini, kita dapat melihat adanya gangguan keamanan ke dunia internasional karena konflik internal ini.

Dengan melihat bagaimana kemungkinan masalah konflik yang ada di Somalia untuk menjadi masalah internasional, dunia internasional akan bergerak untuk membantu terciptanya perdamaian di Somalia. Organisasi internasional seperti PBB, negara-negara lain, NGO, dan bahkan individu memberikan bantuannya untuk membantu terciptanya perdamaian di Somalia.

Tapi bukan berarti bahwa hal tersebut mudah. Konflik di Somalia sangat rumit dan banyak aspek yang perlu diperhitungkan. Tiga misi PBB yang dilaksanakan pada awal tahun 1990-an tidak dapat membawa perdamaian di Somalia. Tiga misi tersebut adalah UNOSOM I (*United Nations Operation in Somalia I*), UNITAF (*Unified Task Force*), dan UNISOM II (*United Nations Operation in Somalia II*). Misi terakhir adalah UNISOM II yang selesai pada Maret 1995. Namun konflik tetap terjadi di Somalia hingga saat ini.

Dalam perkembangannya, konflik ini terus mengalami perubahan, meskipun pada dasarnya sama, yaitu perang saudara. Pada tahun 2004, muncul *Transitional Federal Government* (TFG) yang dibentuk di Nairobi, Kenya. TFG ini adalah pemerintahan Somalia yang diakui secara internasional, dan didukung oleh PBB, AU, dan Amerika Serikat. TFG ini memerangi kelompok Al-Shabaab untuk mendapatkan kontrol penuh atas bagian selatan Somalia. Pada bagian utara

Somalia, terdapat dua daerah lepasan, yaitu Puntland, dan Somaliland.³ Namun, secara umum, kondisi di daerah utara Somalia ini jauh lebih baik daripada bagian selatan Somalia kecuali untuk masalah bajak laut.

Meskipun telah ada pemerintahan yang diakui secara internasional yaitu TFG, rupanya pemberontakan masih kuat, sehingga transisi ke pemerintahan yang mampu berdiri sendiri masih susah untuk dilakukan. Namun dengan adanya dukungan dari PBB, AU, dan Amerika Serikat, proses menuju transisi, menjadi jauh lebih baik dan dimungkinkan.

I.1.b. AMISOM

Di lain pihak, kita melihat mengenai perkembangan African Union belakangan ini. African Union yang terbentuk pada 9 Juli 2002⁴ adalah salah satu aktor kontinental yang berada di kawasan Afrika. Dalam perkembangannya, AU ini mempunyai fungsi keamanan. Fungsi keamanan ini tentu berhubungan dengan keamanan di kawasan Afrika, berusaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Afrika, salah satunya adalah Somalia. Oleh karena itu, AU meluncurkan misi AMISOM yang berfokus pada Somalia.

African Union Mission in Somalia (AMISOM) adalah sebuah misi yang dilakukan oleh AU di Somalia. Mandat AMISOM adalah untuk menyediakan dukungan ke TFIs (*Transitional Federal Institutions*) dalam upayanya menuju stabilisasi situasi di negara dan pemajuan dialog dan rekonsiliasi, untuk memfasilitasi kebutuhan bantuan kemanusiaan, dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk stabilitas jangka panjang, rekonstruksi dan perkembangan di

³ Puntland dan Somaliland adalah daerah lepasan yang memiliki pemerintahan lokal tersendiri di utara Somalia. Somaliland adalah sebuah negara lepasan yang tidak diakui oleh dunia Internasional. Meskipun begitu, Somaliland memiliki pemerintahannya tersendiri, bahkan sudah melakukan pemilu. Puntland, adalah sebuah daerah semi otonom, yang walaupun tidak lepas dari Somalia, namun memiliki pemerintahan lokal.

⁴ Diakses dari [http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches & Statements/HE Thabo Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union,%209%20July%202002.htm](http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches%20&%20Statements/HE_Thabo_Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union,%209%20July%202002.htm) pada 6 Maret 2012, jam 10.51

Somalia⁵ TFIs ini adalah sebuah institusi yang dibentuk sebagai sebuah lembaga pemerintahan transisi yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan tetap di Somalia. TFG adalah cabang eksekutif dari TFIs. Untuk mencapai tujuannya, TFIs perlu didukung AMISOM karena keamanan di Somalia masih dalam keadaan yang berbahaya.

Dalam perkembangannya, AMISOM adalah misi perdamaian ketiga untuk African Union. Sebelum misi di Somalia ini, AU menyelenggarakan misi perdamaian di Burundi dan Sudan. Misi AMISOM ini ada kaitannya dengan *Inter Governmental Authority on Development Peace Support Mission in Somalia* (IGASOM), lebih tepatnya adalah sebuah lanjutan/perbaikan. Sebelum AMISOM dimandatkan, sudah ada IGASOM yang berasal dari IGAD.⁶ Namun karena konflik, pertentangan dari aktor yang berperang di Somalia, dan konflik internal di Sudan yang menjanjikan untuk menyumbang tentara untuk IGASOM, akhirnya membuat IGASOM tidak berjalan dan diambil alih oleh AU. Salah satu sebabnya kenapa AU yang akhirnya melaksanakan misi, adalah agar pasukan yang ditarik untuk misi, dapat ditarik dari negara dengan cakupan negara yang lebih luas, karena AU memiliki jumlah negara anggota yang lebih besar.

Pada awalnya, mandat AMISOM adalah selama 6 bulan dan kemudian misi ini akan berubah menjadi sebuah misi PBB. AMISOM tidak terdiri sepenuhnya dari tentara, namun juga ada yang dari sipil. Dari sisi militer, negara-negara yang menyumbangkan tentaranya adalah Uganda (1600 tentara), Burundi (1500-1600 tentara), Nigeria (850 tentara), dan Ghana (350 tentara)⁷. Meskipun begitu, jumlah ini tidak dapat dipenuhi secara penuh pada awal-awal misi karena kesulitan teknis.

⁵ AMISOM Mandat, Diakses dari http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Mandat.htm pada 8 Maret 2012, jam 13.33 WIB

⁶ IGAD (*Inter Governmental Authority on Development*) adalah sebuah organisasi regional yang ada di Afrika Timur. AU dalam hubungannya dengan IGAD, adalah sebagai sebuah organisasi payung yang membawahi organisasi-organisasi regional yang ada di Afrika, seperti IGAD dan ECOWAS. Hubungannya dalam misi perdamaian ini adalah AMISOM adalah sebuah misi yang diluncurkan untuk menggantikan IGASOM karena ada ketentuan dimana tentara dari negara tetangga Somalia diminta tidak mengirimkan pasukan untuk menjaga kenetralan.

⁷ IRIN, "Somalia: A turtous road ahead in search of peace", diakses dari <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/157f219de83e61803c7259d3c256f0fe.htm> pada 13 Maret 2007

AMISOM ini adalah salah satu misi yang didukung oleh PBB. Hal ini karena walaupun misi AMISOM ini didasarkan pada “*The African Mission in Burundi (AMIB) Concept*”⁸, namun, karena kebanyakan negara anggota AU adalah negara dengan sumber daya yang rendah, maka AMIB Concept ini tidak efektif, dan akhirnya bukannya mandiri malah membutuhkan bantuan dari partner AU untuk dukungan logistic, peralatan, transportasi udara, dan pelatihan. Dan dari sisi lain, banyak pihak yang rupanya menyumbang untuk misi AMISOM ini.

Terlepas dari terlihat agak kurang siapnya misi AMISOM, pada kenyataannya AMISOM berhasil terus bertahan di Somalia dan membantu pemulihan perdamaian, hingga pada satu titik, akhirnya Mogadishu bisa direbut kembali dari gerilyawan Al-Shabaab pada tahun 2011. Sesudah itupun, AMISOM masih terus berjalan karena perdamaian belum tercapai hingga tahun 2011.⁹

I.2. Permasalahan

Di sini kita melihat adanya suatu hal yang menarik. Pertama adalah konflik Somalia ini adalah salah satu contoh konflik yang *protracted* dan sangat rumit karena banyaknya faktor yang ada di dalam konflik tersebut. Banyaknya *warlord*, adanya keterlibatan gerilyawan Al-Shabab dengan Al-Qaeda, lemahnya pemerintahan karena institusi yang lemah, masalah sosial yang berujung pada maraknya pembajakan di Teluk Aden adalah beberapa faktor saja dari konflik Somalia ini. Tidak adanya pihak yang mau mengalah mengakibatkan konflik ini menjadi konflik yang berlarut-larut. Kondisi seperti ini membuat adanya kemungkinan melubernya konflik dalam artian persebaran konflik dan mutasi konflik menjadi masalah lain yang disebabkan konflik tersebut, seperti menjadi masalah sosial, terorisme, dst.

⁸ AMIB adalah salah satu misi AU di Burundi. Dalam AMIB Concept, model misi adalah mandiri yang dibebankan kepada TCCs (*Troop Contributing Countries*)

⁹ Cecilia Hull dan Emma Svensson, *African Union Mission in Somalia (AMISOM) Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges*, diakses dari <http://www.foi.se/upload/projects/Africa/FOI-R--2596--SE.pdf> pada 29 Desember 2011, jam 10.05

Kedua adalah semua misi yang dilakukan tidak berhasil. PBB dan UNITAF bantukan Amerika Serikat tidak berhasil meredakan konflik di Somalia. Jangankan perdamaian, konflik terus ada dan berkembang dengan masuknya aktor baru seperti Al-Qaeda dan gerilyawan Al-Shabab. Namun pada akhir 2000-an, setelah terbentuk AU, dan semakin kuatnya konsep regional peacekeeping, AMISOM diluncurkan. Pada awal mula misi AMISOM ini diluncurkan, AMISOM mendapat mandat untuk menyediakan dukungan ke TFI (*Transitional Federal Institutions*) dalam upayanya menuju stabilisasi negara dan pemajuan dialog dan rekonsiliasi, untuk memfasilitasi kebutuhan bantuan kemanusiaan, dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk stabilitas jangka panjang, rekonstruksi dan perkembangan di Somalia.¹⁰ Dari mandat tersebut, kita berusaha untuk melihat bagaimana berhasilnya misi AMISOM ini dan faktor apa saja yang menyebabkan kesuksesan misi perdamaian ini.

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, penelitian ini akan mencoba merumuskan satu kalimat permasalahan sebagai berikut: ***“Mengapa misi AMISOM relatif berhasil dalam menciptakan perdamaian/stabilitas di Somalia?”***. Penelitian ini akan mencoba melihat hal-hal apa saja yang membuat AU dapat melaksanakan misi perdamaian dengan relatif baik. Bagaimana perkembangan AU sebagai sebuah organisasi kontinental dalam menangani masalah keamanan di Afrika, dengan melihat studi kasus konflik Somalia. Untuk menentukan keberhasilan misi perdamaian tersebut, dilakukan pengukuran keberhasilan dari dua hal, yaitu dari sisi tugas yang dimandatkan ke AMISOM, dan dari kriteria Pushkina.

Pertanyaan ini diambil, karena ingin melihat AU sebagai sebuah organisasi kontinental dan hubungannya dengan keamanan di kawasan Afrika dengan studi kasus AMISOM yang berjalan di Somalia. Batas waktu yang diambil adalah dari 2007-2011 dikarenakan operasi AU di Somalia dimulai dari tahun 2007 dan diambil sampai 2011 karena terdapat titik yang penting dalam upaya peace

¹⁰*Loc. Cit.*, AMISOM Mandate

building di mana Mogadishu berhasil dikontrol sepenuhnya dari sebelumnya ada kekuatan pemberontak yang menguasai Mogadishu.¹¹

Dalam penelitian ini, yang akan dilihat adalah keberhasilan misi AMISOM, dan dengan demikian perlu untuk melihat mengapa misi AMISOM ini bisa dibidang relatif berhasil. Untuk memastikan hal tersebut, digunakanlah analisa mengenai kinerja AMISOM dan juga menggunakan kriteria Pushkina.

I.3. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dicari adalah mengenai apa saja yang sudah diteliti mengenai kasus Somalia, maka pembahasannya adalah mengenai organisasi internasional dalam melakukan misi perdamaian. Penelitian yang dilihat adalah penelitian yang berhubungan dengan aspek penelitian AU, seperti peacekeeping, organisasi regional, atau contoh studi kasus yang berhubungan dengan faktor-faktor yang ada dalam penelitian AU.

Dalam bahan yang pertama, dalam buku *Peacekeeping and the International Systems*, MacQueen memaparkan mengenai kegagalan misi perdamaian Somalia yang dilakukan oleh PBB.¹² Dalam bab berjudul *Peacekeeping in Stateless Terrain*, MacQueen menjelaskan mengenai Somalia, dari sejarah terbentuknya, sejarah konflik, hingga perkembangan konflik di mana PBB terlibat dan akhirnya dinyatakan gagal. MacQueen dalam tulisannya memaparkan bahwa PBB mengalami kesulitan karena pada dasarnya ada satu syarat yang sulit untuk terpenuhi, yaitu adanya *host country consent*. Tidak seperti Kongo di mana ada negara dan pemerintahan yang bisa diajak untuk bernegosiasi, Somalia tidak memiliki pemerintahan. Hal ini dikarenakan banyaknya fraksi dan geng di Somalia. Oleh karena itu dibentuklah UNITAF untuk memberikan kehadiran militer untuk membantu UNOSOM dilihat terlalu lemah dan dengan adanya kehadiran militer, diharapkan agar para fraksi mau untuk turun dan

¹¹Diakses dari <http://english.aljazeera.net/video/africa/2011/08/20118655455968226.html> pada 29 September jam 12.43

¹²Norrie MacQueen, *Peacekeeping and the International Systems* (New York: Routledge, 2006), hal.211

bernegosiasi. Namun kenyataannya, walaupun tujuannya untuk membantu UNOSOM mengamankan bantuan pangan berhasil, pimpinan militer di Amerika Serikat tidak terlalu tertarik dengan misi ini, dan menginginkan misi ini untuk membatasi peran UNITAF ke distribusi bantuan kemanusiaan hanya di daerah yang dituju. UNITAF juga harus memiliki durasi sesingkat mungkin dan sebisa mungkin mengembalikan tanggung jawab ke UNOSOM pada kesempatan pertama yang memungkinkan. Hal ini membuat misi UNITAF selesai karena memang parameternya dibuat mudah. Namun, tidak ada pelucutan senjata yang membuat misi UNOSOM II menjadi sangat sulit karena keadaan Somalia setelah ditinggalkan oleh UNITAF menjadi tidak stabil dan jauh lebih berbahaya. Akhirnya setelah UNITAF selesai, misi UNOSOM II diluncurkan. Namun, masalah utama pada misi UNOSOM II ini cukup banyak. Salah satunya adalah rumitnya rantai komando dalam misi ini. Pada akhirnya misi ini tidak berhasil karena kekerasan masih terus terjadi, dan situasi tidak kondusif bahkan semakin rumit dengan munculnya banyak fraksi di Somalia. Misi UNOSOM II ini akhirnya ditarik mundur sepenuhnya pada 31 Maret 1995, sesuai dengan mandat PBB, yaitu resolusi 954.¹³ Pelajaran yang bisa diambil dari 3 misi diatas adalah bahwa perlu adanya komitmen penuh dari semua pihak dalam misi perdamaian. Misi perdamaian yang dilakukan juga harus konsisten dari awal dengan tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

Penelitian skripsi ini mengenai AU di Somalia, adalah lanjutan dari penelitian mengenai misi perdamaian di Somalia. AMISOM adalah misi perdamaian setelah UNOSOM II gagal di Somalia. Dengan melihat mengenai apa yang telah dilakukan oleh AMISOM dan perkembangan apa yang terjadi, penelitian ini dapat merumuskan apa yang membuat misi perdamaian berhasil di negara yang keadaannya sangat sulit seperti di Somalia. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk dapat melihat mengenai bagaimana organisasi regional melaksanakan misi perdamaian.

¹³Diakses dari <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2b.htm> pada 20 Desember 2011, jam 9.29

¹⁴*Op. Cit.*, Norrie MacQueen, hal. 212-219

Penelitian kedua yang akan kita lihat adalah seperti yang tertulis dalam artikel yang ditulis oleh Tony Karbo, *Peace Building in Africa*, dalam buku *PEACE & CONFLICT IN AFRICA* yang diedit oleh David J. Francis. Dalam penelitiannya, Karbo merumuskan mengenai peacebuilding di Afrika, bahwa Afrika ini adalah salah satu benua laboratorium kemanusiaan, di mana nyaris semua hal bisa terjadi di sini berkenaan dengan perdamaian. Afrika juga sudah lama mengalami konflik, dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa cara yang dilakukan kurang benar, karena tidak membangun dari bawah, namun menekan konflik dari atas. Hal ini searah dengan pemikiran *liberal peace*. Pada dasarnya hubungan penelitian dengan penelitian mengenai AU adalah melihat konflik di Afrika perlu pendekatan yang berbeda, di mana perlu pembangunan dari bawah¹⁵. Meskipun pada artikel Karbo lebih berfokus pada peacebuilding, beberapa ide dalam tulisannya bisa digunakan dalam penelitian AU. Mirip, karena pada dasarnya, metode yang digunakan dalam perdamaian bisa diterapkan dalam misi AMISOM. Perlunya pembangunan institusi, seperti yang dianjurkan oleh pemikiran *liberal peace*, perlu untuk diterapkan, karena Somalia, adalah negara yang memiliki pemerintahan yang lemah. Disini, kita bisa melihat adanya kondisi yang mirip dengan apa yang diuraikan oleh Karbo dalam tulisannya.

Penelitian mengenai AMISOM selanjutnya adalah tulisan Cecilia Hull dan Emma Svensson yang berjudul *African Union Mission in Somalia (AMISOM) Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges*.¹⁶ Dalam tulisannya, Hull dan Svensson memaparkan mengenai misi AMISOM yang merupakan misi perdamaian ketiga AU. Mereka berdua melihat AMISOM sebagai sebuah misi yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan misinya, dikarenakan kurangnya sumber daya, kapasitas dan pembiayaan, dan juga kurangnya kapasitas institusional untuk mengatur operasi. Dalam hal ini, sebenarnya, AMISOM bisa dikatakan tidak mampu dan kesulitan untuk melaksanakan misi perdamaian di Somalia. Namun, tulisan Hull dan Svensson

¹⁵ Tony Karbo, "Peace-building in Africa", dalam buku David J. Francis (ed), *PEACE & CONFLICT IN AFRICA* (London: Zed Books, 2008), hal 113-130

¹⁶ Cecilia Hull dan Emma Svensson, *African Union Mission in Somalia (AMISOM) Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges*, diakses dari <http://www.foi.se/upload/projects/Africa/FOI-R--2596--SE.pdf> pada 29 Desember 2011, jam 10.05

adalah tulisan yang diterbitkan pada tahun 2008, di mana misi AMISOM dimulai pada tahun 2007. Mungkin yang dilihat oleh Hull dan Svensson adalah misi AMISOM yang masih prematur. Masih banyak kekurangan di sana sini, mungkin wajar karena pada kenyataannya misi ini baru berumur satu tahun pada masa penelitian mereka dibuat.

Penelitian AMISOM yang dilakukan pada skripsi ini, pada dasarnya adalah penelitian lanjutan dari penelitian Hull dan Svensson. Setelah tahun 2008, banyak hal yang terjadi dengan AMISOM yang membuatnya berhasil membuat sebuah pencapaian dengan merebut Mogadishu sepenuhnya untuk TFG. Hal inilah yang kemudian akan kita lihat sebagai sebuah penambahan dan kritik terhadap penelitian Hull dan Svensson.

Penelitian AMISOM yang keempat adalah tulisan Tim Murithi yang berjudul *The African Union's Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid Mission in Darfur*, yang dimuat dalam *Journal of Peace, Conflict and Development, Issue 14, July 2009*.¹⁷ Dalam tulisannya, Murithi memaparkan mengenai bagaimana misi-misi perdamaian AU, terutama dari Darfur. Namun dalam tulisannya ini, Murithi juga menjelaskan mengenai AMISOM. Murithi menjelaskan mengenai latar belakang kenapa AMISOM akhirnya diturunkan, dan isu-isu apa saja yang sebelumnya terjadi sebelum AMISOM dimandatkan oleh AU, seperti IGAD, IGASOM yang tidak diturunkan sama sekali. Murithi dalam membahas mengenai AMISOM lebih berfokus mengenai teknis dan bagaimana pelaksanaan misi seperti yang ada di Burundi, yaitu AMIB (*African Union Mission in Burundi*). Secara garis besar, seperti pada penelitian Hull dan Svensson, penelitian AU dan AMISOM kali ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Tulisa Murithi adalah tulisan tahun 2009, sehingga perkembangan terbaru belum ada di penelitian Murithi. Dengan adanya penelitian hingga kali ini, kita dapat melihat dinamika dan perkembangan yang terjadi di

¹⁷ Tim Murithi, *The African Union's Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid Mission in Darfur*, dalam *Journal of Peace, Conflict and Development*, Issue 14, July 2009, diakses dari <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/Issue%2014%20Article%2015%20Revised%20copy%201.pdf> pada 29 Desember 2011, jam 10.47

Somalia dan misi perdamaian AMISOM yang dilakukan oleh organisasi regional Afrika yaitu African Union.

Dengan melihat semua penelitian yang ada sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian AMISOM dan AU kali ini cukup penting untuk dilakukan, karena perkembangan yang ada, dapat digunakan untuk membantu merumuskan apa yang terjadi di Somalia, dan bagaimana AU sebagai organisasi regional melaksanakan misi perdamaian.

I.4. Kerangka Konseptual

Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan permasalahan, kita akan menggunakan konsep organisasi internasional dan misi perdamaian.

I.4.i. Organisasi internasional

Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari banyak negara. Sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi internasional. Dalam bukunya, Archer mencontohkan, kebingungan antara apa yang disebut dengan organisasi internasional dan institusi internasional.¹⁸ Namun, Archer juga menunjukkan bahwa dengan melihat perkembangan sejarah mengenai organisasi internasional, maka ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi organisasi internasional. Anthony Judge, menunjukkan ada beberapa kriteria yang dapat digunakan yaitu :

- a. Tujuan pendirian harus mengandung aspek internasional dengan fokus perhatian mencakup kepentingan minimal tiga negara.
- b. Keanggotaan berupa partisipasi individu atau kolektif dengan hak suara penuh dan keanggotaan bersifat terbuka. Tidak boleh dikuasai satu negara.

¹⁸ Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, 2001), hal 1-5

- c. Konstitusi harus disusun dalam upaya pembentukkan struktur formal. Setiap anggota memiliki hak secara periodik untuk memilih badan-badan operasional dan para pejabatnya.
- d. Memiliki markas yang permanen
- e. Pejabat Organisasi internasional harus dari berbagai bangsa
- f. Kontribusi anggaran/dana dari negara anggota.
- g. Tidak diperkenankan mencari keuntungan dalam keanggotaan Organisasi internasional karena Organisasi internasional bukan tempat bisnis.
- h. Kejelasan akrtivitas
- i. Adanya pertemuan berkala guna membahas kebijakan dan aktivitas¹⁹

Selain Judge, ada banyak pendapat lain mengenai syarat suatu organisasi internasional. Namun, secara umum ada tiga bagian penting dalam melihat suatu organisasi, apakah pantas untuk disebut organisasi internasional atau tidak. Tiga hal tersebut adalah keanggotaan, tujuan, dan struktur.

Keanggotaan suatu organisasi untuk dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional adalah harus terdiri dari dua atau lebih negara yang berdaulat. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengejar pemenuhan kepentingan bersama anggota-anggota. Struktur, organisasi internasional harus memiliki struktur formal yang berkelanjutan yang dibuat dengan kesepakatan atau dokumen konstituen.

Jadi bila dirumuskan sebagai sebuah kalimat, maka organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan antara anggota (pemerintah

¹⁹ A.J.N. Judge, “*Types of international organization*” diakses di <http://www.uia.org/uiadocs/orgtypec.htm> diakses pada 14 Agustus 2000, Seperti yang dijelaskan dalam Clive Archer, *International Organizations*,

dan/atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara merdeka dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dari anggota.²⁰

Dari sini, kita dapat melihat mengenai beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melihat organisasi internasional secara umum. Namun organisasi internasional ini terdapat beberapa klasifikasi lagi. Namun untuk melihat permasalahan dalam penelitian ini, klasifikasi akan dilihat dari cakupan wilayah. Dalam cakupan wilayah, ada dua jenis, yaitu global (universalism) dan regional (regionalism). Global adalah organisasi internasional yang seperti namanya, cakupannya adalah global dunia. Contoh dari organisasi ini adalah PBB. Organisasi internasional regional, adalah organisasi internasional yang cakupannya hanya sebatas pada satu regional/kawasan saja. Contohnya adalah AU (African Union).²¹

Dari sini kita dapat mengklasifikasikan bahwa AU adalah sebuah organisasi regional/kontinental. Lalu, kenapa kita harus melihat klasifikasi ini? Karena pada permasalahan yang akan diangkat, kita akan melihat mengenai peran organisasi regional dalam upayanya melakukan misi perdamaian di suatu tempat yang organisasi global gagal dalam melakukannya.

Dalam pemaparan mengenai sejarah berkembangnya organisasi internasional, kita dapat melihat mengenai pentingnya unsur perdamaian dalam pembentukan organisasi internasional. Dari awal perang dunia pertama, kita melihat bahwa organisasi internasional yang dibentuk yaitu Liga Bangsa-Bangsa memiliki akar perdamaian dan untuk mencegah perang. Hal ini berlanjut hingga PBB dan akhirnya sampai sekarang banyak muncul organisasi internasional yang memiliki perhatian kepada masalah keamanan dan perdamaian. Oleh karena itu, unsur perdamaian tidak dapat dihindarkan dalam membicarakan organisasi internasional, terutama organisasi global dan regional. Dari sini, pembahasan akan turun ke masalah misi perdamaian.

²⁰*Op. Cit.*, Clive Archer, hal 33-34

²¹ Selengkapnya mengenai penjelasan universalism dan regionalism, lihat *Ibid.*, hal. 45-49

I.4.ii. Misi Perdamaian

Misi perdamaian adalah upaya dunia internasional untuk mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian di daerah yang terkena konflik. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran konflik yang terjadi akan mempengaruhi dinamika dunia internasional, dan menjadi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan.

Konsep misi perdamaian ini mulai muncul sejak PBB terbentuk, dengan adanya ketentuan tentang upaya untuk menciptakan perdamaian di Piagam PBB. Namun pada masa awal PBB terbentuk, misi perdamaian masih kurang dilakukan, karena masih banyak negara-negara yang belum merdeka. Misi perdamaian mulai banyak dilakukan pada masa-masa Perang Dingin, namun dengan melihat bahwa kondisi perdamaian tidak terjadi karena terjadi konflik antara negara. Baru setelah Perang Dingin selesai, misi perdamaian banyak dilakukan, dengan ditambahkan perhatian terhadap masalah kemanusiaan. Pada masa tersebut pula, misi perdamaian juga mulai bergeser karena konflik-konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik internal negara. Salah satu orang yang berpengaruh terhadap konsep misi perdamaian ini adalah Boutros-boutros Ghali, Sekjen PBB. Ghali menulis mengenai *An Agenda For Peace* yang membahas mengenai masalah perdamaian secara mendalam.

Konsep misi perdamaian secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu *preventive diplomacy*, *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Konsep misi perdamaian ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai perdamaian. Namun berbeda tingkatan sesuai dengan konflik yang dihadapi. Bila keadaan sudah sangat mendesak, di mana pelanggaran yang besar terjadi dan/atau kejahatan kemanusiaan ada dalam konflik tersebut, bisa dilakukan intervensi dengan mengirim pasukan *peace enforcement*. Namun intervensi tersebut dilakukan dengan proporsional dengan mempertimbangkan semua sisi konflik.

Dalam membahas mengenai upaya *peacekeeping*, masih belum jelas apa yang dimaksud dengan *peacekeeping*. Banyak penjelasan mengenai *peacekeeping*. Dalam *Peacekeeping Handbook, International Peace Academy*

mendefinisikan *peacekeeping* sebagai : pencegahan, penahanan, moderasi, dan terminasi dari peperangan antara atau dalam negara, melalui perantaraan intervensi damai pihak ketiga yang diorganisasi dan diarahkan secara internal, menggunakan kekuatan pasukan multinasional, polisi dan sipil untuk mengembalikan dan menjaga perdamaian. Beberapa definisi sedikit berbeda, namun secara umum sama.

Namun, demi mengambil suatu definisi umum, kita akan melihat mengenai konsep *peacekeeping* seperti yang digunakan oleh PBB. Menurut Boutros-Ghali dalam *An Agenda for Peace*, *peacekeeping* didefinisikan sebagai *deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well. Peacekeeping is a technique that expands the possibilities for both the prevention of conflict and the making of peace.*

Ghali dalam melihat upaya kontrol konflik, ada empat kegiatan yang dilakukan PBB, yaitu *preventive diplomacy*, *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Namun, pada perkembangannya, ada satu tahap lagi yang diusulkan oleh Ghali dalam upaya kontrol konflik ini, yaitu *peace enforcement*, karena kurang kuatnya *peacekeeping* bila melihat faktor harus adanya persetujuan dari pihak yang berperang akan adanya penempatan pasukan perdamaian PBB. Dengan *peace enforcement*, faktor persetujuan ini disulkan untuk sedikit dikesampingkan, agar memberi PBB kekuatan lebih untuk menciptakan perdamaian.²² *Preventive diplomacy* dilakukan sebagai tahapan pertama dalam misi perdamaian, karena dengan *preventive diplomacy*, tidak diperlukan intervensi dan kekuatan senjata, sehingga ini adalah cara paling aman dan menguntungkan untuk semua pihak. *Preventive diplomacy* dilakukan pada saat awal-awal terjadi pertikaian, dimana konflik masih belum terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan dari pertikaian menjadi konflik bersenjata. Tindakan ini memiliki karakteristik tertentu, yaitu bergantung kepada peringatan dini mengenai resiko munculnya konflik, membutuhkan informasi mengenai

²² John Terence O'Neil dan Nicholas Rees, *United Nations Peacekeeping in The Post Cold War Era* (New York: Routledge, 2005), hal. 1-6

sebab dan sifat konflik untuk menentukan tindakan yang diperlukan, dan membutuhkan izin pihak yang bertikai untuk melakukan tindakan tersebut.²³ Bila *preventive diplomacy* sudah dilakukan dan konflik masih terus terjadi, maka dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya, yaitu *peacekeeping*, *peace enforcement*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*.

Peacekeeping secara umum adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga perdamaian, dimana konflik sudah muncul, namun dilakukan tindakan untuk mencegah pihak yang bertikai untuk saling menyerang dengan membuat penghalang. Biasanya penghalang yang dimaksud adalah pasukan netral dari PBB atau sekelompok negara netral. Pasukan ini tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan konflik. Pasukan ini murni hanya memisahkan pihak-pihak yang berkonflik. *Peacemaking* adalah proses untuk membuat penyelesaian antara pihak yang berkonflik. Walaupun bisa dilakukan antara kedua pihak yang bertikai, proses ini bisa dilakukan juga dengan bantuan mediator pihak ketiga yang netral dan membantu terbentuknya penyelesaian perdamaian. Namun, setelah proses penyelesaian konflik ini dilakukan dan berhasil, masih ada satu proses lagi, yaitu *peacebuilding*. *Peacebuilding* adalah sebuah proses normalisasi hubungan dan rekonsiliasi perbedaan antara pihak yang berkonflik. Proses ini pada dasarnya adalah sebuah proses yang berupaya agar perdamaian yang tercipta adalah perdamaian yang tahan lama dan konflik tidak terjadi.²⁴

Dari sini kita melihat adanya kekurangan dalam perumusan *peacekeepingoperation*, karena pada kenyataannya masih perlu didebatkan mengenai konsen pihak yang berperang terhadap penempatan pasukan penjaga perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan nanti, konsep perdamaian seperti apakah yang akan terlihat dalam misi AU di Somalia. Bagaimana organisasi regional melaksanakan misi perdamaian, dibahas dalam konsep selanjutnya, yaitu konsep *regional peacekeeping*.

²³*Preventive Diplomacy and Peacekeeping*, diakses dari www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch4b.htm pada 5 Juli 2012, jam 10.58 WIB

²⁴*Conflict Research Consoortioum, "Peacemaking"*, diakses dari www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/peacemkg.htm, pada 5 Juli 2012, jam 12.10 WIB

I.4.iii. Kriteria kesuksesan Misi Perdamaian

Dalam melihat *peacekeeping*, kita juga akan melihat mengenai keberhasilan misi perdamaian. Banyak faktor yang menjelaskan mengenai suksesnya misi perdamaian.

Dalam setiap misi, harapannya adalah misi tersebut berhasil. Namun apa yang menjadikan misi tersebut dikatakan berhasil? Sampai batas apa sebuah misi dikatakan berhasil? Kriteria keberhasilan misi perdamaian menjadi satu topik yang selalu diperdebatkan dalam kajian perdamaian. Hal ini disebabkan antara satu ilmuwan dengan ilmuwan lain memperdebatkan mengenai sampai batas mana misi perdamaian ini masuk. Apakah kriteria keberhasilan ini hanya dilihat dari mandat yang dilaksanakan oleh misi perdamaian tersebut? Atau dilihat dari keseluruhan misi sehingga perdamaian yang terjadi adalah perdamaian yang berkelanjutan? Hal ini diperdebatkan karena berhubungan dengan hasil akhir misi tersebut. Ada sebuah misi yang dinyatakan berhasil melaksanakan misinya, namun tidak berhasil menciptakan perdamaian dalam situasi konflik. Hal ini terjadi contohnya pada misi UNITAF di SOMALIA.

Misi UNITAF ini adalah sebuah misi yang ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada UNOSOM, agar UNOSOM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam kondisi yang aman dan kondusif. Misi ini dinyatakan berhasil saat misi tersebut ditarik, karena beberapa pengamat melihat misi tersebut sudah berhasil melaksanakan mandatnya. Namun, nyatanya UNOSOM II yang ditinggalkan oleh UNITAF tidak dapat melaksanakan misinya dengan baik, dan dinyatakan gagal. Perdamaian di Somalia pun tidak terjadi paska misi-misi PBB tersebut selesai. Di sini kita melihat mengenai keberhasilan UNITAF dalam mandatnya, namun kegagalan dalam menciptakan perdamaian.

Oleh karena itu, salah satu hal yang penting adalah untuk menentukan sebenarnya bagaimana sebuah misi perdamaian itu bisa dikatakan berhasil. Dalam melihat AMISOM, pemaparan Pushkina mengenai kriteria suksesnya misi perdamaian akan kita pakai.

Dalam tulisan Darya Pushkina, dia menjelaskan mengenai kriteria kesuksesan misi perdamaian.²⁵ Dia memaparkan mengenai perdebatan dalam menentukan kriteria misi perdamaian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya satu tataran baku mengenai kriteria keberhasilan sebuah misi perdamaian. Menurut Anthony Lake, pemenuhan mandat misi tersebut adalah sebuah hal yang sangat penting, karena berhubungan dengan kesuksesan misi secara politik yang berdampak langsung kepada keberhasilan secara keseluruhan.²⁶ Namun menurut Duane Bratt, perdamaian itu tidak hanya berarti terjadi penghentian/gencatan konflik, namun juga berhubungan dekat dengan masalah kemanusiaan, seperti berapa jumlah nyawa yang dapat diselamatkan, dan juga peningkatan kondisi politik, ekonomi dan keadilan sosial dengan melindungi hak asasi manusia, menciptakan peraturan hukum, dan menyuburkan kerjasama ekonomi dan sosial.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, Pushkina memaparkan mengenai kriteria kesuksesan sebuah misi perdamaian sebagai gabungan dari pendapat-pendapat yang ada, yaitu faktor pemenuhan mandat untuk mengangkat mengenai hal politis, sedangkan kriteria yang lebih luas memungkinkan evaluasi mandat itu sendiri dan kontribusi misi perdamaian ke tujuan PBB²⁸ yang lebih umum yaitu keamanan internasional dan pengurangan penderitaan manusia.

Menurut Pushkina, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melihat misi perdamaian. Kriteria pertama adalah pembatasan konflik di negara tempat konflik terjadi. Hal ini menurut Bratt adalah tujuan utama *peacekeeping*. Kriteria ini berlaku dengan menganalisa apakah sebuah misi sukses dalam menahan kekerasan skala besar, mempertahankan persetujuan gencatan senjata,

²⁵ Darya Pushkina, "A Recipe for Success? Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission", dalam jurnal *International Peacekeeping*, Vol.13, No.2, Juni 2006, hal. 133-149

²⁶ Anthony Lake, "Peacekeeping: Defining Success", *Peace Colloquy*, No.1, 2002, hal 8-9 diakses dari www.nd.edu/~krocinst/colloquy/issue1/feature_lake.html

²⁷ Duane Bratt, "Assessing the Success of UN Peacekeeping Operations", *International Peacekeeping*, Vol.3, No.4, 1997, hal. 64-81

²⁸ Pushkina menyebut PBB disini karena dalam tulisannya, Pushkina memfokuskan mengenai kriteria kesuksesan misi perdamaian dalam tataran PBB di mana misi yang dianalisa adalah misi-misi PBB yang berhasil, sebagian berhasil, atau yang gagal sama sekali. Meskipun begitu, kriteria kesuksesan misi perdamaian yang dipaparkan oleh Pushkina relevan untuk digunakan dalam menganalisa keberhasilan misi perdamaian lain di luar yang dilakukan oleh PBB, karena kriteria tersebut bersifat umum seperti membahas mengenai mandat, dan keamanan internasional secara umum.

mengurangi kematian yang berhubungan dengan konflik, dan mensupervisi demobilisasi, dan juga dengan melihat proses pelucutan senjata.

Kriteria kedua adalah pengurangan penderitaan manusia. Hal ini menurut Bratt juga adalah hal yang menjadi tujuan utama misi perdamaian. Kriteria ini dioperasionalisasi dengan memperkirakan batas dalam pengurangan pelanggaran hak asasi manusia dan keberhasilan misi tersebut dalam memulangkan kembali pengungsi.

Kriteria ketiga adalah pencegahan penyebaran konflik diluar negara yang mengalami konflik untuk menjaga keamanan regional. Hal ini sangat dimungkinkan dengan adanya diaspora yang terjadi karena konflik yang menyebar ke negara lain menyebabkan terjadinya persaingan antara penduduk negara tersebut dengan diaspora negara konflik sehingga kemungkinan menimbulkan konflik baru. Untuk melihat kriteria ini, penelitian melihat mengenai sampai batas mana kedaulatan negara tetangga tersebut terjaga.

Kriteria keempat adalah mengupayakan resolusi konflik. Untuk misi perdamaian, diperlukan penciptaan kondisi lingkungan yang mampu mencegah munculnya ketegangan lagi setelah misi perdamaian mundur dari negara tersebut. Kriteria ini akan dilihat dengan mengamati sampai batas mana lingkungan yang dikembangkan/diperbaiki oleh misi perdamaian tersebut bisa mencegah kekerasan lebih lanjut.

Dalam tataran misi perdamaian yang tidak secara langsung berada di bawah PBB, kriteria-kriteria yang dipaparkan oleh Pushkina bisa diaplikasikan karena pada dasarnya, misi perdamaian yang ada dan dilaksanakan rata-rata mengacu kepada misi perdamaian PBB. Walaupun tidak ada pernyataan eksplisit mengenai hal ini, namun kita dapat melihat banyak sekali sifat-sifat dari misi perdamaian PBB yang ada pada misi perdamaian yang tidak dilakukan oleh PBB, terutama pada misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional. Dalam kasus AU, meskipun kita melihat bahwa label misi perdamaian ini adalah dilaksanakan oleh AU, namun masih ada pengaruh PBB di dalamnya. Hal ini dapat dilihat salah satunya adalah dari adanya resolusi DK PBB yang

mengotorisasi dilaksanakannya misi perdamaian oleh AU dan juga mengangkat sebagian embargo senjata atas Somalia untuk mempersenjatai tentara AMISOM yang akan melaksanakan misi di Somalia. Untuk melihat hubungan hal ini, kita akan melihatnya pada bagian kerangka teori yang membahas mengenai misi perdamaian yang dilaksanakan oleh organisasi regional.

Meskipun dari beberapa pendapat kita melihat ada banyak sekali kriteria, namun, tujuannya sudah jelas satu, berhentinya konflik dan terciptanya perdamaian. Dalam perdamaian ini juga kita dapat memasukkan unsur keamanan insani, di mana terdapat kebebasan dari ancaman secara fisik dan mental, maupun terpenuhinya hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita juga akan melihat mengenai apakah faktor-faktor perdamaian ini terpenuhi dalam misi perdamaian.

I.4.iv. *Regional Peacekeeping*

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada mengenai definisi *peacekeeping*, untuk membahas mengenai permasalahan ini, kita akan melihat *peacekeeping* ini sesuai dengan definisi yang digunakan oleh PBB sebagai *peacekeeping*.

Dari dua konsep tersebut, yaitu misi perdamaian dan organisasi regional, kita akan melihat mengenai konsep regional *peacekeeping*. Regional *peacekeeping* ini adalah konsep yang muncul dalam bidang perdamaian setelah masa Perang Dingin selesai. Oleh karena itu, erat hubungannya dengan misi perdamaian sebelum dan sesudah masa Perang Dingin. Pada dasarnya, ada beberapa kesamaan antara misi perdamaian sebelum dan sesudah, beberapa diantaranya adalah perlunya persetujuan kedua belah pihak yang bertikai. Namun dalam banyak hal lainnya, tidak sama antara kedua jenis misi tersebut. Misi perdamaian sebelum Perang Dingin lebih untuk memenuhi fungsi misi perdamaian tradisional, seperti menjaga ketertiban dan hukum, mengusahakan gencatan senjata, dan membuat *buffer zone* untuk pihak yang berperang. Misi perdamaian paska Perang Dingin, memasukkan kepentingan *human security*, pembersihan ranjau darat, penempatan pencegahan, memaksa demobilisasi dan

pengumpulan senjata, dan monitoring pemilihan. Bila sebelum Perang Dingin, misi perdamaian lebih didorong oleh prioritas politik dan militer, maka setelah Perang Dingin, lebih didorong oleh sebab kemanusiaan. Sebelumnya, ada pembatasan dikarenakan kedaulatan negara, maka sesudah Perang Dingin, karena adanya perhatian terhadap masalah kemanusiaan, masalah kedaulatan negara bisa dikesampingkan. Sebelumnya ada tahapan-tahapan untuk menurunkan pasukan, antara lain sudah adanya gencatan senjata, maka sesudah Perang Dingin misi perdamaian mulai bercampur antara metode *peacekeeping* dengan *peace enforcement*. Hal inilah yang membedakan antara misi perdamaian sebelum masa Perang Dingin dengan paska Perang Dingin, yang notabene paska Perang Dingin, lebih mengarah ke regional karena banyaknya konflik internal. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Shaw di mana Shaw menunjukkan bagaimana banyaknya permintaan akan misi perdamaian paska Perang Dingin, membuat pasukan PBB kesulitan memenuhi semua, dan akhirnya membuat SekJen PBB saat itu Boutros Boutros-Ghali mengusulkan misi perdamaian alternatif di mana organisasi regional didorong berperan besar. Usul ini dapat dilihat dalam *An Agenda for Peace* tulisan Boutros-Ghali.²⁹Dari paparan mengenai regional *peacekeeping* ini, sebenarnya kita dapat menarik sebuah gambaran umum, yaitu bahwa dalam misi perdamaian regional ini, kecenderungannya adalah mirip dengan karakteristik misi perdamaian paska Perang Dingin.

Ketika kita melihat misi perdamaian yang ada saat ini, kita melihat bahwa *human security* adalah sebuah isu yang sangat penting. Banyak misi perdamaian yang dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Intervensi yang sebelum masa Perang Dingin sangat dihindari karena adanya ketakutan untuk melanggar kedaulatan suatu negara, paska Perang Dingin menjadi sering terjadi atas dasar kemanusiaan. Konsep ini sering kita temukan dengan nama intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Dalam sebuah artikel, disebutkan bahwa paska Perang Dingin, PBB lebih banyak melakukan intervensi di konflik dalam negara (*intrastate conflict*), dibanding konflik antar negara, dan beberapa

²⁹ Carolyn M. Shaw, *Regional Peacekeeping: An Alternative to United Nations Operations?*, diakses dari lin.unb.ca/texts/JCS/Fall95/Shaw.pdf pada 6 Maret 2012, 22.31 WIB

intervensi ini dilakukan tanpa persetujuan negara tersebut.³⁰ Perdebatan mengenai hak untuk mengintervensi dan kedaulatan negara sendiri adalah perdebatan yang panjang. Tapi untuk melihat kasus ini, kita akan mencoba menggunakan konsep *responsibility to protect* yang mulai muncul juga paska Perang Dingin.

Responsibility to protect menurut Vijay Mehta, adalah sebuah konsep untuk intervensi terhadap suatu negara oleh komunitas internasional untuk mencegah terjadinya genosida, pembersihan etnis, pembunuhan masal, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara yang tidak mau atau tidak mampu menghentikannya. Pada saat itu juga, komunitas internasional mempunyai kewajiban bersama untuk mengambil tindakan apapun yang dirasa dibutuhkan untuk mencegah hal tersebut. Pusat dari konsep ini adalah *human security*. Konsep ini menunjukkan bahwa intervensi bisa dilakukan dan berarti bahwa kedaulatan negara itu tidak mutlak. Komunitas internasional harus bisa bertindak atas nama kemanusiaan saat ada kemungkinan terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan di suatu negara, dan negara tersebut tidak bisa mencegahnya.³¹ Walaupun konsep ini muncul dalam konteks PBB, dalam perkembangannya konsep ini penerapannya dimaksudkan lebih luas, yaitu komunitas internasional.

Meskipun begitu, banyak protes berhubungan dengan konsep ini, karena konsep ini dilihat sebagai sebuah tameng atas tindakan intervensi yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara kecil/yang jauh lebih lemah. Dalam perkembangannya, konsep ini berusaha untuk dilawan karena faktor tersebut dengan mengupayakan pemikiran baru mengenai penguatan kapasitas negara untuk menghentikan konflik. Bila suatu negara yang mengalami konflik memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menahan dan menghentikan konflik tersebut, maka intervensi terhadap negara tersebut tidak perlu dilakukan.

Peningkatan kapasitas negara untuk menghadapi konflik juga tentu memiliki protesnya tersendiri. Konflik memiliki satu karakteristik yang penting,

³⁰*The Economist, To Protect sovereignty, or to protect lives?*, diakses dari <http://www.economist.com/node/11376531> pada 7 maret 2012, 10.23 WIB

³¹ Vijay Mehta, *The UN Doctrine on the Responsibility to Protect*, hal 2, diakses dari <http://www.unitingforpeace.com/resources/speeches/The%20UN%20Doctrine.pdf> pada 7 Maret 2012, 11.01 WIB

yaitu unik. Antara satu konflik dengan konflik lain tidak pernah sama. Dan hal ini yang menjadi sanggahan terhadap pemikiran untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas suatu negara untuk menahan dan menghentikan konflik.

Pada dasarnya, PBB mendorong munculnya konsep *regional peacekeeping* dikarenakan adanya perdebatan mengenai konsep perdamaian. Pada saat misi perdamaian terus dilakukan oleh organisasi global seperti PBB, ada beberapa perdebatan, yaitu beban misi perdamaian yang terlalu berat dibebankan kepada PBB, sensitifitas misi perdamaian, dan masalah demokrasi. Yang pertama adalah distribusi beban. Yang dimaksud dengan distribusi beban adalah beban pelaksanaan misi perdamaian. Misi perdamaian adalah operasi yang mahal, dan dengan berkembangnya situasi internasional, diperlukan banyak misi perdamaian untuk mengurus konflik-konflik yang makin banyak muncul. PBB, yang memiliki masalah pendanaan, tentu pada akhirnya tidak mampu bila harus melaksanakan semua misi perdamaian di dunia. Oleh karena itu, dengan munculnya organisasi regional, diharapkan dapat membantu meringankan tugas PBB dengan adanya misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional. Hal ini berhubungan dengan hal kedua, yaitu sensitifitas. Sensitifitas yang dimaksud adalah bagaimana misi perdamaian itu dilihat dalam konteks kondisi sosial masyarakat yang terkena konflik. Perbedaan ini dapat dilihat dari bagaimana misi perdamaian yang dilakukan oleh pasukan asing, dengan pasukan yang berasal dari daerahnya sendiri. Keuntungan misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional salah satunya adalah misi perdamaian tersebut lebih memiliki pemahaman mengenai konflik di daerahnya sendiri daripada pasukan asing. Hal ini dikarenakan tenaga misi perdamaian dan pihak yang berkonflik relatif dekat dalam artian dekat secara fisik/geografis dan juga dekat secara perasaan/mental. Dengan pemahaman akan konflik yang lebih, diharapkan misi perdamaian yang dilakukan dapat memiliki kemungkinan berhasil yang jauh lebih besar. Hal ketiga mengenai misi perdamaian oleh organisasi regional adalah masalah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah pada saat PBB melaksanakan semua misi perdamaian, ada pandangan bahwa PBB mendominasi dan organisasi regional tidak mendapatkan kesempatan. Dengan adanya

pembagian misi perdamaian agar dilakukan oleh organisasi regional, maka unsur demokrasi dalam misi perdamaian bisa lebih terwujud.

AU akan dilihat dalam hal ini, cara seperti apa yang digunakan dalam melaksanakan misi perdamaian di Somalia.

I.4.v. Peran Organisasi Regional dalam Misi/Penciptaan Perdamaian

Dari kedua konsep tersebut, kita akan berusaha untuk melihatnya dalam satu kerangka, yaitu misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional. Pembahasan mengenai hal ini dapat kita lihat dalam tulisan Lt Gen V. K. Jetley. Dalam tulisannya, Lt Gen V. K. Jetley menjelaskan mengenai aspek-aspek pelaksanaan misi perdamaian oleh organisasi regional. Pada hakikatnya, keterlibatan dari organisasi regional sudah diakomodasi oleh PBB dalam artikel 52,53,54 Chapter 8 piagam PBB. Sehingga sebenarnya organisasi regional ini memang aslinya sebagai lini depan dalam penyelesaian masalah di regional. Bila ternyata memang mengalami masalah, baru dibawa ke PBB untuk kemudian dibuat misi perdamaian PBB. Hal ini juga berhubungan dengan masalah peace-enforcement. Hal ini berhubungan dengan sumber daya PBB yang tidak cukup untuk membuat pasukan yang kuat, sehingga perlu adanya kerjasama organisasi regional untuk membentuk pasukan yang kuat untuk memastikan misi peace-enforcement ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Dalam tulisannya, Jetley menerangkan mengenai jenis kerjasama antara PBB dan organisasi regional. Pada dasarnya, kerjasama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: konsultasi, bantuan diplomatis, bantuan operasional, *co-deployment*, *joint operations*. Jetley juga menerangkan mengenai keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya adalah adanya perspektif yang lebih jelas mengenai konflik lokal, tidak adanya perasaan sungkan untuk melaksanakan tugas peace-enforcement, kesamaan dalam standar pelatihan pasukan, adanya legitimasi dan kredibilitas, adanya keinginan yang tinggi untuk stabilitas regional, respon yang berimbang, adanya peran dari pemimpin regional dalam misi perdamaian, informasi yang lebih luas dan basis intelijen, dan banyak hal lainnya.

Kekurangannya antara lain adalah kurangnya keinginan politis, kepentingan yang bertentangan dan banyak hal lainnya yang berasal dari misi organisasi regional dalam misi perdamaian.³²

Dalam tahapan operasionalisasinya, kita akan melihat AU terlebih dahulu. Konsep organisasi internasional akan digunakan dalam melihat mengenai organisasi AU. Hal ini untuk memahami organisasi AU ini. Hal ini penting karena dalam misi perdamaian, kita akan melihat organisasi seperti apa AU ini dalam tingkatannya sebagai jenis organisasi tertentu. Apakah misalnya organisasi kontinental ini memiliki pendekatan sendiri mengenai masalah *peacekeeping*? Perkembangan seperti apa yang terjadi pada AU sebagai sebuah organisasi kontinental dalam kaitannya mengenai misi perdamaian? Apakah AU memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh PBB sehingga AU berani dan bisa lebih berhasil melaksanakan misi yang sebelumnya PBB gagal dalam pelaksanaannya?

Lalu dalam konsep *peacekeeping*, kita akan melihat mengenai apa saja yang telah dilaksanakan oleh AU. AU adalah sebuah organisasi regional karena pada dasarnya, karakteristik AU ini sesuai dengan apa yang ada dalam teori mengenai organisasi internasional yang dipaparkan di atas. Kita akan melihat mengenai apa yang telah dilakukan dan bagaimana efeknya terhadap proses perdamaian. Mengapa misi AU bisa lebih maju, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan. Lalu kemudian setelah kita melihat apa yang terjadi, kita akan merefleksikan kembali ke konsep *peacekeeping* yang kita gunakan sebelumnya, untuk melihat kesesuaian konsep dengan apa yang terjadi di lapangan.

³² Lt Gen Vijay Kumar Jetley, *Peacekeeping by Regional Organisations*, diakses dari http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-af/2010/2010-3/eng/2010_3_05-E-Jetley.pdf pada 20 Desember 2011, jam 10.28

I.5. Model Analisa

AU sebagai organisasi kontinental	Misi Perdamaian AU di Somalia (AMISOM) 2007-2011	Kinerja dari Mandat AMISOM	Mendukung TFIs menciptakan kestabilan
			Memfasilitasi Bantuan Kemanusiaan
			Mendukung proses dialog
			Mempertahankan daerah operasi dan mengamankan jalur masuk
		Keberhasilan Misi Perdamaian	Pembatasan Konflik
			Pengurangan Penderitaan Manusia
			Pencegahan Penyebaran Konflik
			Mengupayakan Resolusi Konflik

I.6. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa misi AMISOM ini berhasil dalam melaksanakan misinya. Selain itu diasumsikan pula bahwa pihak yang relatif lebih kuat dan memiliki dukungan yang besar, lebih memiliki kapabilitas dan kemungkinan berhasil yang lebih tinggi daripada pihak yang relatif tidak sekuat pihak pertama dan tidak memiliki dukungan sebanyak pihak pertama. Asumsi ini akan berusaha untuk dibuktikan dengan melihat misi AMISOM.

I.7. Metodologi Penelitian

Analisa dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan memprediksi gejala-gejala yang dianggap sebagai masalah atau menjelaskan suatu fakta atau fenomena yang terjadi serta kaitannya dengan fenomena lain. Pada intinya penelitian deskriptif berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis berupaya untuk melaporkan tentang fenomena yang terjadi.³³

³³ Diah Aty Rachmawaty, *Intervensi Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Resolusi Konflik (Studi Kasus: Intervensi PBB di Somalia 1992-1995)*, Tesis S2, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan internasional, Program Studi Hubungan internasional (Jakarta: 2004), hal. 34

Oleh karena itu, urutan dalam penelitian ini adalah pengamatan--> pertanyaan --> pengumpulan data --> kesimpulan sementara --> pengamatan --> kesimpulan akhir.

Kesimpulan dari penelitian ini juga kemungkinan bersifat kontekstual, di mana hanya akan berlaku untuk kasus Somalia saja, meskipun tidak menutup kemungkinan bila ternyata ada kasus lain yang identik dengan Somalia, hasil penelitian bisa digunakan untuk melihat kasus tersebut.

Metode untuk melakukan penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Data yang dipakai utamanya adalah data sekunder yaitu data pustaka baik fisik maupun digital. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data primer seperti hasil wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini.

I.8. Rencana Pembabakan

Rencana pembabakan dalam skripsi ini adalah 4 bab. Bab pertama menjelaskan mengenai kerangka konsep dan teori, metodologi, rencana pembabakan, dan membahas mengenai latar belakang. Di bab ini, akan dipaparkan mengenai konsep organisasi internasional, organisasi regional, misi *peacekeeping* dan dinamika dan variabelnya. Selain itu, keadaan Somalia yang kacau dan apa yang terjadi di sana akan dijelaskan juga, sebagai latar belakang untuk analisa. Bab kedua akan menjelaskan mengenai masalah Somalia dan konflik secara mendalam, untuk kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang ada dalam misi perdamaian AU di Somalia. Bab ketiga menjelaskan mengenai misi perdamaian yang dilakukan oleh AU dan aspek-aspeknya. Apa saja yang telah dilakukan AU dalam misi perdamaianya. Faktor-faktor apa saja yang menjadi isi dari misi perdamaianya, dan keadaan seperti apa yang mengikuti misi perdamaianya, baik kondisi internasional, kondisi regional, maupun faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi misi perdamaian. Bab keempat akan melihat apa yang membuat AU relatif lebih berhasil dalam misi perdamaianya. Apa yang dapat direfleksikan kembali ke konsep misi

perdamaian sehingga dapat menjadikan misi perdamaian dapat lebih berhasil membawa perdamaian di masa yang akan datang. Pada bab keempat inilah yang menjadi inti analisa penelitian ini. Selanjutnya pada kesimpulan, akan dituliskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini, dan temuan/pertanyaan post script, kalau ada.

I.9. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Masalah ini menarik untuk dibahas, karena penelitian ini meneliti mengenai misi perdamaian yang memiliki dampak yang besar pada aspek kemanusiaan secara langsung, dan operasi-operasi perdamaian yang dilakukan di seluruh dunia.

Pertama adalah karena penelitian ini berhubungan dengan masalah perdamaian. Sesuai dengan yang diterangkan sebelumnya, perdamaian adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya perdamaian, keamanan manusia otomatis hilang, sehingga manusia tidak dapat hidup dengan semestinya. Oleh karena itu, perdamaian harus tercipta agar manusia dapat hidup dengan aman dan dapat beraktifitas dengan baik.

Dalam konteks hal ini, kita berusaha untuk mempelajari mengenai perdamaian dengan melihat studi kasus Somalia. Paska Perang Dingin, mayoritas konflik yang terjadi adalah konflik intrastate, daripada konflik interstate. Konflik yang disebut juga dengan konflik internal ini adalah konflik yang menjadi fokus utama perdamaian kali ini. Somalia adalah salah satu contoh baik untuk mempelajari mengenai konflik internal dan penanganannya yang terbaik. Hal ini karena Somalia sudah sampai pada tahapan negara gagal dengan banyaknya *warlord* dan fraksi-fraksi dalam negara yang membuat pemerintahan Somalia tidak efektif dan kehilangan kedaulatan di negaranya sendiri. Pada tahap seperti ini, kita melihat adanya perkembangan yang baik ketika African Union melakukan misi perdamaian di sana. Dengan melihat apa yang dilakukan oleh African Union, kita dapat mempelajari bagaimana melakukan misi perdamaian yang efektif pada keadaan konflik internal yang akut seperti yang terjadi pada di Somalia.

Kedua, dengan mempelajari apa yang dilakukan oleh African Union, kita dapat merumuskan mengenai operasionalisasi misi perdamaian yang efektif. PBB gagal melakukan misi perdamaian di Somalia pada awal tahun 1990an. Namun, AU, pada masa-masa akhir ini bisa membawa perkembangan yang signifikan pada perdamaian Somalia. Bagaimanakan organisasi internasional bertindak dalam misi perdamaian. Apakah kini sudah mulai terdapat pergeseran mengenai misi perdamaian? Siapakah yang seharusnya melakukan misi perdamaian? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kemungkinan akan menjadi pertanyaan *post research* yang berhubungan dengan organisasi internasional yang melakukan misi perdamaian. Dengan penelitian ini, diupayakan untuk menemukan rumusan yang penting mengenai organisasi internasional yang melakukan perdamaian yang efektif, apakah cukup organisasi regional saja, atau perlu organisasi global.

Ketiga, dengan melihat penelitian ini, kita berusaha untuk melihat mengenai bagaimana organisasi regional bisa lebih berhasil

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir untuk syarat kelulusan, yaitu skripsi.

BAB II

KONFLIK SOMALIA

Konflik Somalia adalah salah satu konflik yang rumit hingga masa sekarang. Dikatakan rumit karena banyak sekali karakter konflik yang ada di dalam konflik Somalia ini, dan konflik ini bersifat *protracted*. Konflik yang *protracted* adalah konflik yang rumit dan berlangsung berlarut-larut tanpa solusi yang menyelesaikan konflik tersebut. Jika merunut hingga awal negara Somalia merdeka, konflik ini muncul dengan banyak sekali muka dan perubahan. Pada awalnya, pada masa Perang Dingin, muncul kudeta oleh Siad Barre. Siad Barre kemudian memerintah secara otoriter, hingga akhirnya pada awal tahun 90an, Siad Barre digulingkan lagi oleh satu gerakan bersama yang terbentuk dari banyak unsur golongan yang menginginkan agar pemerintahan Siad Barre ini berakhir. Kelompok yang menggulingkan Siad Barre ini kebanyakan adalah dari unsur klan dan kelompok-kelompok kecil di Somalia. Namun, karena pada awalnya tujuan kelompok ini hanya untuk menjatuhkan Siad Barre, kelompok ini bubar dengan tujuannya masing-masing, dan meninggalkan Somalia kosong tanpa kejelasan setelah Siad Barre jatuh. Setelah masa ini, muncul konflik internal dengan klan-klan yang berusaha untuk mengambil kontrol akan daerah yang diinginkan. Hal ini membuat muncul perang saudara yang terus berjalan hingga saat ini. Aktor-aktor yang terlibat pun akhirnya berubah-ubah seiring dengan perkembangan konflik. Bila pada awalnya banyak sekali klan, kemudian menyusut menjadi beberapa aktor saja. Selain itu, konflik yang sebelumnya “hanya” konflik internal dengan bentuk perang saudara, berkembang menjadi masalah lain, seperti masalah keamanan laut dengan maraknya pembajakan oleh bajak laut Somalia, ancaman terorisme dengan terhubungnya gerilyawan Al-Shabaab dengan jaringan Al-Qaeda, munculnya banyak pengungsi yang dimungkinkan akan menghadirkan masalah sosial dan menjadi agen *spill over conflict*, dan lain-lain.

Untuk dapat menjawab pertanyaan permasalahan, sangat penting bagi kita untuk memahami karakteristik konflik yang berlangsung di Somalia.

II.1. Pihak yang Terlibat Konflik di Somalia

Untuk dapat memahami suatu konflik, sangat penting untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam kasus Somalia, aktor yang berperang dan terlibat di dalam konflik ini berubah-ubah. Namun, untuk mempermudah pemahaman dan demi efisiensi, kita akan melihat perkembangan aktor dari masa Siad Barre dijatuhkan hingga saat ini.

Pada masa awal setelah Siad Barre jatuh, ada banyak sekali golongan, klan, dan *warlord* yang terlibat, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi satu-persatu aktor yang ada. Jadi pada masa ini, kita sebut saja pihak yang terlibat adalah klan-klan di Somalia. Namun melihat perkembangan konflik yang terjadi di Somalia dengan tidak adanya pemerintahan, mengakibatkan kekhawatiran tersendiri bagi dunia internasional. Oleh karena itu, PBB meluncurkan misi perdamaian dengan nama UNOSOM I dan UNOSOM II. Diantara dua misi ini, Amerika Serikat juga mengadakan misi dengan nama UNITAF untuk mendukung misi PBB.

II.1.i. UNOSOM I, UNOSOM II, UNITAF

Tiga misi tersebut kita letakkan dalam satu pembahasan bersama dengan alasan bahwa tiga misi tersebut saling berhubungan erat, dan waktu pelaksanaannya juga berurutan. Urutan misi yang dilaksanakan adalah UNOSOM I, UNITAF, UNOSOM II.

UNOSOM I, singkatan dari *United Nations Mission on Somalia I* adalah misi yang pertama kali dilakukan setelah Siad Barre jatuh. UNOSOM I mempunyai misi menyalurkan bantuan internasional, utamanya bantuan pangan kepada warga negara Somalia, karena ditakutkan munculnya wabah kelaparan sehingga mengakibatkan kematian massal di Somalia. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, PBB melakukan intervensi dengan mengirimkan UNOSOM I. UNOSOM I memiliki durasi misi dari April 1992 hingga Maret

1993. Pada dasarnya fungsi UNOSOM I adalah untuk mengawasi gencatan senjata di Mogadishu dan memberikan perlindungan dan keamanan untuk personel PBB, peralatan dan logistik di pelabuhan dan bandara di Mogadishu, dan mengawal pengiriman bantuan kemanusiaan dari pelabuhan dan bandara ke pusat distribusi di kota dan lingkungan sekitarnya. Pada perkembangannya, pada bulan Agustus 1992, mandat dan kekuatan UNOSOM I diperluas agar UNOSOM dapat melindungi konvoy kemanusiaan dan pusat distribusi di Somalia. Pada tahun 1992, setelah situasi di Somalia semakin memburuk, Dewan Keamanan PBB mengizinkan negara anggota untuk membentuk *Unified Task Force* (UNITAF) untuk membentuk kondisi yang aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. UNITAF ini bekerja dengan koordinasi dengan UNOSOM I untuk mengamankan pusat populasi penting dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dikirimkan dan didistribusikan.³⁴ Selain itu pembentukan UNITAF didasari dengan fakta bahwa UNOSOM I ini tidak memiliki kekuatan militer dan banyaknya kekerasan terjadi di Somalia karena banyaknya *warlord* yang berperang, mengakibatkan tingkat keamanan misi UNOSOM ini menjadi sangat rendah.

Unified Task Force adalah misi dimana Amerika Serikat memiliki andil sangat besar dengan tujuan untuk mendukung UNOSOM dalam melaksanakan misinya. Keterlibatan tentara Amerika Serikat di Somalia ini bahkan sudah dijadikan sebagai bahan sebuah novel dan film, yaitu *Black Hawk Down*. UNITAF ini adalah hasil adaptasi resolusi 794 pada 3 Desember 1992. Dengan diadaptasinya resolusi ini, tawaran Amerika Serikat untuk membantu menciptakan kondisi dan situasi yang aman dengan segala cara yang dibutuhkan diterima oleh DK PBB. Misi UNITAF ini sendiri bernama "*Operation Restore Hope*" yang diinisiasi pada 4 Desember 1992 oleh President George Bush Sr. Pasukan UNITAF ini adalah pasukan yang terdiri dari kurang lebih 28.000 personel tentara Amerika Serikat dengan tambahan 17.000 pasukan dari 20 negara.³⁵

³⁴ *UNITED NATIONS OPERATION IN SOMALIA I*, diakses dari <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm> pada 3 April 2012, jam 15.00 WIB

³⁵ Loc Cit. <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm>

Melihat perkembangan yang didapat dari UNOSOM I dan UNITAF, pada 3 Maret 1993, diusulkan untuk diadakan misi baru untuk mengambil alih kerja UNOSOM I dan UNITAF. Hal ini diusulkan oleh Sekjen PBB saat itu. Meskipun efek dari UNITAF dan UNOSOM I cukup bagus, namun situasi dan kondisi yang aman belum terbentuk dan masih banyak terjadi tindak kekerasan. Masih tidak ada pemerintahan yang berfungsi secara efektif di Somalia, tidak ada polisi dan tentara nasional. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah tidak ada penempatan tentara UNITAF atau UNOSOM I di daerah barat laut dan timur laut Somalia di mana keamanan sangat bermasalah. Mandat UNOSOM II adalah untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan, termasuk penggunaan kekuatan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu tugas UNOSOM II adalah menyelesaikan tugas yang dimulai oleh UNITAF untuk mengembalikan perdamaian, stabilitas, hukum dan ketertiban dengan pelucutan senjata dan rekonsiliasi. Tanggung jawabnya antara lain adalah mengawasi gencatan senjata, mencegah munculnya kekerasan, menyita senjata yang tidak legal, menjaga keamanan di pelabuhan, bandara, dan jalur komunikasi yang dibutuhkan untuk distribusi bantuan kemanusiaan, melanjutkan penyapuan ranjau darat, dan membantu repatriasi pengungsi di Somalia. UNOSOM II juga diharapkan untuk membantu warga negara Somalia untuk membangun ulang ekonomi dan kehidupan sosial politiknya, pembentukan ulang struktur institusional, mencapai rekonsiliasi politik nasional, membentuk ulang negara Somalia berdasarkan pemerintahan yang demokratis dan merehabilitasi ekonomi dan infrastruktur negara. Pada Februari 1994, setelah beberapa kekerasan dan serangan kepada tentara PBB, DK PBB merevisi mandat UNOSOM II untuk tidak menggunakan metode koersif. UNOSOM II sendiri akhirnya berakhir pada 31 Maret 1995, karena tidak ada lagi faksi di Somalia yang meminta ekstensi yang lebih panjang, tidak juga NGO maupun *humanitarian agencies*.³⁶

³⁶UNITED NATIONS OPERATION IN SOMALIA II, diakses dari <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2p.htm> dan <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2b.htm> pada 3 April 2012, jam 12.37 WIB

II.1.ii. ICU (Islamic Court Union)

ICU adalah sebuah organisasi yang muncul pada pertengahan tahun 2000an. ICU ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan 11 klan yang memiliki kekuasaan sejak pemerintahan pusat runtuh.³⁷ ICU ini sesuai dengan namanya adalah sebuah organisasi yang mendasarkan hukumnya pada hukum Islam yang kuat atau hukum syariah, seperti dengan apa yang dilakukan oleh Taliban di daerah kekuasaannya di Afghanistan. Tujuan ICU adalah untuk membentuk Somalia sebagai sebuah negara Islam yang stabil dan damai.

Awalnya, ICU adalah hasil dari bentukan sebuah organisasi bernama Al-Ittihad Al-Islamiya (AIAI) yang mengalami kekalahan karena serangan tentara Ethiopia pada tahun 2000. Musuh utama ICU adalah TFG. ICU menguasai mayoritas dari bagian selatan Somalia pada Oktober 2006. Namun, karena serangan TFG dan tentara Ethiopia antara Desember 2006-Januari 2007, ICU terpecah. Salah satu pecahannya, yaitu Al-Shabaab, terus melakukan perlawanan terhadap TFG dan tentara asing.³⁸ Gerilyawan Al-Shabaab inilah yang kemudian menjadi pihak yang berperang yang menyusahkan TFG hingga saat ini.

II.1.iii. Al-Shabaab

Gerilyawan Al-Shabaab adalah salah satu sayap militer ICU yang masih bertahan dan berpengaruh kuat di selatan Somalia hingga sekarang. Bahkan, sejak TFG berhasil menguasai Mogadishu dengan bantuan AMISOM, gerilyawan Al-Shabaab berganti taktik menjadi perang gerilya. Meskipun Mogadishu akhirnya berhasil dikuasai oleh TFG dan pengamanan didukung oleh AMISOM, namun serangan-serangan terus terjadi terhadap TFG., dan masyarakat sipil. Dalam perkembangannya, Al-Shabaab dimasukkan kedalam daftar kelompok teroris oleh Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush Jr. pada Februari

³⁷*Background Note: Somalia*, diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2863.htm> pada 12 April 2012, jam 15.54 WIB

³⁸*The Supreme Islamic Courts Union/ al-Ittihad Mahakem al-Islamiya (ICU)*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/icu.htm> pada 12 April 2012, 16.13 WIB

2008.³⁹ Diketahui juga pada Februari 2012, Al-Shabaab bergabung dengan jaringan Al-Qaeda.⁴⁰

II.1.iv. TFG (*Transitional Federal Government*)

Dalam sejarah pembentukannya, TFG adalah sebuah hasil dari mediasi yang dipimpin oleh IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*) yang merupakan usaha keempat belas untuk membentuk pemerintahan di Somalia yang berfungsi sejak berakhirnya pemerintahan diktaktor Siad Barre pada tahun 1991. TFG dibentuk pada tahun 2004 dan sampai Juni 2005, TFG bertindak dari negara Kenya.⁴¹

TFG inilah pemerintahan yang diakui secara internasional, dan mendapat dukungan untuk kemudian dapat membentuk sebuah pemerintahan Somalia yang berdaulat atas Somalia secara keseluruhan. TFG ini saat ini memerangi gerilyawan Al-Shaabab untuk mendapatkan kontrol penuh atas bagian selatan Somalia yang dikuasai oleh Al-Shaabab, termasuk Mogadishu. Dalam upayanya ini, TFG didukung oleh PBB, AU, dan Amerika Serikat.

TFG ini dalam perkembangannya mengalami banyak dinamika. Pada beberapa saat sebelum AMISOM muncul, TFG dilemahkan oleh persaingan antara presiden dan perdana menteri yang mengakibatkan kehilangan kontrol beberapa daerah, kehilangan kredibilitas, dan kepercayaan terhadap TFG dari warga Somalia pada tahun 2007.⁴² Pada dasarnya, TFG ini agak rapuh dalam strukturnya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yang pertama yaitu struktur parlemen transisi federal yang terdiri dari politisi dan sekumpulan klan. Dalam struktur ini, terjadi perebutan kekuasaan antara kedua pihak, yaitu antara politisi

³⁹ Ted Dagne, *Somalia: Current Conditions and Prospects for a Lasting peace* (Washington DC: Congressional Research Service, 2010), hal. 5

⁴⁰ *Somalia's al-Shabaab join al-Qaeda*, diakses dari www.bbc.co.uk/news/world-africa-16979440 pada 13 April 2012, jam 00.47 WIB

⁴¹ Stephanie Hanson dan Eben Kaplan, *Somalia's Transitional Government*, diakses dari <http://www.cfr.org/somalia/somalias-transitional-government/p12475#p2> pada 10 April 2012, jam 21.16 WIB

⁴² *Somalia: To Move Beyond The Failed State*, Africa Report No. 147 – 23 December 2008, International Crisis Group

dan klan, di mana penyuaipan menjadi hal yang umum terjadi. Voting menjadi ajang penyuaipan, dan pembuatan hukum yang tidak sehat. Masalah kedua soal TFG adalah *Transitional Federal Charter*, di mana dokumen yang mengatur mengenai pemerintahan federal transisi ini mengandung banyak sekali kesalahan dan mengakibatkan ketimpangan pemerintahan. Ketimpangan pemerintahan ini terjadi karena tidak adanya mekanisme *check and balance*, terutama pada pembagian kerja antara presiden dan perdana menteri. Hal inilah yang membuat terjadinya konflik internal antara presiden dengan perdana menteri. Masalah ketiga adalah mengenai konsep federalisme. Federalisme ini menjadi masalah karena dilihat sebagai pergeseran ke agenda Ethiopia, sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Somalia, terutama gerakan-gerakan garis keras, menentang TFG dan menjadikan TFG ini sebagai sebuah ancaman terhadap mereka.

II.1.v. African Union (AU)

AU adalah sebuah organisasi kontinental yang berada di Afrika yang beranggotakan negara-negara di Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan negara anggota.

AU ini adalah sebuah organisasi yang berawal dari *Organization of African Union* (OAU). Perkembangan ini ditujukan agar dalam mengurus masalah-masalah tertentu, AU lebih memiliki kapabilitas. Contoh hal tersebut adalah dalam melihat mengenai misi perdamaian. AU memiliki dewan tersendiri yang mengurus masalah perdamaian dan keamanan. Dewan tersebut adalah *Peace and Security Council*(PSC).

II.1.vi. African Union Mission in Somalia (AMISOM)

AMISOM adalah sebuah misi yang dilaksanakan di bawah African Union, Organisasi Kontinental di Afrika. Sejarah AMISOM dapat dilihat dari Resolusi 1725 Dewan Keamanan PBB yang intinya adalah komitmen DK PBB untuk

penyelesaian masalah di Somalia melalui *Transitional Federal Charter*. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan teknis, berdasarkan resolusi ini, seperti kenapa negara yang berbatasan dengan Somalia tidak menerjunkan pasukan ke Somalia. Dan beberapa lagi resolusi-resolusi yang diloloskan oleh DK PBB yang pada akhirnya akan menjadi dasar dibentuknya AMISOM. Selain itu, sebenarnya, AMISOM ini juga salah satu hasil dari upaya IGAD untuk negosiasi dan rekonsiliasi Somalia.

AMISOM dibentuk pada 19 Januari 2007 dan memiliki mandat berdurasi 6 bulan. Bila dirasa masih diperlukan, mandat akan diperbarui oleh DK PBB. AMISOM menggantikan dan melanjutkan IGASOM (*Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace and Support Mission to Somalia*) yang digagas oleh IGAD pada September 2006. Meskipun sudah dibuat pada 19 September 2007, namun persetujuan DK PBB agar AU menurunkan misi perdamaian baru turun pada 20 Februari 2007. Tujuan dari misi perdamaian ini adalah untuk mendukung kongres rekonsiliasi nasional dan meminta laporan dalam waktu 60 hari dalam misi perdamaian PBB yang dimungkinkan. DK PBB mengotorisasi misi AU ini untuk menggunakan segala cara yang layak untuk memberikan dukungan untuk dialog dan rekonsiliasi dengan mendukung pergerakan yang bebas, jalur yang aman dan perlindungan untuk semua yang terlibat dalam kongres rekonsiliasi nasional termasuk semua pemegang kepentingan, yaitu pemimpin politik, pemimpin klan, pemimpin agama dan perwakilan anggota masyarakat.⁴³

Invasi Ethiopia ke Somalia juga salah satu hal yang menyebabkan AMISOM ini dibentuk. Karena adanya sentimen agama dan kecurigaan bahwa Ethiopia adalah salah satu aktor yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, keberadaan tentara Ethiopia di Somalia adalah hal yang dikhawatirkan justru akan berdampak buruk. Oleh karena itu, dengan adanya AMISOM, diharapkan bahwa perdamaian dapat lebih terlaksana karena AMISOM menggantikan tentara Ethiopia yang dicurigai memiliki kepentingan tertentu.

⁴³AMISOM Background, diakses dari <http://amisom-au.org/about/amisom-background/> pada 15 April 2012, jam 17.08 WIB

II.2. Konflik yang Asimetris

Konflik yang terjadi adalah konflik yang asimetris. Konflik ini termasuk asimetris karena konflik yang ada selalu tidak seimbang. Konflik asimetris ini sendiri adalah sebuah konsep mengenai peperangan di mana antara pihak yang berperang terdapat perbedaan kekuatan yang signifikan. Sedangkan menurut Paul, konflik asimetris adalah konflik yang melibatkan dua negara dengan sumber daya ekonomi dan militer keseluruhan yang tidak setara.⁴⁴ Pengertian ini adalah pengertian lama dalam konteks perang antar negara. Namun, dalam perkembangannya, Kenneth McKenzie, Jr., memaparkan bahwa untuk merefleksikan zaman yang sudah semakin berubah, pengertian dari konflik asimetris perlu diperbarui. Menurutnya, konflik asimetris adalah “mengangkat taktik atau kekuatan operasional yang inferior melawan kelemahan lawan yang lebih kuat untuk mencapai efek yang tidak proporsional dengan tujuan merusak mental lawan untuk mencapai tujuan strategi asimetrikator”.⁴⁵ Definisi secara umum perang asimetris adalah sebuah perang antara pihak yang berperang di mana kekuatan militernya relatif berbeda jauh, atau yang strategi atau taktiknya berbeda secara signifikan.

Dalam kasus Somalia, konflik terjadi dalam beberapa tahap. Pada tahun 90-an, konflik yang terjadi adalah konflik antar klan dan antar warlord. Pada tahun ini, kekacauan terus terjadi hingga akhirnya tidak ada pemerintahan pusat yang efektif. Pada tahun 1991, setelah Siad Barre berhasil digulingkan, konflik muncul antara dua pimpinan klan, yaitu Mohammed Farah Aideed dan Ali Mahdi Mohamed. Konflik ini memakan ribuan korban dan Aideed mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai presiden republik. Pada tahun 1996, Aideed dibunuh dan digantikan oleh anaknya, Hussein Farah Aideed. Hingga tahap ini, konflik yang

⁴⁴ T.V. Paul, *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hal. 20

⁴⁵ Kenneth McKenzie, Jr., *The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning*, Chapter 3, *Quadrennial Defense Review 2001*, hal. 2; diakses dari http://www.ndu.edu/inss/press/QDR_2001/sdcasch03.html seperti yang ada di http://www.semp.us/publications/biot_reader.php?BiotID=167 pada 15 April 2012, jam 17.44 WIB

terjadi asimetris, karena pada masa misi UNOSOM I, UNITAF dan UNOSOM II, perang terjadi antara gerilyawan dan militant klan dan misi perdamaian PBB. Pada tahap ini, pihak yang superior adalah pasukan dari luar yaitu UNITAF dan UNOSOM II, dan pihak yang sub-ordinat adalah pihak gerilyawan klan dan milisi-milisi yang menguasai daerah-daerah di Somalia. Taktik yang digunakan pada masa itu oleh militant klan, seperti gerilya dalam kota. Hal ini membuat banyak muncul kekacauan dan korban sipil. Hal ini juga yang menyebabkan kehancuran di Mogadishu. Hal ini juga yang menyebabkan tidak adanya pemerintahan pusat Somalia yang efektif hingga menyebabkan Somalia dicap sebagai negara gagal, menurut majala Foreign Policy.⁴⁶

Hal ini terus berlangsung hingga awal tahun 2000-an, di mana akhirnya ada upaya untuk mediasi dan rekonsiliasi Somalia. Akhirnya pada pertengahan tahun 2000-an, TFG muncul dan merubah arah konflik. Konflik yang dulunya antara klan, berkembang menjadi antara klan, TFG, dan akhirnya bertambah dengan pasukan Ethiopia dan pasukan pendukung TFG seperti AMISOM. Pada masa ini, konflik yang ada adalah asimetris. Kenapa disebut asimetris? Karena konflik yang terjadi adalah konflik yang tidak seimbang, secara teori, antara pasukan multinasional dibawah AMISOM yang lebih superior, melawan milisi Al-Shabaab yang cenderung sub-ordinat dan memiliki kekuatan senjata yang lebih lemah dan akhirnya memilih taktik gerilya. Apalagi begitu Al-Shabaab terusir dari Mogadishu, taktik gerilya mereka semakin menjadi dengan melakukan serangan menggunakan mortar, yang buruknya jarang tepat sasaran sehingga menimbulkan korban jiwa di pihak sipil.

Secara teoritis, AU adalah pihak dengan dukungan internasional dan senjata yang lebih memadai karena didukung PBB dan Amerika Serikat. Tentaranya mendapatkan pelatihan dan senjata yang lebih kuat dan lebih mudah daripada gerilyawan Al-Shabaab. Pasukan ini juga bergabung dengan pasukan TFG yang sampai saat ini, bisa kita sebut sebagai pasukan pemerintah Somalia.

⁴⁶*The Failed States Index 2011*, diakses dari <http://www.foreignpolicy.com/failedstates> pada 15 April 2012, jam 21.59 WIB

Dari karakteristik tersebut kita bisa menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Somalia adalah konflik asimetris. Penting untuk memahami hal ini, karena hal ini berhubungan dengan *nature* konfliknya. Konflik Asimetris memiliki kecenderungan bahwa, dengan semakin besar perbedaan kekuatan antara pihak yang berperang, maka ini akan berefek kepada psikologis aktor. Andrew J.R. Mack dalam artikelnya, menyatakan bahwa semakin besar perbedaan dalam kekuatan relatif antara pihak, maka di pihak yang kuat, semakin rendah niat/resolusi dan dengan demikian semakin rentan secara politik. Sebaliknya dengan pihak yang lebih lemah, niat/resolusi mereka semakin kuat dan secara politik lebih tidak rentan.⁴⁷ Pendapat Mack ini lebih mengacu kepada bagaimana negara besar bisa kalah dalam perang kecil, namun untuk beberapa hal, bisa dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa aktor yang lemah akan berperang dengan sangat serius hingga sampai ke penggunaan taktik bunuh diri. Dalam kasus Somalia, kita melihat bahwa Al-Shabaab sudah menggunakan taktik bunuh diri ini dalam beberapa serangannya. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana AMISOM dan unsur perdamaian yang ada di Somalia bertindak untuk menciptakan perdamaian di Somalia.

Konflik yang asimetris ini tentu mempengaruhi juga bagaimana keadaan di Somalia. Banyak hal yang terjadi berkaitan dengan konflik yang asimetris ini, seperti bajak laut yang muncul, kegiatan Al-Shabaab yang berhubungan dengan terorisme, dan banyak hal lain yang berhubungan dengan unsur keamanan insani seperti pengungsi, situasi di mana banyak pelanggaran HAM, dsb.

II.3. Kekacauan Pemerintahan

Pemerintahan di Somalia, kalau tidak bisa dibalang tidak ada, bisa dibalang sangat kacau. Inilah salah satu hal yang menyebabkan Somalia dicap sebagai gagal, yaitu karena tidak ada pemerintahan pusat yang efektif.

⁴⁷ Andrew J.R. Mack, "Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict", dalam *World Politics*, Vol. 27, No. 2 (Januari 1975), hal. 175-200

Sejak kejatuhan Siad Barre, pemerintahan pusat hancur. Hal ini disebabkan karena setelah Siad Barre digulingkan oleh gabungan klan-klan dan *warlord*, gabungan ini segera pecah tanpa ada gerakan untuk membuat pemerintahan baru. Gabungan banyak pihak tersebut segera pecah karena memang tujuan mereka bersatu hanya untuk menjatuhkan Siad Barre.

Setelah Siad Barre jatuh, beberapa klan saling berperang untuk mengklaim sebagai pemimpin. Mohammed Farah Aidede dan Ali Mahdi Mohamed adalah dua tokoh yang bersaing, namun kemudian Aidede lah yang akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Somalia. Pada tahun 1996, Aidede dibunuh dan digantikan oleh anaknya.

Keadaan di Somalia bagian utara juga tidak terlalu bagus dalam hal pemerintahan, karena ada dua daerah yang mendeklarasikan sebagai negara lepasan, yaitu Somaliland dan Puntland. Dua negara lepasan ini tidak diakui oleh dunia internasional. Meskipun begitu, dua negara ini bertindak secara otonomi, dan memerintah daerahnya sendiri.

Keadaan tidak bertambah baik dan kekacauan terus terjadi. Pada tahun 2000-an ada upaya dari dunia internasional untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi agar ada pemerintahan pusat yang bisa mengatur Somalia. Beberapa upaya tersebut dilakukan oleh IGAD, dan PBB. Akhirnya dibentuklah TFG sebagai sebuah pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional yang mewakili Somalia. TFG ini walaupun didukung oleh dunia internasional, belum bisa memerintah di Somalia karena kondisi keamanan yang tidak kondusif sehingga TFG ini berbasis di Kenya dan baru bisa masuk ke Mogadishu beberapa tahun setelah dibentuk. Namun TFG ini masih belum memerintah dengan efektif karena gerilyawan Al-Shabaab masih menguasai banyak daerah di Somalia bagian selatan dan tengah. Somaliland dan Puntland juga masih menjadi masalah karena belum bergabung dengan TFG untuk membentuk Somalia. Baru pada akhir-akhir ini, otoritas Somaliland mau berdialog dengan TFG.

Kekacauan pemerintahan inilah yang menyebabkan Somalia sulit untuk mencapai perdamaian. Dengan banyaknya klan yang berperang, gerilyawan Al-

Shabaab yang menguasai banyak daerah di Somalia selatan, dan adanya negara lepasan Somaliland dan Puntland, rekonsiliasi menjadi sangat sulit karena banyaknya aktor dan banyaknya kepentingan. Hal ini tentu menyebabkan banyak masalah muncul karena perdamaian tidak kunjung terjadi.

II.4. Masalah yang timbul karena konflik

Masalah yang timbul sebagai hasil sampingan atas konflik Somalia ini cukup banyak karena konflik ini telah berlangsung sangat lama. Masalah-masalah ini cukup mempengaruhi kinerja AMISOM karena secara tidak langsung berhubungan dengan beberapa kondisi perdamaian yang harus ada. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah Ancaman terorisme, pembajakan kapal laut, dan masalah keamanan insani.

Ancaman Terorisme

Ancaman terorisme adalah salah satu masalah sampingan yang penting untuk dilihat, berhubungan dengan konstelasi politik dunia, di mana pada tahun 2000-an, terorisme menjadi sebuah fokus baru yang memiliki pengaruh yang besar. Hal ini tentu menjadi sebuah perhatian masyarakat internasional dan berhubungan dengan dukungan terhadap misi AMISOM. Ancaman terorisme ini adalah salah satu alasan kenapa Amerika Serikat mendukung misi AMISOM.

Pada perkembangan terakhir, Somalia bagian selatan dikuasai sebagian besar oleh milisi Al-Shabaab yang ingin menerapkan hukum syaria yang sangat keras. Namun kemudian, dengan munculnya pasukan AMISOM pada tahun 2007, milisi Al-Shabaab semakin terdesak dan pada akhirnya terpaksa harus keluar dari Mogadishu untuk melakukan perlawanan.

Di sini, kita lihat latar belakang Al-Shabaab. Al-Shabaab adalah salah satu sayap ICU yang bertahan walaupun ICU sudah runtuh. Al-Shabaab dengan begitu

mewarisi ideologi ICU yang menginginkan Somalia yang berdasar kepada hukum Islam.

Begitu Al-Shabaab semakin tertekan, ada kecenderungan Al-Shabaab menjadi semakin dekat dengan Al-Qaeda. Hal ini terbukti dengan pernyataan Al-Shabaab mengenai hubungannya dengan Al-Qaeda pada siaran persnya.⁴⁸

Rusaknya institusi negara juga menjadi salah satu sebab kenapa ancaman terorisme menjadi nyata di Somalia. Dengan tidak adanya polisi dan tentara yang mampu menjaga Somalia, daerah Somalia menjadi daerah yang sangat rawan disusupi oleh elemen terorisme. Amerika Serikat melihat hal ini sebagai sebuah hal yang sangat penting, berhubungan dengan agenda perang melawan terorismenya. Dengan tidak adanya institusi negara, Somalia bisa menjadi negara tempat transit elemen terorisme, atau malah menjadi tempat persembunyian.⁴⁹ Dengan adanya ancaman terorisme seperti ini, tentu akan menjadi masalah bagi dunia internasional, karena terorisme menjadi bisa tumbuh di kawasan ini dengan menggunakan Somalia sebagai basisnya.

Bajak Laut di Somalia

Bajak laut di Somalia adalah salah satu kisah bajak laut modern yang masih hidup dan terus berkembang hingga saat ini. Pembajak di teluk Aden ini berasal dari kebanyakan dari Somalia. Kapal yang dibajak pun tidak dibedakan, kapal dagang apa saja yang masuk ke wilayah perairan Somalia rawan dibajak. Bajak laut ini meresahkan dan mengganggu keamanan internasional, terutama jalur perdagangan dari Asia yang ingin melewati terusan Suez ke Eropa dan Amerika. Hal ini mengganggu perdagangan internasional dan menjadikan pembajakan sebagai masalah internasional. Beberapa pembajakan laut, dicurigai sebagai sumber dana gerakan perlawanan di Somalia. Hal ini mempengaruhi AMISOM, karena dengan adanya sumber dana bagi para gerakan perlawanan, menyebabkan perdamaian di Somalia menjadi semakin susah untuk dicapai.

⁴⁸ *Loc. Cit.*, *Somalia's al-Shabab join al-Qaeda*

⁴⁹ Al-Shabaab, diakses dari http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html pada 24 April 2012, 14.33 WIB

Pada tahun 2009, dilaporkan ada 220 serangan bajak laut, dan 52 pembajakan yang berhasil.⁵⁰ Pada tahun 2010, jumlah pembajakan yang berhasil mencapai 219. Pada tahun 2011, jumlah tebusan yang dibayarkan mencapai US\$ 135.000.000. Jumlah bajak laut yang beroperasi di pantai Somalia diperkirakan antara 1.500 dan 3.000 orang. Hingga saat ini juga, daerah jangkauan operasi pembajak Somalia sudah tidak lagi hanya di teluk Aden, tapi sampai ke Samudra Hindia. Hal ini bahkan menimbulkan pemikiran bahwa bajak laut Somalia ini bisa menjadi raja di Samudra Hindia. Jenis pembajakan yang dilakukan bajak laut Somalia ini juga berbeda dengan cara pembajak tradisional yang mengambil barang dan kapal yang dibajak, yaitu meminta tebusan kepada pemilik kapal, bisnis, atau keluarga dari awak kapal yang dibajak. Bajak laut biasanya bergerak dengan menggunakan kapal kecil yang berisi 4-6 orang, dan bersenjatakan SALW (*Small Arms Light Weapons*) seperti AK-47 sampai RPG. Namun ada juga yang menggunakan kapal yang sudah dibajak sebagai basis operasi di laut, sehingga durasi dan jangkauan bajak laut bisa lebih luas.⁵¹

Bajak Laut Somalia adalah masalah yang sangat besar untuk ekonomi dunia. 90% barang yang diperdagangkan di dunia, transportasinya lewat laut, dan 40% dari pergerakan barang, melewati Samudra Hindia, Teluk Aden, dan Laut Arab. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dengan maraknya pembajakan, apalagi sejak pembajak mulai menggunakan kapal yang sudah dibajak sebagai kapal induk untuk pembajakan, membuat nyaris tidak ada rute yang bisa digunakan oleh kapal untuk memutar menghindari bajak laut.⁵²

Bajak laut somalia juga menyimpan potensi untuk menciptakan destabilisasi di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kriminalitas dan kekerasan sebagai konsekuensi diaspora somalia dan jumlah uang yang signifikan yang mengalir ke diaspora. Uang hasil pembajakan juga dicurigai menjadi

⁵⁰ UNOSAT, *Spatial Analysis of Somali Pirate Attacks in 2009*, diakses dari http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SO/CE20100714SOM/UNOSAT_SOM_CE2010-PiracyAnalysis_Report_HR_v1.pdf pada 18 April 2012, 15.02 WIB

⁵¹ House of Commons Foreign Affairs Committee, *Piracy off the coast of Somalia, Tenth Report of Session 2010-12*, hal.12-15, diakses dari <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmfaff/1318/1318.pdf> pada 18 April 2012, 15.36 WIB

⁵² *Ibid.*, hal.15

sumber dana kegiatan terorisme. Ada beberapa pengamat menyatakan bahwa uang hasil tebusan mengalir ke kelompok Al-Shabaab yang berhubungan dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Al-Shabaab, seperti yang kita tahu adalah kelompok yang melawan TFG.⁵³ Hal ini tentu akan menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting mengenai pentingnya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Somalia. Hal ini dikarenakan nasionalisme bajak laut tersebut adalah Somalia dan kebanyakan bermarkas di darat Somalia di daerah utara dan di pegunungan. Dengan stabilitas yang ada, salah satunya dengan adanya institusi negara seperti polisi dan tentara yang kuat, pembajakan laut dapat dikurangi dengan efektif dan efisien.

Masalah Keamanan Insani

Dalam setiap konflik, masalah terhadap keamanan insani adalah hal yang sangat mungkin terjadi dan menjadi masalah yang perlu untuk diperhatikan secara serius. Hal inilah yang membuat PBB memperbolehkan adanya intervensi kemanusiaan, padahal pada saat pembentukannya, PBB sangat menjunjung tinggi masalah kedaulatan suatu negara.

Masalah kemanusiaan yang muncul di Somalia, kebanyakan adalah pengungsi, tidak adanya/sulit mendapatkan barang kebutuhan, pelanggaran HAM yang sangat tinggi, dan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap nyawa dan hak kepemilikan. Walaupun data spesifik mengenai jumlah korban dan pelanggaran terhadap keamanan kemanusiaan sangat sulit ditemukan karena keterbatasan data, secara umum, terlihat bahwa masalah ini adalah masalah yang serius. Masalah-masalah ini yang kemudian membuat diaspora Somalia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, ketiga setelah Afghanistan dan Iraq. Dari beberapa data, masalah kelaparan di Somalia adalah salah satu yang parah. Pada akhir-akhir ini, setelah TFG mulai masuk ke Somalia dan memerangi Al-Shabaab yang menguasai sebagian daerah selatan dan tengah Somalia, kelaparan membuat 4.000.000 orang berada dalam krisis dan sekitar 750.000 orang berada dalam

⁵³*Ibid.*, hal. 16

resiko kematian untuk 4 bulan kedepan. Selain itu pengungsian oleh sekitar 2.000.000 orang dari jumlah populasi Somalia yang hanya sekitar 9.000.000 orang juga memperlihatkan bagaimana kemanan insani di Somalia ini sangat memprihatinkan.⁵⁴

Masalah keamanan insani ini yang menjadi perhatian dunia internasional pertama kali sejak Siad Barre jatuh. Hal ini dibuktikan dengan misi UNOSOM I yang lebih menitikberatkan pada bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan dibagikan karena kondisi di Somalia sudah sangat memprihatinkan. Karena pertarungan klan-klan menyebabkan ketidakamanan di Somalia sehingga distribusi barang pokok menjadi sangat susah. Belum lagi ditambah dengan masalah kekeringan yang menyebabkan produksi pangan tidak cukup. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya pemerintahan pusat yang dapat memastikan jarring pengamanan agar kelaparan tidak terjadi.

II.5. Respon Dunia internasional

Respon dunia internasional terhadap kasus Somalia ini dapat dilihat terbagi-bagi berdasarkan kasusnya. Respon terhadap pembajakan misalnya, berbeda secara kuantitas dan kualitas daripada respon terhadap ancaman terorisme. Namun secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa dunia internasional menyadari mengenai permasalahan Somalia dan berusaha untuk menciptakan sebuah solusi agar dapat tercipta Somalia yang damai dan menghilangkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas dunia internasional. Respon dunia internasional ini bisa dilihat dari beberapa tingkatan, dari tingkat organisasi global, organisasi kontinental, organisasi regional, negara, hingga tingkat NGO dan perseorangan.

Banyak sekali respon dunia internasional mengenai masalah Somalia. Namun kita akan melihat respon internasional dari sisi misi untuk rekonsiliasi Somalia. Kalau kita melihat dari misi-misi besar, respon yang pertama adalah misi UNOSOM I, UNOSOM II, dan UNITAF. Namun setelah misi dievaluasi,

⁵⁴*Ibid.*, hal.60

kita bisa melihat bahwa misi tidak berhasil menciptakan perdamaian. Terjadi kekosongan misi hingga PBB menarik anggotanya dari Somalia pada tahun 2003-an karena situasi dinilai sudah tidak aman dan kondusif untuk anggota PBB bekerja di wilayah Somalia. Dan kemudian muncul beberapa inisiatif dari organisasi regional seperti IGAD yang membentuk IGASOM. Akhirnya sesudah DK PBB menyetujui untuk mendukung TFG, DK PBB mengotorisasi AU untuk melakukan misi, yaitu AMISOM. AMISOM inilah salah satu misi yang diupayakan untuk membantu TFG menyatukan Somalia yang terpecah setelah dua dasawarsa paska jatuhnya Siad Barre. Sebelum menyatukan seluruh bagian Somalia, termasuk daerah utara di mana ada Somaliland dan Puntland, penting bagi TFG untuk menguasai pusat pemerintahan Somalia, yaitu Mogadishu. Dari Mogadishu inilah, pusat pemerintahan merajut kembali Somalia yang bersatu seperti sebelum terpecah menjadi beberapa bagian. Untuk dapat menguasai Mogadishu, TFG harus melawan dominasi Al-Shabaab yang menguasai mayoritas daerah selatan dan tengah Somalia, di mana Mogadishu berada. AMISOM berfungsi untuk membuka jalan dan menjaga Mogadishu agar TFG dapat kembali membentuk pemerintahan.

Selain AMISOM, tentu banyak respon dunia internasional lainnya, terutama berhubungan dengan masalah kemanan insani, ancaman terorisme dan masalah bajak laut. Beberapa respon yang besar adalah respon dari PBB, Amerika Serikat, EU, UK, NGO-NGO yang menaruh perhatian kepada isu kemanusiaan dll.

Secara umum, dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi adalah konflik yang rumit dengan banyaknya aktor dan kondisi konflik yang menyebar ke beberapa sisi, seperti masalah pembajakan, kelaparan, masalah terorisme dan keamanan insani. Pada pembahasan selanjutnya, akan dilihat mengenai bagaimana misi AMISOM ini dalam pelaksanaannya di Somalia dengan kondisi konflik yang demikian rumitnya.

BAB III

MISI AMISOM

Misi AMISOM adalah sebuah respon dari AU terhadap kondisi Somalia yang tidak mengalami perbaikan dan juga masalah terhadap kemanusiaan yang semakin lama semakin memprihatinkan. Teknis dan pelaksanaan misi AMISOM ini akan dibahas dalam bab ini. Keberhasilan dari sisi kinerja AMISOM juga akan dilihat sebagai salah satu penentu keberhasilan misi AMISOM.

III.1. Latar Belakang Misi AMISOM

Misi AMISOM adalah sebuah misi yang dilaksanakan oleh AU sebagai sebuah respon terhadap masalah stabilitas Somalia. Misi ini adalah misi lanjutan dari IGASOM yang memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu mendukung pembentukan pemerintahan transisi. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintahan transisi untuk membentuk pemerintahan tetap agar tercipta pemerintahan Somalia yang berdaulat dan memegang penuh kendali atas Somalia.

AMISOM ini berhubungan sangat erat dengan TFG. Untuk dapat melihat AMISOM, perlu untuk memahami TFG juga.

TFG adalah sebuah hasil usaha IGAD yang berupaya untuk membentuk Pemerintahan Somalia, yang terbentuk pada tahun 2004 dengan dipilihnya Abdullahi Yusuf Ahmed sebagai Presiden TFG dan TFIs (Transitional Federal Institutions) yang pada awal pemerintahannya, memerintah dari Nairobi, Kenya. TFG dan TFIs ini mendapatkan banyak pengakuan dari warga Somalia, dan menghasilkan perkembangan yang signifikan di bidang institusionalisasi politik, terutama pada pembentukan dan persetujuan *National Reconciliation Council*, NSPP, dan juga pembentukan Mahkamah Agung, dan dewan regional dan distrik. Namun, perkembangan lebih lanjut terbatas dengan lemahnya kapasitas institusional dan sumber daya dan pendampingan eksternal yang tidak cukup

terhadap TFIs. Situasi seperti ini yang mempengaruhi pembentukan kekuatan keamanan baru yang sesuai dengan NSPP. TFG juga tidak mungkin untuk merangkul dan mendapatkan kontrol atas semua daerah di masyarakat Somalia, walaupun sudah mendapat dukungan dari daerah tersebut. Hal ini dikarenakan badan yang memerintah di lokal dan regional yang berdasarkan pada garis klan, memiliki sistem keamanannya sendiri. Salah satu yang paling kuat adalah warlord yang menguasai Mogadishu.

Situasi di Somalia juga berubah dengan terbentuknya ICU. Hal ini membuat situasi di Somalia tidak sama dengan pada saat TFG dibentuk. Kekacauan terjadi baik dengan ICU maupun dalam TFG sendiri. Perpecahan dan intervensi dari negara luar menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan antara TFG dan ICU yang sebelumnya sepakat untuk mengadakan pembicaraan untuk perdamaian Somalia. Kedua belah pihak saling menuding bahwa ada keterlibatan aktor luar dalam menyediakan dukungan militer dan dukungan lainnya kepada salah satu sisi. TFG mengklaim bahwa ada teroris internasional dalam badan ICU yang mendapat dukungan dari beberapa negara, termasuk Eritrea. ICU di sisi lain, melihat penempatan tentara Ethiopia sebagai dukungan terhadap TFG.

Sesuai dengan resolusi DK PBB 1725 yang diadopsi pada 6 Desember 2006, embargo senjata diangkat sebagian dan memberikan kewenangan kepada AU dan negara anggota IGAD untuk menyediakan pelatihan dan misi perlindungan di Somalia. Namun, agar pelatihan dapat dimulai, pasukan yang ditugaskan untuk melatih harus diterjunkan ke wilayah Somalia, dan hal ini tidak dimungkinkan sebelum pasukan yang loyal ke TFG yang dibantu pasukan Ethiopia melancarkan serangan ke pasukan ICU pada 25 Desember 2005. ICU akhirnya berhasil diusir dari bentengnya pada 1 Januari 2006. ICU pecah dan beberapa pasukannya melepas seragam ICU untuk bergabung kembali ke klannya dan beberapa mundur ke perbatasan Kenya. Tentara ICU ini menyelenggarakan serangan gerilya terhadap pasukan Ethiopia di Somalia, hingga tentara Ethiopia mundur dari Somalia.

Tekanan dari dunia internasional terhadap tentara Ethiopia agar mundur dari Somalia, menyebabkan dunia internasional menyadari bahwa tanpa adanya

tentara yang kuat untuk menggantikan tentara Ethiopia mendukung TFG, Somalia akan jatuh ke keadaan anarki. Situasi inilah yang menyebabkan munculnya panggilan lebih agar AU dan IGAD menempatkan pasukan di Somalia. Namun karena adanya larangan bagi negara-negara garis depan untuk melakukan intervensi di Somalia dan juga karena masalah administratif, perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai rencana awal untuk menempatkan pasukan IGAD yang akan diserahkan ke AU dalam jangka waktu 6 bulan. Akhirnya diambil keputusan untuk menempatkan pasukan AU yang elemennya ada yang dari pasukan IGAD dengan nama African Union Mission in Somalia (AMISOM). Akhirnya AU dimandatkan oleh Peace and Security Council (PSC) pada pertemuan ke 69 di Addis Ababa tanggal 19 Januari 2007 untuk membentuk misi pendukung perdamaian di Somalia.⁵⁵

Misi inilah yang menjadi pembahasan dalam melihat mengenai adanya keadaan di mana organisasi regional mulai bertindak secara signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian.

III.2. Mandat Misi AMISOM

AMISOM, seperti halnya misi perdamaian lain tentu memiliki mandat sebagai dasar dari misi ini, teknis seperti apa yang ada, pasukan siapa yang dipakai, apa tujuan misi ini, semua ada dalam mandat misi tersebut. Mandat ini juga salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu misi, karena tujuan misi ada di dalam mandat tersebut.

Mandat AMISOM ini turun dari mandat PSC pada temuannya yang ke 69 tanggal 19 Januari 2007 di Addis Ababa. Mandat PSC, sesuai dengan Chapter II Article IV dokumen Status of Mission Agreement (SOMA), pada intinya adalah pembentukan AMISOM untuk memberikan dukungan kepada TFIs dalam upayanya untuk menstabilisasi situasi di Somalia dan memajukan proses dialog dan rekonsiliasi, untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan menciptakan

⁵⁵*Background and Political Development*, diakses dari http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Background.htm pada 28 Mei 2012, jam 12.36 WIB

situasi yang kondusif untuk stabilisasi, rekonstruksi dan perkembangan jangka panjang di Somalia. Tentu secara teknis dan uraian mengenai AMISOM ini akan sangat panjang, namun, pada intinya, misi ini adalah misi yang berfungsi sebagai pendukung dari TFI dan TFG untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk perkembangan proses perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia.

Mandat dan teknis misi AMISOM ini selanjutnya akan dibahas dari tiap artikel dalam SOMA yang menjadi dasar AMISOM.

Teknis dan mandat dalam suatu misi berhubungan dengan sangat dekat. Mandat akan mempengaruhi apa saja yang dilakukan oleh suatu misi, karena mandat mengatur hak dan kewajiban misi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami mengenai AMISOM, kita harus memahami mandat AMISOM yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian mengenai AMISOM, salah satunya adalah dokumen *Status of Mission Agreement* (SOMA).

III.3. Status of Mission Agreement (SOMA)⁵⁶

III.3.i. Latar Belakang SOMA

SOMA ini adalah sebuah dokumen persetujuan yang dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan misi perdamaian AMISOM. SOMA ini didahului oleh banyak keputusan dan perjanjian lain, diantaranya pertemuan IGAD dan pemerintah Somalia di Nigeria, 31 Januari 2005, Resolusi DK PBB nomer 1725, Keputusan *Peace and Security Council of AU* (PSC) tanggal 8 Januari 2007, keputusan PSC tanggal 19 Januari 2007, dan Resolusi DK PBB nomer 1744.

⁵⁶*Status of Mission Agreement between The Transitional Federal Government of the Somali Republic and The African Union on The African Union Mission in Somalia (AMISOM)*, dokumen resmi, diakses dari <http://amisom-au.org/?wpdmact=process&did=NjEuaG90bGluaw==> pada 28 Mei 2012, jam 12.38 WIB

Berhubungan dengan dokumen tersebut, kita perlu untuk mengerti tiap keputusan yang ada dan berhubungan agar pemahaman terhadap misi AMISOM ini bisa lebih lengkap.

Yang pertama adalah pertemuan IGAD dan Pemerintah Somalia di Nigeria pada tanggal 31 Januari 2005. Pertemuan ini diadakan di Abuja, Nigeria, dan digelar oleh *Fourth Ordinary Session of the Assembly of the African Union and the subsequent Decision of the 24th Meeting of the Peace and Security Council of African Union held on 7 February 2005*. Inti dari pertemuan ini adalah adanya pemberian ijin kepada IGAD untuk menempatkan misi dukungan perdamaian untuk menyediakan dukungan keamanan kepada TFG untuk memastikan relokasi TFG ke Somalia⁵⁷, menjamin keberlanjutan hasil dari proses perdamaian IGAD, dan mendampingi dalam proses pembentukan ulang perdamaian, termasuk kedalamnya adalah melatih polisi dan tentara.

Yang kedua adalah resolusi DK PBB nomer 1725 yang diadopsi pada 6 Desember 2006. Resolusi ini mengangkat embargo senjata di Somalia dan mengotorisasi AU dan negara anggota IGAD untuk membentuk misi perlindungan dan misi pelatihan di Somalia.

Yang ketiga, keputusan PSC pada tanggal 8 Januari 2007, yang memutuskan bahwa misi yang diturunkan akhirnya adalah misi dari AU dan bukan dari IGAD. Hal ini adalah keputusan yang memperbaiki keputusan sebelumnya di mana misi IGAD ini adalah misi yang akan diterjunkan untuk membantu pemerintah Somalia dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi.

Yang keempat, keputusan PSC pada tanggal 19 Januari 2007 yang mengotorisasi penerjunan AMISOM untuk jangka waktu 6 bulan untuk memberikan dukungan kepada TFIs dalam upayanya untuk stabilisasi situasi di Somalia dan memajukan proses dialog dan rekonsiliasi, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan untuk menciptakan situasi kondusif untuk stabilisasi,

⁵⁷ pada waktu itu, TFG belum bertempat di Somalia dikarenakan kondisi keamanan Somalia tidak memungkinkan TFG. TFG waktu itu ditempatkan di Nairobi, Kenya. Untuk selengkapnya bisa dilihat di <http://www.cfr.org/somalia/somalias-transitional-government/p12475>, diakses pada 24 Mei 2012, jam 15.24 WIB

rekonstruksi dan perkembangan jangka panjang di Somalia. Keputusan ini juga diperkuat oleh Resolusi DK PBB nomer 1744, yang juga menambahkan mengenai otorisasi AMISOM dan pengangkatan sebagian embargo senjata sesuai dengan paragraf 5 Resolusi PBB nomer 733 tahun 1992, untuk penerjuman AMISOM.

Persetujuan yang terakhir ini, bisa disebut sebagai mandat utama dari AMISOM, karena secara umum menunjukkan apa saja tujuan dan target yang harus dipenuhi oleh AMISOM sebagai misi dukungan perdamaian.

Mempertimbangkan ke-4 persetujuan dan dokumen-dokumen tersebut, SOMA akhirnya dibuat untuk mengatur misi AMISOM ini dengan lebih lengkap dan mendalam, baik mengenai teknis, tujuan, tambahan, dan sebagainya yang berhubungan dengan misi AMISOM. Dalam SOMA ini juga, dipaparkan mengenai semua sisi dan ketentuan dari misi AMISOM. SOMA terdiri dari 9 chapter, 28 article, dan 68 pasal.

III.3.ii. Penjelasan SOMA

Dalam Chapter I SOMA, Article I menjelaskan mengenai definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam SOMA. Definisi ini dipaparkan untuk menghindari segala macam salah paham dan memastikan kejelasan dalam setiap ketentuan yang ada dalam SOMA ini. Article II menjelaskan mengenai penerapan dari persetujuan yang berlaku waktu itu. Artikel ini menjelaskan bahwa kecuali dinyatakan sebaliknya, semua hal yang ada dalam persetujuan, baik yang ada pada sisi TFG, maupun pada AMISOM, hanya berlaku di Somalia. Article III menjelaskan mengenai penerapan konvensi AU. Article ini berhubungan dengan Article II, di mana Article III ini mendukung Article II dan penerapan konvensi AU berjalan seiring dengan penerapan persetujuan mengenai misi AMISOM ini.

Chapter II adalah bagian yang sangat penting dari persetujuan ini, yaitu uraian mengenai mandat AMISOM. Chapter II hanya berisi satu article, yaitu Article IV. Mandat AMISOM berdasarkan pasal 5, adalah memberikan dukungan kepada TFIs dalam upayannya untuk menciptakan stabilisasi situasi di Somalia

dan kemajuan dalam proses dialog dan rekonsiliasi, untuk memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk stabilisasi, rekonstruksi dan perkembangan jangka panjang di Somalia. Pasal 6 membahas mengenai jumlah kekuatan AMISOM yang akan diterjunkan. Berdasarkan pasal 6, penempatan AMISOM yang terdiri dari 9 batalyon infantri, polisi dan komponen sipil, didukung oleh elemen maritim dan udara diizinkan. Pasal 6 ini juga menjelaskan bahwa elemen misi berasal dari negara anggota AU dan berjumlah antara 8000 dan 9000 personel, termasuk sipil.

Chapter III membahas mengenai status dari AMISOM. Chapter ini terdiri dari 8 artikel, dari Article V hingga Article XII. Article V membahas mengenai *legal personality*. Pemerintah (TFG) mengakui *legal personality* dan *legal capacity* AMISOM di Republik Somalia. Article VI memaparkan mengenai ketentuan kerja personel AMISOM. Pasal 8 menyatakan bahwa personel AMISOM harus menjauhi tindakan yang tidak sesuai dengan tugas mereka atau tidak sesuai dengan persetujuan yang berlaku. Para personel AMISOM juga harus menghargai hukum dan peraturan lokal. Dalam Article V juga disebutkan bahwa AMISOM harus mentaati segala peraturan dan persetujuan internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan misi, seperti Konvensi Jenewa tahun 1949, Konvensi UNESCO tahun 1954 yang berhubungan dengan properti kebudayaan, dan Konvensi Vienna mengenai hubungan diplomatik tahun 1961. Article VII membahas mengenai identitas AU dalam misi, yaitu mengenai pemasangan identitas AMISOM di properti AMISOM seperti pusat kontrol, perkemahan atau bangunan lainnya, kendaraan, dan pesawat seperti yang telah ditentukan oleh SRCC (Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission), dan diketahui oleh TFG. Article VIII memaparkan mengenai komunikasi misi, di mana AMISOM berhak untuk menikmati fasilitas komunikasi dan dengan koordinasi dengan TFG, menggunakan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. AMISOM dengan demikian berhak untuk membangun dan mengoperasikan stasiun radio AMISOM, menggunakan media cetak, membangun dan mengoperasikan stasiun radio kirim dan terima termasuk juga sistem satelit. Article IX, menjelaskan mengenai perjalanan dan transportasi. Segala unit kerja AMISOM yang berhubungan dengan kerja AMISOM berhak

untuk menikmati kebebasan transportasi tanpa hambatan dan tidak harus mendapatkan izin jalan atau perijinan lainnya kecuali transportasi lewat udara yang harus berkoordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Somalia. Segala macam ketentuan mengenai transportasi ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah untuk menjaga keselamatan dan keamanan anggota misi. Kendaraan yang berhubungan dengan misi ini juga tidak menjadi subyek registrasi ataupun lisensi yang harus didaftarkan ke pemerintah, asalkan kendaraan tersebut diasuransikan pada pihak ketiga, dan AMISOM juga harus memberikan daftar paling kendaraan AMISOM pada pemerintah. AMISOM juga berhak untuk menggunakan fasilitas transportasi yang ada berhubungan dengan kelancaran misi di Somalia tanpa harus membayar biaya yang diperlukan. Namun berhubungan dengan biaya ini, AMISOM akan membayarnya pada harga yang paling sesuai. Article X membahas mengenai hak khusus dan kekebalan AMISOM. AMISOM dan kontraktor berhak untuk mengimpor peralatan dan barang lain yang berguna untuk misi; untuk membangun, merawat, dan mengoperasikan komisaris di kantor pusat, perkemahan, dan pos-posnya untuk memberikan keuntungan kepada anggota AMISOM, tapi tidak ke warga lokal di mana komisaris tersebut menyediakan barang-barang yang bisa dikonsumsi dan barang lainnya yang akan disebut kelak; untuk membebaskan bekas cukai dan gudang pajak, dan barang-barang lain sesuai ketentuan di persetujuan untuk dipergunakan oleh AMISOM atau dijual di komisaris; dan untuk mengekspor ulang atau membuang barang-barang yang masih bisadipakai atau dibuang ke otoritas lokal yang berkompeten di Somalia. Article XI memberikan penjelasan mengenai fasilitas untuk AMISOM dan Kontraktornya. Dalam kerjanya, AMISOM tentu perlu menggunakan jasa kontraktor untuk beberapa operasinya. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai fasilitas apa saja yang berhak dinikmati oleh AMISOM dan kontraktornya. Dalam artikel ini, TFG harus menyediakan infrastruktur seperti pusat komando, kemah, atau hal lainnya yang diperlukan agar misi dapat berjalan. Fasilitas yang ada juga tidak boleh diganggu, dan AMISOM dan tentaranya harus mendapat akses bebas terhadap fasilitas tersebut. TFG juga harus membantu AMISOM untuk mendapatkan keperluannya dengan tingkat setara seperti otoritas pemerintahan lainnya secara gratis, dan apabila tidak

dimungkinkan maka pembayaran disesuaikan dengan harga yang paling sesuai, sesuai dengan perjanjian. AMISOM juga berhak untuk menghasilkan listrik dan mengalirkan ke fasilitasnya. Article XII membahas mengenai ketentuan, pasokan dan jasa, dan pengaturan sanitasi. Dalam artikel ini, dibahas mengenai kebutuhan ketentuan, pasokan barang dan jasa, dan kebutuhan sanitasi. Pemerintah harus membantu AMISOM untuk memenuhi kebutuhan AMISOM, termasuk peralatan, barang-barang, bahan bakar, untuk operasinya, termasuk juga kebersihan demi kesehatan misi, terutama yang berhubungan dengan penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS.

Chapter IV mengatur mengenai perekrutan personil lokal. Chapter yang terdiri dari hanya 1 artikel ini, yaitu Article XIII, menyatakan bahwa AMISOM diperbolehkan untuk merekrut personil lokal untuk melaksanakan tugas AMISOM dan pemerintah, dengan memperhatikan peraturan dan hukum yang relevan, memfasilitasi dan mempercepat proses perekrutan personil tersebut.

Chapter V, yang juga terdiri dari hanya Article XIV, membahas mengenai mata uang. Pemerintah, dalam hal ini TFG, berkewajiban untuk menyediakan mata uang untuk digunakan AMISOM untuk kepentingan misinya.

Chapter VI membahas mengenai status anggota AMISOM. Article XV memaparkan mengenai hak khusus dan imunitas anggota AMISOM. Beberapa pihak seperti Head of Mission (HoM), pemimpin pasukan, pemimpin polisi, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditentukan statusnya di pembahasan ini. Yang mendapat hak khusus dan imunitas antara lain HoM, pemimpin pasukan, pemimpin polisi, petugas PBB, sukarelawan PBB, personil militer yang bukan warga lokal, dan anggota misi yang disebutkan secara spesifik berhak mendapatkan hak khusus dan kekebalan. Diatur juga mengenai pembayaran gaji dan kebebasan untuk mengimpor barang secara bebas pajak barang yang diperlukan untuk keberlangsungan misi. Mengenai kebebasan untuk masuk dan keluar Somalia juga diatur dalam Chapter ini, di mana anggota AMISOM dibebaskan dari peraturan passpor dan visa. Article XVI berisi ketentuan mengenai kedatangan, tempat tinggal dan keberangkatan personil AMISOM. Anggota AMISOM memiliki hak untuk masuk, bertempat tinggal dan pergi dari

Somalia kapanpun dibutuhkan, dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini dengan koordinasi dengan anggota AMISOM. Meskipun begitu, hak kependudukan tetap tidak termasuk ke dalam ketentuan ini. Article XVII mengatur mengenai identifikasi anggota AMISOM, di mana anggota AMISOM selama menjalankan misinya harus memiliki kartu identitas yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota AMISOM, dan harus memperlihatkan kartu identitas tersebut kepada petugas pemerintahan saat diminta. Article XVIII mengatur mengenai seragam dan persenjataan. Anggota AMISOM harus mengenakan seragam ketika bertugas, baik dari sipil maupun militer, di mana personil militer mengenakan seragam nasional masing-masing sesuai dengan ketentuan AMISOM. Personil yang memiliki tugas perlindungan diperbolehkan memiliki dan membawa senjata dan harus mengenakan seragam saat membawa senjata tersebut. Article XIX membahas mengenai ijin dan lisensi. Pemerintah menyetujui ijin atau lisensi yang dikeluarkan oleh HoM untuk operasi yang dilakukan oleh anggota AMISOM, kecuali untuk ijin mengemudi di mana ijin hanya diberikan kepada personil yang sudah mempunyai ijin mengemudi yang valid. Pemerintah juga menerima dan memvalidasi ijin yang dikeluarkan oleh negara lain menyangkut kapal dan pesawat, dan memberikan ijin di daerah misi untuk operasi pesawat dan kapal tersebut. Article XX membahas mengenai polisi militer, penangkapan dan pemindahan tahanan, dan pendampingan bantuan. Polisi militer, sesuai dengan article XVIII, diberi ijin untuk membawa senjata, dan HoM harus memastikan anggota AMISOM memiliki disiplin dan patuh pada peraturan. Polisi militer AMISOM juga mempunyai kekuatan untuk menangkap anggota militer AMISOM, dan tindakan berhubungan disiplin anggota ini dikembalikan ke kontingen negara anggota tersebut berasal. Berhubungan dengan anggota AMISOM, anggota AMISOM dapat ditahan oleh petugas pemerintah bila diminta oleh HoM atau saat anggota tersebut ditangkap pada waktu melakukan pelanggaran, untuk kemudian diserahkan ke perwakilan AMISOM terdekat. AMISOM dan pemerintah kemudian bekerjasama dalam melakukan investigasi terhadap pelanggaran tersebut. Article XXI membahas mengenai keselamatan dan keamanan. Pemerintah harus berusaha semampunya untuk memastikan keselamatan dan kebebasan anggota misi AMSOM. Dan bila misalnya ada

anggota misi yang ditangkap oleh pemerintah dalam keadaan menjalankan misi dan memiliki identifikasi, maka mereka tidak boleh diinterogasi dan harus segera dibebaskan dan dikembalikan ke AU atau otoritas yang sesuai. Mengenai hal ini, juga harus memperhatikan Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai HAM. Pemerintah juga membuat hukum nasional di mana tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan anggota AMISOM bisa dihukum. Article XXII membahas mengenai yurisdiksi di mana proses hukum terhadap anggota AMISOM yang melanggar ataupun ditangkap oleh pemerintah karena pelanggaran yang dilakukan diatur. Proses peradilan terhadap anggota AMISOM juga dibahas, serta hubungannya dengan HoM. Article XXIII membahas mengenai anggota misi yang tewas, di mana HoM berhak untuk mengurus jenazah anggota misi yang meninggal di Somalia termasuk barang pribadi sejalan dengan praktek AU mengenai masalah tersebut.

Chapter V membahas mengenai batas liabilitas AMISOM. Klaim-klaim yang disebutkan dalam Article XXIV yang tidak bisa diselesaikan oleh prosedur internal AMISOM, akan diselesaikan oleh AU dengan mempertimbangkan Article XIII dalam persetujuan ini dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, atau dalam kasus tertentu maksimal 1 tahun setelah mandat misi dihapus.

Chapter VI berisikan mengenai tatacara penyelesaian sengketa. Article XXV membahas mengenai penyelesaian sengketa, di mana kecuali seperti yang ada di pasal 56, penyelesaian sengketa harus diselesaikan dengan *Standing Claims Commission* yang dibentuk untuk tujuan tersebut yang anggotanya dan tatacaranya sesuai dengan apa yang ada dalam persetujuan. Dalam article ini juga, ditentukan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lainnya yang berhubungan dengan AMISOM.

Chapter VII membahas mengenai pengaturan tambahan. Mengenai hal ini, hanya ada satu ketentuan, yaitu HoM dan pemerintah berhak untuk memutuskan pengaturan tambahan ke persetujuan saat itu.

Chapter VIII membahas mengenai masalah perhubungan. HoM dan pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan hubungan yang dekat dan timbal balik pada tingkatan yang sesuai.

Chapter IX adalah chapter terakhir dalam perjanjian ini dan membahas mengenai ketentuan lainnya. Article XXVII menentukan bahwa ketentuan apapun yang berhubungan dengan hak, imunitas dan keistimewaan AMISOM, pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hal tersebut.

Dari Status of Mission Agreement tersebut, kita bisa melihat banyak sekali ketentuan dan syarat-syarat dalam misi AMISOM yang tentunya akan memengaruhi jalannya misi dan keberhasilan misi tersebut. Berhubung kita akan melihat keberhasilan pelaksanaan AMISOM, sangat penting untuk memahami dan menganalisa hal ini.

Dalam menganalisa mandat, kita perlu melihat beberapa faktor utama yang berhubungan dengan mandat ini, yaitu dari sisi isi mandat tersebut, seperti aktor, dan isi mandat, dan dari mandat itu sendiri, seperti apakah mandat itu cacat atau tidak.

Yang pertama kita lihat adalah dari isi mandat tersebut, yaitu aktor dalam SOMA ini. Aktor yang menjadi sentral dalam SOMA ini adalah TFG yang dalam beberapa pasal disebut sebagai pemerintah, dan AMISOM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sentral mandat ini, pelaksananya adalah dua aktor tersebut. Hubungan antara kedua aktor ini adalah saling membantu dan berusaha untuk mencapai tujuan, yaitu perdamaian.

Lalu yang kedua adalah mengenai mandat yang ada. Isi dari SOMA ini adalah mengenai perjanjian dan peraturan mengenai misi perdamaian di Somalia yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut, yaitu AMISOM dan TFG. Secara garis besar, AMISOM memiliki mandat untuk melakukan misi dukungan kepada TFG untuk membantu terciptanya perdamaian yang menyeluruh di Somalia. Mandat yang diberikan ke AMISOM pada dasarnya adalah sama dengan keputusan PSC pada 19 Januari 2007 yang diperkuat oleh Resolusi DK PBB nomor 1744 tahun 2007, yaitu untuk stabilisasi situasi di Somalia dan memajukan proses dialog dan

rekonsiliasi, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan untuk menciptakan situasi kondusif untuk stabilisasi, rekonstruksi dan perkembangan jangka panjang di Somalia. Mandat ini sebenarnya cukup jelas karena ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan mandat ini ada di SOMA.

Yang ketiga, adalah mengenai ketentuan teknis dari misi AMISOM ini. AMISOM secara umum adalah pasukan pendukung perdamaian yang terdiri dari gabungan pasukan beberapa negara anggota AU. Namun, sesuai dengan beberapa kesepakatan yang terjadi sebelumnya, pasukan AMISOM tidak boleh berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan Somalia. Hal ini diberlakukan untuk menghindari adanya kepentingan lain yang masuk dengan pasukan negara tetangga, seperti upaya aneksasi, atau pencaplokan wilayah yang mungkin dilakukan oleh pasukan negara tetangga. Hal ini berhubungan dengan invasi pasukan Ethiopia yang sempat terjadi pada saat ICU masih berkuasa di Mogadishu. Invasi tersebut oleh beberapa pemimpin klan, dilihat ditanggapi oleh Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat dalam invasi Ethiopia diduga adalah untuk mencegah tumbuhnya kekuasaan Islam yang dikhawatirkan akan membuat Somalia menjadi seperti Afghanistan dengan talibannya. Ada sentimen agama juga dari kelompok Islam radikal di Somalia karena Ethiopia adalah negara Kristen. Karena beberapa hal tersebut, maka kehadiran tentara Ethiopia atau negara tetangga lain akan memunculkan prasangka buruk pada beberapa aktor dalam permasalahan Somalia ini dan memungkinkan terganggunya proses perdamaian.

Unsur anggota AMISOM utamanya adalah 3 jenis, yaitu unsur militer, unsur polisi, dan unsur sipil. Unsur sipil ini lebih ke unsur politik untuk memberikan pendampingan ke TFG.. Unsur militer adalah unsur yang memberikan perlindungan dan dukungan keamanan untuk berlangsungnya misi seperti yang sudah dimandatkan. Unsur militer ini terdiri dari pasukan gabungan negara anggota AU. Namun demikian, hingga saat ini, negara yang mengirimkan pasukannya adalah Burundi dan Uganda. Pasukan AMISOM pada awal pembentukannya berjumlah sekitar 8000 personil. Hingga 13 September 2011, jumlah pasukan AMISOM yang bertugas adalah 9.595 pasukan, kebanyakan

berasal dari Uganda dan Burundi.⁵⁸ Namun jumlah ini tidak terpenuhi, karena pada awalnya, hanya ada 3400 pasukan AMISOM, terdiri dari 1500 pasukan Uganda yang dibayar oleh Amerika Serikat, dan 1900 pasukan Burundi ditempatkan beberapa bulan setelah penempatan pasukan Uganda, yaitu Oktober 2007. Pada perkembangannya, pasukan ini ditambah berdasarkan mandat terbaru yang merupakan mandat lama yang diperpanjang. Pada tahun 2011, mandat diperbaharui dan pasukan AMISOM yang dimandatkan, ditambah jumlah maksimalnya, hingga 12.000 pasukan berseragam dan masih memiliki kemungkinan untuk ditambah bila AMISOM sudah mencapai jumlah maksimal tentaranya. Perlengkapan dan peralatan pasukan juga diminta untuk diperkuat.

Unsur kedua adalah unsur polisi. Unsur polisi ini memiliki tugas sesuai dengan mandatnya untuk melatih, mendampingi, mengawasi dan memberikan saran kepada *Somali Police Force* (SPF) dengan tujuan untuk membentuk SPF sebagai organisasi yang efektif dan kredibel sesuai dengan standar internasional. Polisi AMISOM hingga saat ini berhasil melaksanakan kursus induksi ke petugasnya yang akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan mandatnya. Hingga 13 September 2011, AMISOM memiliki 50 petugas polisi dari Burundi, Ghana, Gambia, Kenya, Nigeria, Sierra Leone dan Uganda. Petugas polisi ini dipilih melalui mekanisme tersendiri yang dilaksanakan di negara mereka masing-masing oleh kepemimpinan polisi AMISOM senior. Sebuah tim dengan anggota 7 orang pelatih polisi sudah berada di Mogadishu untuk bekerja dengan rekan Somalia untuk membentuk panduan pelatihan untuk anggota SPF. Untuk memenuhi mandatnya, komponen polisi AMISOM bekerjasama dengan beberapa rekanan, beberapa diantaranya yaitu *United Nations Development Program* (UNDP), *United Nations Support Office for AMISOM* (UNSOA), *The Strategic Planning Management Unit* (SPMU), EU, *Somali Police Force* dan negara anggota AU.⁵⁹

⁵⁸ *Military Component*, diakses dari <http://amisom-au.org/mission-profile/military-component/> pada 28 Mei 2012, jam 12.15 WIB

⁵⁹ *AMISOM Police*, diakses dari <http://amisom-au.org/mission-profile/amisom-police/> pada 28 Mei 2012, jam 14.07 WIB

Unsur terakhir adalah unit sipil, utamanya adalah unit masalah politik. Unit ini membantu TFG dalam upayanya dalam proses politik yang inklusif, pembentukan kembali institusi negara yang berfungsi, dan implementasi visi negara yang jelas dan *roadmap* menuju transisi dalam koordinasi yang berhubungan dengan persetujuan Djibouti. Untuk mendukung usaha stabilisasi negara, unit ini mengawasi, menginterpretasi dan melaporkan mengenai perkembangan politik dan perkembangan lain di Somalia, dan memberikan saran dalam proses politik. Unit ini bertanggung jawab atas implementasi keputusan politik di Somalia yang diambil oleh PSC AU dan membantuk membentuk kapasitas pelayanan umum Somalia.⁶⁰

Secara struktur organisasi, AMISOM dikepalai oleh *Special Representative of the Chairperson of the African Union for Somalia* (SRCC) Duta Besar Boubacar Gaoussou Diarra dan deputinya adalah Hon. Wafula Wamunyinyi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, AMISOM terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur militer, unsur polisi, dan unsur sipil. Hingga tahun 2011, unsur militer dipimpin oleh Pemimpin Pasukan, Mayor Jenderal Nahan Mugisha yang dibantu oleh Deputi Pimpinan Pasukan Mayor Jenderal Cyprien Hakiza. Unsur polisi dipimpin oleh Komisioner Polisi Hudson Benu yang dibantu oleh Deputi Komisioner Polisi Oliver Somasa. Unsur sipil disupervisi oleh SRCC dan/atau Deputi SRCC yang bersama-sama mengawasi masalah politik, masalah sipil, masalah kemanusiaan dan informasi publik, diantara masalah-masalah lain. Untuk administrasi, dikepalai oleh Kepala Petugas Administrasi yang mengepalai unsur dukungan di misi, yang termasuk kedalamnya adalah administrasi, personil, keuangan dan anggaran, dan logistik dan pengadaan diantara beberapa hal lainnya.⁶¹

Untuk mempersenjatai pasukan AMISOM ini juga, DK PBB mengangkat sebagian embargo senjata atas Somalia. Hal ini menarik untuk dilihat, karena sebelum AMISOM dimandatkan, dan justru IGASOM yang direncanakan untuk

⁶⁰ *Political Affairs Unit*, diakses dari <http://amisom-au.org/mission-profile/political-affairs-unit/> pada 28 Mei 2012, jam 14.28 WIB

⁶¹ Diakses dari <http://amisom-au.org/about/frequently-asked-questions/> pada 28 Mei 2012, 15.00 WIB

diterjunkan, DK PBB tidak bisa mengangkat embargo senjata atas Somalia. Hal inilah salah satu sebab AMISOM dibentuk untuk menggantikan IGASOM. Hal ini bisa ditelusuri ke beberapa perjanjian, misalnya perjanjian Djibouti. Persenjataan akhirnya bisa masuk untuk mempersenjatai pasukan AMISOM untuk melaksanakan misinya, walaupun embargo yang diangkat hanya sebagian saja.

Untuk tiap-tiap unit, memiliki tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan yang sudah dimandatkan.

Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya, AMISOM bukan tanpa kendala. Kendala teknis dalam misi perdamaian ini cukup berat. Hal ini utamanya dikarenakan dukungan yang adadari negara anggota AU, kebanyakan adalah dukungan politik. Namun dukungan pasukan dan logistik sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari pasukan yang pada akhirnya hanya turun dalam jumlah yang sangat sedikit daripada yang dimandatkan dan dijanjikan oleh anggota negara AU. Pada awalnya, ada 8000 pasukan yang dijadwalkan untuk diturunkan dalam misi AMISOM sesuai dengan mandat yang ada. Pasukan ini terdiri dari 7.690 tentara yang dibagi dalam 9 batalion infantri dengan 850 tentara tiap batalion ditambah dengan 40 polisi militer, dan 270 orang anggota polisi sipil. Pada kenyataannya, pasukan tidak turun hingga minggu kedua bulan maret tahun 2007. Pada awalnya negara yang terlihat benar-benar berkomitmen untuk mengirim pasukannya adalah Malawi dan Uganda.⁶² Namun akhirnya Uganda dan Burundi yang benar-benar mengirimkan pasukannya untuk bergabung dalam misi AMISOM. Itupun masih belum memenuhi jumlah pasukan yang dimandatkan, yaitu hanya berjumlah kurang lebih 6000-an. Negara lain yang menjanjikan pasukannya untuk turun belum turun pada awal misi hingga tahun 2011 saat Mogadishu berhasil diamankan sepenuhnya dan Al-Shabaab berhasil diperangi hingga keluar dari Mogadishu. Hal ini tentu mempengaruhi bagaimana AMISOM dapat melaksanakan misinya dengan baik.

⁶² International Crisis Group, “*Somalia: The Tough Part Is Ahead*”, *Policy Briefing Africa Briefing No.45*, (Nairobi/Brussels, 26 January 2007), hal. 11

III.4. Kinerja AMISOM

Setelah misi diotorisasi untuk diterjunkan, hingga tahun 2011, banyak hal yang telah dilakukan oleh AMISOM dalam tatarannya sebagai sebuah misi perdamaian. Untuk melihat bagaimana kinerja AMISOM selama berlangsungnya misi, kita perlu melihat apa saja yang sudah dikerjakan dan dicapai oleh AMISOM. Dengan melihat apa saja yang sudah dikerjakan, kita dapat melihat proses dan melihat kinerja AMISOM sebagai salah satu cara untuk menganalisa keberhasilan misi ini.

Dari sisi pencapaian, tentu akan berhubungan dengan mandat AMISOM, yaitu tujuan AMISOM diterjunkan. AMISOM diterjunkan sebagai sebuah PSO (*Peace Support Operation*) dengan tujuan untuk memberikan dukungan untuk usaha TFIs menciptakan kestabilan di Somalia, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan menciptakan kondisi dan situasi yang aman untuk stabilisasi, rekonstruksi, dan pengembangan jangka panjang di Somlia. Tugas yang berhubungan dengan mandat ini adalah mendukung dialog dan rekonsiliasi di Somalia dengan bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, menyediakan sesuai dengan kebutuhan perlindungan ke TFIs dan infrastruktur kuncinya untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsinya, untuk membantu dalam implementasi rencana keamanan dan stabilisasi nasional (NSSP), terutama dalam pembentukan dan pelatihan semua tenaga keamanan inklusif Somalia yang efektif dengan memperhatikan fakta bahwa program tersebut sedang diimplementasikan oleh beberapa rekanan bilateral maupun multilateral Somalia, untuk menyediakan dalam kapabilitas dan sesuai dengan kebutuhan, dukungan teknis dan dukungan lainnya dalam proses pelucutan senjata dan stabilisasi, untuk memantau situasi keamanan dalam daerah penempatan pasukan, untuk memfasilitasi operasi kemanusiaan termasuk ke dalamnya repatriasi dan reintegrasi pengungsi dan penempatan ulang IDPs bila dibutuhkan dan sesuai dengan kapabilitas AMISOM, dan melindungi personel AMISOM sendiri, termasuk instalasi dan peralatan, termasuk hak untuk melindungi diri.

Secara umum, kinerja AMISOM relatif bagus dan sesuai dengan tugas yang ada di mandat, walaupun tidak semua berhasil terpenuhi. Dalam menilai

kinerja AMISOM, digunakan pengamatan dari pemberitaan mengenai AMISOM, apa saja yang dilakukan dan apa yang terjadi dihubungkan dengan mandat AMISOM.

III.4.i. Mendukung TFIs menciptakan kestabilan

Yang pertama adalah memberikan dukungan untuk usaha TFIs menciptakan kestabilan di Somalia. Dukungan yang dimaksud dalam mandat ini bisa dipersepsikan secara luas, namun tugas-tugas yang berhubungan dengan mandat ini ternyata sudah ditentukan sebelumnya. Tugasnya yang paling sesuai dengan mandat ini adalah memberikan perlindungan kepada ke TFIs dan infrastruktur kunci. Selain itu, membantu dalam implementasi rencana keamanan dan stabilisasi nasional (NSSP), terutama dalam pembentukan dan pelatihan semua tenaga keamanan inklusif Somalia yang efektif dan bekerjasama dengan semua pihak dalam upaya dialog dan rekonsiliasi di Somalia.

Pencapaian yang telah diraih oleh AMISOM dalam bidang ini, dapat dikatakan cukup baik. Beberapa kriteria telah berhasil dipenuhi. Yang pertama adalah keberhasilan AMISOM untuk menciptakan keamanan sehingga memungkinkan TFG untuk kembali bermarkas di Somalia, utamanya di Mogadishu, ibukota Somalia. Hal ini sangat penting karena memberikan dampak politis yang sangat besar. Pemerintah yang memerintah dari luar negeri tentu akan terlihat tidak sekuat pemerintah yang memerintah dari dalam negeri, terutama di ibukota. Dengan berhasilnya direbut Mogadishu dari tangan gerilyawan Al-Shabaab, kita bisa menyimpulkan bahwa AMISOM berhasil membantu TFG untuk bertempat di Mogadishu dan secara tidak langsung membantu menciptakan kondisi untuk upaya pencapaian stabilisasi di Somalia. Meskipun belum semua daerah Somalia berhasil diamankan dari gangguan keamanan, paling tidak, daerah yang penting untuk TFG berhasil diamankan dan bisa disebut sebagai sebuah proses yang positif.

Terlepas dari keberhasilan merebut Mogadishu, ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa AMISOM tidak berhasil menjaga keamanan TFI dan

keamanan di infrastruktur kunci. Gerilyawan Al-Shabaab yang terusir dari Mogadishu, merubah taktik dan menggunakan serangan-serangan yang sulit ditangkal oleh AMISOM. Beberapa diantaranya adalah serangan bom bunuh diri dan serangan mortar. Hingga tahun 2012 sendiri, masih banyak terjadi serangan mortar di Mogadishu, bahkan menyerang warga sipil. Beberapa serangan yang cukup terkenal dan memakan banyak korban adalah serangan mortar terhadap tenda pengungsian yang berada di dekat istana presiden Somalia. Serangan ini ditengarai adalah serangan salah sasaran karena sasaran mortar sebenarnya adalah istana presiden, namun meleset dan jatuh mengenai tenda pengungsian yang kebetulan berada di dekat istana presiden. Hal ini menimbulkan adanya beberapa keraguan mengenai klaim AMISOM yang berhasil mengamankan Mogadishu dari tangan gerilyawan Al-Shabaab.⁶³

Meskipun begitu, melihat bagaimana keadaan sebelum misi AMISOM di mana TFG masih bertempat di luar negeri hingga akhirnya TFG berhasil bertempat di Mogadishu yang berhasil direbut dari tangan Al-Shabaab, secara umum ada peningkatan. Dan meskipun dari sisi pengamanan masih banyak serangan yang mengarah ke TFG dan instalasinya, Mogadishu masih berhasil ditahan dalam kendali TFG dengan pengamanan AMISOM.

Tugas kedua yang berhubungan dengan TFG adalah membantu dalam implementasi rencana keamanan dan stabilisasi nasional (NSSP), terutama dalam pembentukan dan pelatihan semua tenaga keamanan inklusif Somalia yang efektif dan bekerjasama dengan semua pihak dalam upaya dialog dan rekonsiliasi di Somalia. Rencana keamanan dan stabilisasi nasional ini adalah sebuah rencana yang dibuat untuk menjadikan situasi Somalia menjadi stabil dan meningkatkan keamanannya. Rencana ini konkritnya adalah membentuk dan melatih tenaga keamanan dari dalam Somalia sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketergantungan terhadap AMISOM dan bila pasukan AMISOM ditarik dari Somalia karena suatu hal, maka Somalia bisa mempertahankan keamanan dan

⁶³ “Six killed when mortars aimed at Somalia palace land on refugee camp”, *The Telegraph*, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/somalia/9153166/Six-killed-when-mortars-aimed-at-Somalia-palace-land-on-refugee-camp.html> pada 4 Juni 2012, jam 15.14 WIB

stabilitas nasionalnya sendiri. Selain itu, AMISOM juga ditugaskan untuk bekerjasama dengan semua pihak yang berhubungan dengan perdamaian di Somalia, seperti TFG, klan-klan yang menempati wilayah Somalia, beberapa pemerintah lokal yang memerintah daerah di Somalia saat tidak ada pemerintahan pusat, dan beberapa kelompok Islam yang ada di Somalia, seperti Ahlussunnah waljamaah.⁶⁴

Melihat mengenai tugas AMISOM yang ini, kita akan melihat dari apa saja yang sudah dilakukan sejak ditempatkan. Intinya sebenarnya adalah pada tugas untuk membentuk dan melatih tenaga keamanan inklusif Somalia. Sejak AMISOM pertama kali diluncurkan, sudah ada satu elemen yang dibawa, yaitu elemen polisi. Elemen ini memiliki tugas untuk membentuk dan melatih polisi di Somalia. Dalam pelaksanaannya, elemen ini bekerja dengan melatih pelatih polisi terlebih dahulu. Dalam pelatihan pertama yang dilakukan oleh AMISOM tahun 2010, pelatihan ini diberikan kepada pelatih polisi dari beberapa negara di Afrika, yaitu Ghana, Uganda, Sierra Leone, dan Nigeria.⁶⁵ Program ini berhasil melatih tenaga polisi Somalia, termasuk di dalamnya polisi wanita Somalia. Hal yang sangat menggembirakan karena ada perkembangan juga di bidang kesetaraan gender yang sangat ditekan pada saat Al-Shabaab masih menguasai daerah selatan Somalia dan Mogadishu. Hingga tahun 2012, program ini masih terus berjalan dengan melatih pelatih polisi dari negara anggota AU dan melakukan pelatihan untuk pelatih dari SPF (*Somali Police Force*) agar terciptak kapasitas dalam SPF sendiri yang dapat terus melakukan pelatihan polisi walaupun pada saat misi AMISOM sudah selesai dan ditarik dari Somalia. Hal yang sama juga terjadi pada SNA (*Somali National Army*) yang notabene adalah tentara Somalia. Tentara ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum Siad Barre turun, namun pada saat perang saudara pecah, tentara ini mengalami penurunan dan akhirnya mengalami kekosongan kekuatan. Baru pada tahun 2006 sempat terjadi perjanjian antara TFG dengan ICU mengenai SNA ini, namun karena ICU waktu itu pecah

⁶⁴Abdilatif Maalim, *ASWJs Relationship With The TFG Explained*, diakses dari http://www.somaliareport.com/index.php/post/398/ASWJs_Relationship_With_The_TFG_Explained pada 4 Juni 2012, jam 22.19 WIB

⁶⁵*Training Begins for AMISOM Police Instructors*, diakses dari <http://amisom-au.org/2011/09/training-begins-for-amisom-police-instructors/> pada 5 Juni 2012, jam 15.57 WIB

akibat konflik antara ICU dan TFG serta adanya serangan dari tentara Ethiopia, perjanjian tersebut tidak berlanjut. Setelah kegagalan dengan ICU, TFG membuat perjanjian lagi dengan *warlord-warlord* yang masih memiliki kekuatan tempur berupa milisi. Perjanjian ini adalah perjanjian untuk melucuti milisi-milisi tersebut dan agar anggota milisi tersebut mendaftar untuk bergabung dengan kesatuan tentara. Hingga akhirnya pada tahun 2009, SNA dan SPF sudah dibentuk ulang, meskipun masih memiliki banyak kekurangan, namun tetap akan ditingkatkan.⁶⁶ Dengan melihat perkembangan ini, kita dapat mengatakan bahwa, ada perkembangan karena adanya misi AMISOM sejak diterjunkan pertama kali, keamanan berhasil ditingkatkan.

III.4.ii. Memfasilitasi Bantuan Kemanusiaan

Tugas kedua AMISOM yang sangat mendesak adalah membantu upaya penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah yang membutuhkannya di Somalia. Hal ini berhubungan dengan tindakan-tindakan milisi yang tidak setuju dengan adanya TFG dan AMISOM yang terus melakukan aksi kekerasan dan mengganggu keamanan sehingga bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh penduduk Somalia tidak dapat disalurkan karena alasan keamanan.

Tugas kedua ini berhubungan dengan kondisi Somalia pada waktu perang saudara sebelum TFG terbentuk. Pada dekade 90-an, sempat terjadi wabah kelaparan yang sangat parah di Somalia. Hal ini juga sempat terjadi pada tahun 2011. Hal ini bisa ditelusuri ke beberapa sebab, namun utamanya karena masalah iklim dan cuaca yang mengakibatkan gagal panen, selain juga karena adanya pemerasan dari Al-Shabaab pada wabah tahun 2011. Pada saat terjadi kelaparan ini, banyak penduduk Somalia yang menjadi korban hingga akhirnya disebut sebagai salah satu wabah kelaparan terburuk. Hal ini tentu menyedihkan, apalagi bila mengingat bahwa Al-Shabaab juga mengontrol pasokan air sungai yang digunakan untuk pertanian. Kontrol yang dilakukan adalah adanya semacam pajak yang dibebankan kepada pemakai air sebagai balasan karena telah

⁶⁶ Diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5314606.stm> pada 5 Juni 2012, jam 21.58 WIB

menggunakan air sungai. Hal ini terjadi contohnya di kota Afgooye, sebuah kota yang terletak 30 km dari Mogadishu yang merupakan kota penghasil hasil bumi. Kota ini akhirnya berhasil dibebaskan dari kendali Al-Shabaab pada 31 Mei 2012.⁶⁷ Hal ini hanya sebagian contoh kecil saja mengenai bagaimana keadaan di Somalia sehingga membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak.

AMISOM, dalam hubungannya dengan bantuan kemanusiaan ini, ditugaskan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang menyalurkan bantuan kemanusiaan agar bantuan tersebut bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Beberapa pihak yang menyalurkan bantuan kemanusiaan di Somalia antara lain adalah Palang Merah internasional (ICRC), dan WFP (*World Food Program*).⁶⁸ Bantuan yang diberikan oleh AMISOM sesuai dengan tugasnya adalah membantu upaya penyaluran bantuan. Hal yang paling menonjol yang dapat dilakukan oleh AMISOM adalah menciptakan kondisi yang aman untuk tenaga bantuan kemanusiaan tersebut untuk bekerja dan menyalurkan bantuan. Hal ini penting karena sebelumnya pembagian bantuan kemanusiaan ini dihalangi dan tidak diperbolehkan oleh Al-Shabaab di daerah yang dikuasai oleh Al-Shabaab.

Banyak kasus di mana relawan bantuan kemanusiaan ini menjadi korban kekerasan, dan bahkan beberapa tewas karena serangan.⁶⁹ Hal ini mengakibatkan banyak populasi Somalia yang tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan. Hal ini tentu juga menjadi konsen sebuah misi perdamaian, di mana faktor *human security* sangat diutamakan. Dengan adanya bantuan keamanan dan bantuan distribusi dari AMISOM, bantuan kemanusiaan bisa masuk dan menjangkau penduduk yang membutuhkan. Berita terbaru mengenai hal ini adalah mengenai pembebasan kota Afgooye, di mana dengan pembebasan kota Afgooye dan

⁶⁷ *Press Release AMISOM*, diakses dari <http://amisom-au.org/2012/05/rebuilding-lives-and-livelihoods-farm-goods-enter-mogadishu-markets-following-successful-joint-operation/> pada 5 Juni 2012, jam 16.03 WIB

⁶⁸ WFP memberikan bantuan kemanusiaan ke Somalia dalam bentuk bantuan makanan, <http://www.wfp.org/countries/somalia> diakses pada 6 Juni 2012, jam 19.24 WIB

⁶⁹ Tidak ditemukan statistik total tenaga yang terbunuh, namun berita mengenai terbunuhnya pekerja kemanusiaan terus ada hingga sekarang. Beberapa diantaranya adalah warga negara Indonesia, seperti yang diberitakan di artikel, *MSF names Somalia aid workers killed in Mogadishu*, diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16362616> pada 6 Juni 2012, jam 19.12 WIB

koridor Afgooye, bantuan kemanusiaan akhirnya bisa membagikan bantuan kemanusiaan ke penduduk di sekitar koridor Afgooye.⁷⁰

Meskipun begitu, pemberian bantuan kemanusiaan ini bukan tanpa kesulitan. Beberapa pihak terpaksa menghentikan sementara bantuan kemanusiaan karena keamanan yang tidak mendukung, salah satunya adalah ICRC. ICRC mulai memberikan bantuan kemanusiaan di Somalia sejak Oktober 2011 karena memburuknya situasi kemanusiaan karena kekeringan sejak 2010 dan konflik bersenjata. Namun, pada Januari 2012, ICRC terpaksa menghentikan bantuan kemanusiaan karena alasan keamanan pada saat bantuan yang seharusnya dapat disalurkan, tertahan oleh otoritas lokal di daerah selatan dan tengah Somalia.⁷¹ Hal serupa juga terjadi pada WFP. WFP harus menghentikan sementara pembagian bantuan kemanusiaan di kota Mataban di Somalia tengah. Hal ini dikarenakan dua staff WFP terbunuh bersama satu orang kolega mereka pada Desember 2011 di kota tersebut.⁷²

Dengan melihat beberapa kasus tersebut, AMISOM relatif kurang berhasil dalam memberikan bantuan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Hingga akhir tahun 2011, karena kurangnya tenaga tentara dan keamanan, AMISOM tidak dapat menugaskan banyak personilnya untuk pengamanan perseorangan atau instansi. Hal ini dapat dilihat dari suatu keadaan di mana AMISOM hanya dapat memberikan perlindungan kepada VIP (*Very Important Person*). Hal ini tentu menyulitkan instansi lain atau NGO yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan karena keamanan yang tidak terjamin dan situasi yang tidak aman untuk penyaluran bantuan keamanan.

Walaupun dari sisi dukungan keamanan ke pihak lain yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan relatif kurang, AMISOM dalam misinya, memberikan sedikit bantuan kemanusiaan di daerah kerjanya secara terbatas.

⁷⁰ *Loc. Cit, Press Release AMISOM*

⁷¹ ICRC memberikan bantuan dari Oktober 2011, namun menahan sementara pemberian bantuan kemanusiaan karena halangan dari otoritas lokal, seperti ditulis di web resmi ICRC di <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/somalia-news-2011-01-12.htm> diakses pada 6 juni 2012, jam 19.18 WIB

⁷² Mohammed Ibrahim, "Foreign Aid Worker Is Killed and Colleague Is Wounded in Somali Capital", *The New York Times*, diakses dari http://www.nytimes.com/2011/12/30/world/africa/aid-worker-killed-in-mogadishu-somalia.html?_r=1 pada 6 Juni 2012, jam 19.20 WIB

Dilaporkan bahwa dalam misinya, AMISOM menyediakan bantuan kemanusiaan ke masyarakat lokal, seperti bantuan kesehatan⁷³ dan juga penyediaan air.⁷⁴ AMISOM juga memberikan jasa pengawalan pada instansi yang akan memberikan bantuan kemanusiaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun hal ini tidak menghilangkan ancaman terhadap relawan bantuan kemanusiaan yang bekerja di Somalia. Ancaman terus ada, dan Somalia masih terus berbahaya hingga dicap sebagai salah satu negara yang paling berbahaya untuk tenaga kerja kemanusiaan.

III.4.iii. Mendukung proses dialog dengan semua pemangku kepentingan

Tugas AMISOM yang ketiga, berhubungan dengan proses dialog dan rekonsiliasi di Somalia yang bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Dalam sebuah konflik, apalagi konflik internal, pihak yang memiliki kepentingan tentu sangat banyak, dan kecenderungannya adalah setiap pihak ingin kepentingannya tercapai. Dalam kasus Somalia, pihak yang berkepentingan ada sangat banyak, dari TFG, milisi-milisi Islam, klan-klan yang menguasai daerah tertentu di Somalia, *warlord-warlord* yang memiliki pengaruh dan kekuatannya sendiri, pihak sipil, pebisnis, dan banyak lagi lainnya. AMISOM dalam kaitannya dengan hal ini, memiliki tugas untuk membantu memuluskan dan memfasilitasi dialog dan proses rekonsiliasi dengan semua pihak yang terlibat.

Beberapa pencapaian AMISOM dalam hal ini salah satunya adalah sukses memfasilitasi diadakannya *National Reconciliation Conference* (NRC) yang pertama sejak pertama kali misi ini dijalankan. Dalam NRC ini, banyak pihak akhirnya bisa duduk bersama untuk membicarakan mengenai rekonsiliasi nasional. Hal ini kelihatannya adalah sebuah kesuksesan, mengingat akhirnya berhasil diadakan lagi sebuah konferensi untuk upaya rekonsiliasi di Somalia, setelah sebelumnya ada sebuah konferensi pada tahun 2002 di Eldoret, Kenya.

⁷³ *Mogadishu residents appreciate AMISOM Hospital*, diakses dari <http://amisom-au.org/2011/09/mogadishu-residents-appreciate-amisom-hospital/> pada 7 Juni 2012, jam 23.35 WIB

⁷⁴ Kidist Mulugeta, *The Role of Regional and International Organizations in Resolving the Somali Conflict: The Case of IGAD*, (Addis Ababa: Friedrich Ebert-Stiftung, 2009), hal. 47

Konferensi Eldoret ini dinilai tidak berhasil karena banyak pihak yang tidak menghadiri konferensi tersebut, diantaranya beberapa *warlord* dan pemimpin faksi. Hal ini dikarenakan ada kecurigaan dan ketidaksukaan karena Ethiopia berusaha untuk mendukung salah satu faksi.⁷⁵ Ada juga sebutan bahwa tempat konferensi tersebut tidak netral.

Terlepas dari konferensi tahun 2002, NRC pada tahun 2007 ini pertama kali berhasil diadakan di Somalia. Dukungan terhadap konferensi kali ini juga sangat meningkat. Konferensi ini didatangi oleh kurang lebih 3000 orang dari seluruh kawasan Somalia dan klan-klan, termasuk juga diaspora Somalia.⁷⁶ Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Amerika mendukung terlaksananya konferensi ini.⁷⁷ Meskipun begitu, ada beberapa pihak yang menolak datang, seperti Islam moderat yang mengasingkan diri ke Eritrea, dan juga tetua klan Hawiye. Mereka masih memboikot konferensi tersebut dikarenakan menurut mereka tempat konferensi tidak netral.⁷⁸

Meskipun begitu, karena dilihat ada kemajuan di mana konferensi ini berhasil dilakukan untuk pertama kali, kita bisa mengatakan bahwa dalam bidang ini, AMISOM relatif berhasil.

Dalam satu kesempatan lain, AMISOM juga berhasil mempromosikan dialog untuk mencapai perdamaian. Pada tahun 2008, terjadi sebuah pertemuan yang merupakan tonggak sejarah untuk mencapai perdamaian di Somalia. Maret 2008, di bangunan milik AMISOM yang terletak di markas di bandar udara Mogadishu, terjadi pertemuan antara Perdana Menteri yang baru terpilih pada saat itu, Hassan Adde, dengan pemimpin oposisi dan tetua klan Hawiye. Pertemuan ini dipercaya sebagai sebuah awal dari babak baru proses politik dan perdamaian di Somalia.

⁷⁵ “*Somali Warlord Quits Peace Talks*”, *BBC News*, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2488171.stm> pada 7 Juni 2012, jam 14.50 WIB

⁷⁶ *3000 delegates to attend Somalia’s national Reconciliation Congress*, diakses dari http://english.people.com.cn/200703/19/eng20070319_359027.html pada 7 Juni 2012, jam 15.12 WIB

⁷⁷ *U.S. Pledges Support for Somalia Reconciliation Conference*, diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/22/content_5878995.htm pada 7 Juni 2012, jam 15.12 WIB

⁷⁸ “*Somalia Peace Conference Postponed*”, *BBC News*, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6899684.stm> pada 7 Juni 2012, jam 15.13 WIB

III.4.iv. Mempertahankan daerah operasi dan mengamankan jalur masuk

Capain AMISOM selanjutnya yang merupakan salah satu titik penting dalam upaya pencapaian perdamaian di Somalia adalah pengamanan Mogadishu. Mogadishu adalah daerah penting karena merupakan ibukota Somalia dan tempat banyak populasi Somalia tinggal. Mogadishu juga merupakan tempat penting, karena sebelumnya disinilah Al-Shabaab bermarkas. Al-Shabaab adalah salah satu milisi Islam garis keras yang menginginkan diterapkannya hukum syariah yang keras di Somalia. Bila hal ini terjadi, kemungkinan Somalia akan jatuh seperti Afghanistan di bawah kuasa Taliban. Keadaan itu membuat munculnya ketakutan internasional, utamanya Amerika Serikat. Hal ini berhubungan dengan agenda *war on terrorism* yang dimulai Amerika Serikat paska serangan 9/11. Hubungannya adalah, bila Al-Shabaab yang sudah menyatakan hubungannya dengan jaringan Al-Qaeda berhasil menguasai Somalia, maka kemungkinan besar, Somalia akan menjadi basis terorisme di Afrika dan akan mengganggu keamanan regional dan internasional. Bila Somalia jatuh juga ke tangan Al-Shabaab, hal ini akan menjadi masalah karena terorisme akan semakin tumbuh berkembang dengan pesat di Afrika dan Timur Tengah.

Mogadishu juga penting karena merupakan gerbang dari dunia internasional untuk masuk ke Somalia, utamanya Somalia bagian selatan. Somalia bagian selatan dan tengah adalah daerah yang terkena efek konflik dengan sangat parah, berbeda dengan daerah utara yang cenderung lebih stabil daripada daerah selatan. Hal ini dikarenakan di daerah utara, terdapat satu daerah lepasan yaitu Somaliland dan satu daerah semi otonomi Puntland. Kedua daerah ini cenderung aman karena memiliki sistem pengamanan dan pemerintah lokal yang menguasai daerah tersebut. Mogadishu, di sisi lain adalah kota yang kacau karena dikuasai oleh gerilyawan dan berada di dekat daerah selatan yang merupakan basis gerilyawan AL-Shabaab. Lokasi ini menyebabkan Mogadishu penting untuk dikuasai karena letaknya yang dekat dengan daerah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Semakin dekat gerbang masuk ke Somalia dan basis markas agensi bantuan kemanusiaan dengan daerah yang membutuhkan

bantuan kemanusiaan akan membuat distribusi bantuan kemanusiaan ini menjadi jauh lebih mudah . Oleh karena itu, penting bagi AMISOM untuk mengamankan Mogadishu, termasuk pelabuhan dan bandar udaranya agar akses ke Somalia menjadi terbuka dan bantuan dapat masuk agar situasi kemanusiaan di Somalia menjadi lebih baik dan perdamaian dapat lebih cepat dicapai. Beberapa hal tersebut menunjukkan pentingnya Mogadishu sebagai sebuah titik daerah untuk diamankan dari tangan gerilyawan Al-Shabaab yang cenderung membuat situasi tidak aman.

AMISOM, sejak 2007 berusaha untuk membuka dan mengamankan Mogadishu. Upaya ini adalah salah satu upaya yang sangat penting dan sangat berbahaya. Berbahaya karena gerilyawan Al-Shabaab sudah menguasai daerah tersebut dengan sangat baik. Pada tahun 90-an saja Amerika Serikat harus mundur dari Mogadishu dan satu helikopternya jatuh di tengah kota karena serangan gerilyawan yang menguasai daerah tersebut. Namun, setelah perjuangan yang panjang, akhirnya AMISOM berhasil mengamankan Mogadishu sejauh parameter kotanya sepenuhnya pada Agustus 2011, meskipun Al-Shabaab mengatakan hal tersebut sebagai perubahan taktik.⁷⁹ Paska keluarnya Al-Shabaab dari Mogadishu, keamanan berangsur-angsur pulih dan infrastruktur sudah mulai dibangun kembali, meskipun masih banyak serangan dari gerilyawan Al-Shabaab seperti bom bunuh diri dan bom truk yang menghantam Mogadishu.

Dari uraian mengenai kinerja AMISOM, kita melihat adanya pencapaian yang berhasil dicapai oleh AMISOM, diantaranya pengamanan Mogadishu, TFG yang berhasil bermarkas di Mogadishu dengan perlindungan AMISOM, terbentuknya kembali SNA dan terbentuk dan dilatihnya personel SPF, menahan garis pertahanan sehingga daerah yang berhasil dikuasai tidak direbut kembali oleh milisi, membantu penyaluran bahan bantuan kemanusiaan di daerah kerja AMISOM, memberikan pengawalan kepada relawan kerja kemanusiaan yang meminta, mendukung terciptanya proses dialog dan rekonsiliasi menuju perdamaian di Somalia, dan perlindungan terhadap TFIs dan infrastruktur kunci.

⁷⁹ “*Somalia’s al-Shabaab Rebels Leave Mogadishu*”, *BBC News*, diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14430283> pada 7 Juni 2012, jam 23.17 WIB

Secara garis besar, tugas yang dimandatkan kepada AMISOM bisa dibilang relatif berhasil dilaksanakan dengan beberapa catatan. Meskipun begitu, apakah kinerja AMISOM yang relatif bagus ini menimbulkan perdamaian di Somalia? Hal ini akan kita lihat di bab ke-4, termasuk analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdamaian di Somalia yang berhubungan dengan misi AMISOM ini, untuk dapat melihat bagaimana peran AU sebagai organisasi regional dalam melakukan misi perdamaian di salah satu daerah tersulit untuk misi perdamaian.

BAB IV

KEBERHASILAN AMISOM

Misi AMISOM tentu adalah misi yang berusaha untuk membantu terciptanya perdamaian di Somalia. Bicara mengenai perdamaian, tentu banyak faktor yang berhubungan dengan perdamaian ini. Faktor-faktor yang berhubungan dengan misi AMISOM akan kita lihat dan kita analisa mengenai hubungannya dengan misi perdamaian Somalia. Oleh karena itu, analisa mengenai proses dan faktor yang berhubungan dengan perdamaian di Somalia dari sisi misi AMISOM akan kita lakukan untuk melihat bagaimana misi perdamaian oleh AMISOM. Keberhasilan misi AMISOM juga akan kita lihat agar kita mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional.

IV.1. Keberhasilan misi perdamaian AMISOM

IV.1.i. Kriteria keberhasilan misi perdamaian

Sesuai dengan yang disebutkan di latar belakang, dalam melihat keberhasilan misi perdamaian, diperlukan sebuah standar pengukuran keberhasilan. Standar mengenai keberhasilan misi ada beberapa. Ada yang hanya melihat keberhasilan misi dari terpenuhinya mandat misi tersebut. Contohnya adalah adanya beberapa pengamat yang menyebut bahwa UNITAF berhasil dalam misinya, karena mandatnya berhasil dipenuhi. Namun, perdamaian tetap belum tercapai. Ada beberapa analisa mengenai hal tersebut, diantaranya karena ketidaksesuaian mandat dengan kondisi konflik. Oleh karena itu, dikembangkan standar untuk menilai keberhasilan misi perdamaian secara lebih luas. Keberhasilan misi perdamaian tidak hanya dilihat berdasarkan mandat, di mana kadang-kadang mandat tersebut tidak sesuai dengan konflik yang ada karena konflik sudah berubah atau memang tidak sesuai dari awal. Keberhasilan misi

perdamaian dilihat dari tujuan awal misi perdamaian, yaitu terciptanya perdamaian.

Pushkina mengembangkan kriteria-kriteria yang menurutnya cocok digunakan untuk melihat keberhasilan misi perdamaian berdasarkan penelitiannya mengenai misi perdamaian PBB. Kriteria ini yang akan digunakan untuk melihat mengenai keberhasilan misi AMISOM selain dilihat dari kinerja AMISOM yang sudah dibahas sebelumnya di BAB III..

Pada dasarnya yang dipaparkan oleh Pushkina adalah kriteria untuk misi-misi perdamaian yang berjalan langsung di bawah PBB. Namun kita akan menggunakan kriteria Pushkina karena beberapa hal yang ada pada misi AMISOM, relatif sama dengan yang ada pada misi PBB dalam uraian Pushkina. Yang pertama, adalah tujuan dari misi perdamaian. Tujuan misi perdamaian antara misi perdamaian di bawah PBB dengan misi perdamaian yang dilakukan oleh instansi non-PBB pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan perdamaian. Proses yang digunakan pun juga sama, dengan melihat kepentingan *human security*, proses pertama dilakukan adalah menghentikan kekerasan. Proses selanjutnya adalah menciptakan solusi untuk konflik yang terjadi, sehingga konflik bisa diselesaikan dan perdamaian bisa tercapai. Proses yang paling penting sesudah itu adalah pembentukan situasi dan kondisi agar konflik tidak terjadi lagi, dan perdamaian yang sudah terjadi bisa bertahan. Secara umum, semua misi perdamaian berjalan seperti ini, kecuali yang memiliki mandat-mandat khusus, meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian.

Yang kedua, ada kecenderungan mengenai pergeseran pelaksanaan misi perdamaian paska Perang Dingin dari organisasi global ke organisasi regional. Bila pada masa sebelumnya misi perdamaian kebanyakan dilakukan oleh PBB, pada akhir-akhir ini, misi perdamaian mulai banyak yang dilimpahkan ke organisasi regional. Hal ini kelak akan terlihat dari bagaimana AMISOM ini bekerja. Organisasi regional ini dalam melaksanakan misi perdamaian mengacu kepada aturan-aturan misi perdamaian yang dipakai oleh PBB. Ketentuan-ketentuannya juga kurang lebih sama seperti yang ada pada tulisan Boutros-

Boutros Ghali, *Agenda for Peace*. Selain itu, sebenarnya ketentuan pelaksanaan misi perdamaian oleh organisasi regional sudah ada dalam *UN Charter*, meskipun hanya secara umum. Oleh karena itu, secara umum, misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional masih mengikuti prinsip-prinsip misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB.

Melihat bagaimana organisasi regional dalam melakukan misi perdamaian yang relatif sejalan dengan misi perdamaian PBB, kita bisa mengatakan bahwa kriteria Pushkina bisa digunakan untuk misi perdamaian non-PBB. Karena beberapa hal tersebut, kita akan menggunakan kriteria Pushkina untuk melihat apakah misi AMISOM ini relatif berhasil atau gagal.

Menurut Pushkina, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melihat misi perdamaian. Namun, dalam melihat misi AMISOM, kriteria dari Pushkina perlu untuk disesuaikan dengan kondisi konflik di Somalia. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya hakikat setiap misi perdamaian itu harus sesuai dengan konflik yang ada. Oleh karena itu, kriteria yang diterangkan Pushkina akan diterjemahkan sesuai dengan kondisi konflik di Somalia.

IV.1.ii. Analisa misi AMISOM

AMISOM, dalam kriteria yang ditulis oleh Pushkina memenuhi beberapa kriteria. Dalam menentukan keberhasilan ini, data yang digunakan adalah data yang dilihat dari artikel berita atau perkembangan secara umum. Secara umum, data mengenai Somalia sangatlah sedikit karena tidak adanya pemerintah pusat yang melakukan sensus dan pengumpulan data, dan karena keadaan Somalia yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengumpulan data secara mendetail. Hal ini juga yang menyebabkan dalam beberapa perhitungan dan index, Somalia dilewati/dikosongkan.⁸⁰ Meskipun begitu, untuk mendapatkan gambaran untuk melakukan pengukuran keberhasilan misi AMISOM, data yang berasal dari artikel-artikel berita dan beberapa laporan yang tidak terlalu lengkap

⁸⁰ Diakses dari http://www.somaliareport.com/index.php/post/2178/Somalia_Number_One_Again pada 5 Juli 2012, jam 03.30 WIB

dikumpulkan. Untuk beberapa bagian yang tidak dapat ditemukan data, gambaran keadaan didapat dari artikel-artikel berita yang memberitakan mengenai keadaan Somalia dan pencapaian misi AMISOM.

KRITERIA PERTAMA

Kriteria pertama adalah pembatasan konflik yang keras di negara tempat konflik terjadi. Hal ini menurut Bratt adalah tujuan utama *peacekeeping*. Kriteria ini berlaku dengan menganalisa apakah sebuah misi sukses dalam menahan kekerasan skala besar, mempertahankan persetujuan gencatan senjata, mengurangi kematian yang berhubungan dengan konflik, dan mensupervisi demobilisasi, dan juga dengan melihat proses pelucutan senjata. Secara garis besar, kriteria ini berhubungan dengan fungsi misi perdamaian paska Perang Dingin yang banyak menitikberatkan pada keamanan insani.

Dalam kriteria ini, kita melihat AMISOM dari rekam jejaknya sejak pertama diterjunkan di Somalia. Pada dasarnya, di Somalia tidak ada genosida, dan kejahatan kemanusiaan yang sangat keras lainnya. Konflik di Somalia adalah konflik politik. Siapa menguasai apa. Dalam beberapa berita, disebutkan bahwa meskipun Al-Shabaab menguasai suatu wilayah, selama penduduk mengikuti aturan yang dibuat oleh Al-Shabaab, mereka tidak akan disakiti.

Sejak AMISOM masuk, konflik yang terjadi cenderung hanya bergeser. Sebelum AMISOM masuk, pasukan negara tetangga yaitu Ethiopia yang tidak suka dengan keberadaan ICU menyerang masuk ke Somalia dan akhirnya membuat konflik yang terjadi cenderung memanas. Peperangan terjadi di Mogadishu dan akhirnya ICU yang sebelumnya menguasai Mogadishu terpecah. Paska pecahnya ICU, sayap milisi ICU yaitu Al-Shabaab muncul ke permukaan dan mulai melancarkan serangan-serangan yang diarahkan ke pihak asing yang berada di wilayah Somalia.

Dari sini, kita melihat kondisi sebelum AMISOM masuk. Tepat sebelum AMISOM masuk, kekerasan terjadi dengan adanya invasi tentara Ethiopia yang masuk ke Somalia. Pada saat itu, kondisi keamanan sudah sangat rawan, dengan

peperangan antara tentara Ethiopia dengan milisi ICU. Paska pecahnya ICU juga, kekerasan masih terjadi karena Al-Shabaab melakukan serangan pada tentara Ethiopia. Hingga akhirnya AMISOM masuk, AMISOM masuk menggantikan tentara Ethiopia, agar tentara Ethiopia mundur dan TFG bisa masuk ke Mogadishu.

Sebelum AMISOM masuk, situasi kemanan di Somalia relatif kacau dengan banyaknya peperangan antar pihak yang bertikai. Puncaknya terjadi ketika ICU akhirnya pecah setelah diserang oleh tentara Ethiopia dan mengakibatkan naiknya gerakan Al-Shabaab yang menjadi salah satu kelompok perlawanan yang menguasai mayoritas daerah Somalia bagian selatan.

Setelah AMISOM masuk, kekerasan relatif tetap ada. Hal ini dikarenakan setelah pasukan negara lain mundur paska pecahnya ICU, aktor yang bermain di Somalia berubah menjadi antara gerilyawan Al-Shabaab dengan TFG dan tentara AMISOM yang mendukung TFG.. Paska AMISOM masuk, serangan-serangan tetap terjadi, dan Al-Shabaab menguasai banyak daerah di Somalia selatan. Hal ini ditunjukkan dengan susahnya AMISOM untuk mengamankan Mogadishu dan daerah tempat TFG bermarkas serta daerah yang dikuasai oleh Al-Shabaab. Bahkan, membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun sampai akhirnya Mogadishu berhasil diamankan dari penguasaan Al-Shabaab.

Kekerasan juga masih terjadi di kota-kota dan daerah kekuasaan Al-Shabaab yang lain. Banyak relawan, baik dari misi kemanusiaan maupun dari instansi lain yang berhubungan dengan proses perdamaian Somalia, yang mengalami kekerasan. Mereka banyak yang diculik dan beberapa dibunuh sehingga menjadikan Somalia menjadi salah satu negara paling berbahaya untuk relawan misi kemanusiaan. Kekerasan juga terjadi pada jurnalis yang menyebabkan Somalia menjadi negara paling berbahaya kedua di dunia untuk jurnalis.⁸¹

Jumlah kematian di Somalia masih tinggi, tercatat pada tahun 2011, jumlah kematian masih tinggi, di bulan Maret sejumlah 529, bulan April sejumlah

⁸¹ Diakses dari <http://www.cpj.org/reports/2011/06/2011-impunity-index-getting-away-murder.php#index> pada 5 Juli 2012, jam 03.40 WIB

178, bulan Juni sejumlah 41, bulan Juli sejumlah 99, bulan Agustus sejumlah 208, bulan Oktober sejumlah 308, dan bulan November sejumlah 239.⁸² Data mengenai kematian akibat konflik ini sangat sedikit dan banyak terdapat kekurangan sehingga tidak memungkinkan untuk melihat secara detail mengenai korban kekerasan. Namun dari artikel-artikel berita

Walaupun secara umum kekerasan masih terjadi, namun setelah misi AMISOM masuk mendampingi TFG, keamanan relatif menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan geliat kehidupan kota Mogadishu yang membaik. Bantuan kemanusiaan pun sudah mulai bisa masuk, jauh lebih baik daripada sebelum masa AMISOM di mana ICU berkuasa dan bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk ke Somalia dan mengakibatkan kehidupan di Somalia menjadi sulit. Dengan demikian, kriteria pertama relatif bisa disebut terpenuhi, karena bila kekerasan masih terus terjadi, maka keamanan juga tentu tidak memungkinkan untuk Somalia berkembang. Perkembangan ini tercermin pada Mogadishu. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan, kekerasan relatif bisa ditekan pada beberapa bagian Somalia.

KRITERIA KEDUA

Kriteria kedua adalah pengurangan penderitaan manusia. Hal ini menurut Bratt juga adalah hal yang menjadi tujuan utama misi perdamaian. Kriteria ini dioperasionalisasi dengan memperkirakan batas dalam pengurangan pelanggaran hak asasi manusia dan keberhasilan misi tersebut dalam memulangkan kembali pengungsi. Secara garis besar, kriteria ini ditandai dengan perkiraan pengurangan pelanggaran hak asasi manusia dan repatriasi pengungsi.

Misi AMISOM dalam kriteria kedua, relatif belum berhasil. Hal ini dikarenakan ada satu penanda yang relatif belum berhasil, yaitu pemulangan kembali pengungsi. Pengungsi dari Somalia, cenderung berdiaspora keluar Somalia. Diaspora-diaspora ini banyak tersebar di banyak negara, namun yang signifikan adalah di Amerika dan Inggris, selain di negara tetangga seperti Kenya,

⁸² Data dikumpulkan dari www.Somaliaerport.com. Data yang ada adalah data tiap bulan, namun banyak terdapat kekosongan dan pendataan baru dimulai pada tahun 2011. Data dikumpulkan pada 4 Juli 2012, jam 13.00 WIB

Djibouti, dan Ethiopia. Pengungsi dalam negeri sebenarnya banyak, mereka keluar dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Mogadishu ke daerah yang relatif lebih tenang.

Misi AMISOM sebenarnya memiliki tugas untuk membantu fasilitasi repatriasi dan reintegrasi pengungsi dan penempatan ulang IDPs bila dibutuhkan dan sesuai dengan kapabilitas AMISOM. Namun, hingga kini, AMISOM masih lebih fokus pada menciptakan kondisi yang aman di Somalia agar proses perdamaian bisa terlaksana dengan lebih baik.

Dalam pengurangan pelanggaran hak asasi manusia, selama misi AMISOM berjalan, relatif berkurang. Hal ini dikarenakan AMISOM bersama dengan tentara TFG sudah mulai membebaskan daerah-daerah yang dikuasai oleh Al-Shabaab. Pembebasan ini diikuti dengan mundurnya Al-Shabaab dari daerah tersebut yang membuat kehidupan masyarakat di daerah tersebut relatif menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah pada pembebasan kota Afgooye. Sebelum dibebaskan, kota yang berada di luar Mogadishu ini dikuasai oleh Al-Shabaab, dan penduduknya yang mau menggunakan sumber daya air sungai yang melewati kota tersebut untuk bertani, dikenakan pajak yang tinggi dari hasil tani mereka. Hal ini membuat perekonomian mereka mengalami kesulitan dan hak akses mereka ke sumber daya alam yang vital dibatasi. Setelah kota Afgooye berhasil direbut dari kendali Al-Shabaab, penduduk kota tersebut relatif mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pajak yang dikenakan oleh Al-Shabaab dihapus dan akses masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan dan akses terhadap sumber daya alam menjadi lebih baik.

AMISOM dalam mengurangi pelanggaran HAM melakukannya dengan membebaskan daerah dari kendali Al-Shabaab. Hal ini bertujuan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan membantu meringankan penderitaan penduduk karena larangan Al-Shabaab soal masuknya bantuan kemanusiaan dari pihak luar, dan agar hukum dan tata tertib masuk ke daerah tersebut.

Meskipun pelanggaran HAM relatif berkurang dengan makin banyaknya pembebasan daerah di Somalia, namun karena dalam masalah repatriasi

pengungsi AMISOM belum terlalu berhasil, maka kriteria kedua ini, belum bisa dinyatakan berhasil sepenuhnya.

KRITERIA KETIGA

Kriteria ketiga adalah pencegahan penyebaran konflik diluar negara yang mengalami konflik untuk menjaga keamanan regional. Hal ini sangat dimungkinkan dengan adanya diaspora yang terjadi karena konflik yang menyebar ke negara lain menyebabkan terjadinya persaingan antara penduduk negara tersebut dengan diaspora negara konflik sehingga kemungkinan menimbulkan konflik baru. Untuk melihat kriteria ini, penelitian melihat mengenai sampai batas mana kedaulatan negara tetangga tersebut terjaga.

Dalam hal ini AMISOM dinilai tidak berhasil. Ketidakterhasilan AMISOM ini dapat dilihat dari penyebaran konflik keluar daerah. Selain itu, efek samping konflik juga banyak yang keluar daerah, sehingga mengakibatkan banyak terjadinya konflik dan masalah baru di luar Somalia yang mengganggu keamanan internasional.

Masalah yang pertama adalah adanya kelompok milisi yang beroperasi hingga keluar Somalia. Al-Shabaab dilaporkan beroperasi hingga ke daerah perbatasan Ethiopia dan Kenya. Bahkan untuk memprotes beroperasinya misi AMISOM, Al-Shabaab yang sudah berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda melakukan pemboman di negara Burundi dan Uganda yang merupakan negara asal pasukan AMISOM pada saat final piala dunia.

Dalam tindakannya, mereka melakukan kekerasan, antara lain penculikan dan tindakan kekerasan lain yang mengakibatkan dua negara tetangga Somalia ini terganggu dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Tentara Ethiopia contohnya, menggunakan cara memperkuat penjagaan di perbatasan, dan juga memberikan dukungan kepada beberapa *warlord* yang berada di dekat daerah Somalia agar mereka menjaga daerah tersebut dari kelompok militan yang mengganggu keamanan Ethiopia. Dalam kasus Kenya, tentara kenya memburu milisi tersebut dan memperkuat daerah di perbatasan dengan Somalia. Akhirnya dalam perkembangannya, Kenya mengirimkan tentaranya untuk bergabung dalam

misi AMISOM untuk melawan Al-Shabaab dan mengamankan wilayah Somalia agar Al-Shabaab dapat ditekan dan tidak mengacaukan keamanan dan melakukan serangan lagi.

Masalah kedua, adalah masalah bajak laut. Bajak laut di Somalia sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena bajak laut Somalia ini beroperasi dalam wilayah yang luas, bersenjata, dan terkadang bertindak sadis. Bajak laut Somalia ini juga beroperasi secara adaptif. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan taktik mereka dalam membajak. Bila sebelumnya pembajakan berlangsung secara biasa dengan menggunakan kapal kecil yang dipersenjatai, kini ditemukan pembajak yang menggunakan kapal besar yang dibajak sebelumnya sebagai sebuah markas di tengah laut. Dengan menggunakan kapal yang telah dibajak sebelumnya sebagai markas sementara, daerah operasi bajak laut menjadi lebih luas dan daya tahan mereka di lautan menjadi lebih kuat. Hal ini mengakibatkan pembajakan di laut Somalia sangat mengkhawatirkan, dikarenakan daerah tersebut adalah salah satu rute perdagangan internasional yang penting, di mana kapal-kapal dari Asia ke Eropa berlayar untuk melintasi terusan Suez dan sebaliknya.

Dua masalah yang berhubungan langsung dengan keamanan regional ini hingga saat ini masih ada dan mengkhawatirkan keamanan regional. AMISOM dalam hal ini, relatif tidak berhasil. Dalam masalah milisi bersenjata yang melakukan tindak kekerasan dan serangan di perbatasan, ada perkembangan dengan pembebasan daerah-daerah yang menjadi markas milisi dan efeknya menekan pergerakan dan sumber daya milisi tersebut untuk melakukan serangan ke negara lain. Namun, tetap saja kedaulatan negara tetangga terganggu dengan banyaknya serangan dan akibat sampingan dari hal ini. Kenya contohnya, karena serangan yang banyak terjadi di daerah utara negara ini, pariwisata negara tersebut terganggu. Belum lagi pandangan dunia internasional yang melihat bahwa Kenya tidak terlalu aman karena adanya serangan, mengakibatkan kepentingan dan kedaulatan Kenya terganggu. Dalam masalah pembajakan, hal ini terjadi juga di laut Somalia yang terkadang menyebar hingga teluk Hormuz, daerah Iran. Hal ini menyebabkan pelanggaran kedaulatan dengan masuknya ancaman terhadap perairan negara tersebut yang lautnya menjadi daerah operasi bajak laut tersebut.

KRITERIA KEEMPAT

Kriteria keempat adalah mengupayakan resolusi konflik. Untuk misi perdamaian, diperlukan penciptaan kondisi lingkungan yang mampu mencegah munculnya ketegangan lagi setelah misi perdamaian mundur dari negara tersebut. Kriteria ini akan dilihat dengan mengamati sampai batas mana lingkungan yang dikembangkan/diperbaiki oleh misi perdamaian tersebut bisa mencegah kekerasan lebih lanjut.

Dalam bahasa yang sederhana, kriteria keempat ini adalah kemampuan misi perdamaian tersebut dalam menciptakan resolusi konflik agar tercipta situasi yang kondusif agar perdamaian dapat berjalan secara terus menerus dan tidak terjadi konflik lagi.

Kriteria ini, berdasarkan rincian Pushkina, dilihat setelah misi tersebut selesai dan ditarik. Namun untuk melihat misi AMISOM ini, kita akan berusaha untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh AMISOM sampai periode yang digunakan dalam penelitian, yaitu 2011 pada saat Mogadishu berhasil direbut.

Pada dasarnya masalah di Somalia adalah konflik yang terjadi antar faksi dan kurangnya persatuan antara pihak-pihak yang berada di Somalia. Oleh karena itu, untuk membentuk sebuah kondisi yang memungkinkan perdamaian yang bertahan lama, yang perlu dilakukan adalah memastikan agar adanya persatuan dan kesamaan pandangan antar pihak yang berkonflik mengenai perdamaian. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah ada dialog antara pihak yang berkonflik di Somalia.

Hingga periode tersebut, AMISOM sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah AMISOM berhasil mempromosikan dialog untuk mencapai perdamaian. Pada tahun 2008, terjadi sebuah pertemuan yang merupakan tonggak sejarah untuk mencapai perdamaian di Somalia. Maret 2008, di bangunan milik AMISOM yang terletak di markas di bandar udara Mogadishu, terjadi pertemuan antara Perdana Menteri yang baru terpilih pada saat itu, Hassan Adde, dengan pemimpin oposisi dan tetua klan Hawiye. Pertemuan ini dipercaya sebagai sebuah awal dari babak baru proses politik dan perdamaian di Somalia.

Selain itu, dalam masa ini, AMISOM sukses memfasilitasi diadakannya *National Reconciliation Conference* (NRC) yang pertama sejak pertama kali misi ini dijalankan. Dalam NRC ini, banyak pihak akhirnya bisa duduk bersama untuk membicarakan mengenai rekonsiliasi nasional. Dukungan terhadap konferensi kali ini juga sangat meningkat. Konferensi ini didatangi oleh kurang lebih 3000 orang dari seluruh kawasan Somalia dan klan-klan, termasuk juga diaspora Somalia.⁸³ Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Amerika mendukung terlaksananya konferensi ini.⁸⁴ Meskipun begitu, ada beberapa pihak yang menolak datang, seperti Islam moderat yang mengasingkan diri ke Eritrea, dan juga tetua klan Hawiye. Mereka masih memboikot konferensi tersebut dikarenakan menurut mereka tempat konferensi tidak netral.⁸⁵ Meskipun begitu, karena dilihat ada kemajuan di mana konferensi ini berhasil dilakukan untuk pertama kali, kita bisa mengatakan bahwa dalam bidang ini, AMISOM relatif berhasil.

Dengan demikian, walaupun misi belum selesai dan proses perdamaian masih terus berjalan, dalam kriteria ini, ada perkembangan untuk menciptakan kondisi perdamaian yang berkelanjutan dan oleh karena itu, AMISOM relatif mencapai perkembangan dalam kriteria ini.

KEBERHASILAN MISI AMISOM

Dengan menggunakan kriteria Pushkina yang dimodifikasi ini, kita dapat melihat mengenai kesuksesan misi AMISOM ini. Kriteria yang relatif berhasil adalah kriteria pertama dan keempat. Kriteria kedua relatif kurang berhasil karena ada dalam masalah pemulangan pengungsi, masih relatif belum terdapat perkembangan. Kriteria ketiga, relatif gagal, karena konflik tidak berhasil ditahan

⁸³ *3000 delegates to attend Somalia's national Reconciliation Congress*, diakses dari http://english.people.com.cn/200703/19/eng20070319_359027.html pada 7 Juni 2012, jam 15.12 WIB

⁸⁴ *U.S. Pledges Support for Somalia Reconciliation Conference*, diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/22/content_5878995.htm pada 7 Juni 2012, jam 15.12 WIB

⁸⁵ *"Somalia Peace Conference Postponed"*, *BBC News*, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6899684.stm> pada 7 Juni 2012, jam 15.13 WIB

di dalam wilayah Somalia, dan konflik menyebar. Dalam kondisi ini, konflik memang sudah menyebar, tapi perkembangan adalah konflik cenderung mengglobal dengan pernyataan Al-Shabaab bahwa mereka terafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda.

Selain kriteria yang disebutkan Pushkina ini, kita juga perlu melihat keberhasilan misi AMISOM dari sisi mandatnya. Sesuai dengan yang dijelaskan di BAB III mengenai analisa mandat AMISOM dilihat dari kinerja AMISOM sesuai dengan tugasnya, kita bisa mengatakan bahwa dari sisi mandat, AMISOM relatif bisa berhasil dengan beberapa catatan. Oleh karena itu, dengan menggabungkan kedua analisa ini, keberhasilan dari sisi mandat dan keberhasilan dari kriteria yang disebutkan Pushkina, walaupun ada beberapa kendala, AMISOM relatif bisa disebut berhasil melaksanakan tugasnya hingga Agustus 2011.

IV.2. Dinamika Aspek Sosial Politik Lokal-Regional

Dalam misi AMISOM, kondisi lingkungan dan arah konflik mempengaruhi kinerja yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja AMISOM dalam melaksanakan misinya.

IV.2.i. Adanya kepentingan aktor luar

Dalam setiap misi, sangat wajar adanya kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan kondisi perdamaian di daerah tersebut. Akan tetapi, kepentingan-kepentingan pihak lain dalam misi perdamaian, bisa menjadi masalah walaupun ada keuntungan juga di sisi lain. AMISOM juga tidak terlepas dari kepentingan pihak luar. Dalam melihat kondisi konflik di Somalia, kita mendapatkan sebuah kondisi di mana ada keberadaan tentara asing dan juga jejak-jejak bantuan internasional pada beberapa faksi dalam konflik.

Keberadaan tentara asing bisa dilihat dari invasi-invasi yang dilakukan oleh tentara negara tetangga ke dalam wilayah Somalia. Tentara yang jelas-jelas tercatat pernah menginvasi Somalia hingga sampai ke Mogadishu adalah tentara Ethiopia. Hal ini terjadi pada masa ICU masih terbentuk dan AMISOM belum ada. Pada saat itu, tentara Ethiopia menyerbu masuk sampai ke Mogadishu untuk menyerang ICU yang menguasai Mogadishu pada saat itu. Padahal saat itu pembicaraan perdamaian sedang dilakukan antara TFG dengan ICU. Pada saat pembicaraan perdamaian itu juga, sebenarnya sudah ada keretakan hubungan antara ICU dengan TFG. Pembicaraan perdamaian yang berjalan tidak berlangsung baik di tengah-tengah karena ada kecurigaan di semua pihak, baik di pihak ICU maupun pihak TFG.. Hal ini terus terjadi hingga akhirnya tentara Ethiopia menyerang ICU dan ICU pecah.

Dari beberapa contoh tersebut, kita melihat adanya kepentingan aktor-aktor di regional terhadap Somalia. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi kepada misi AMISOM.

Yang pertama, kepentingan / kecurigaan akan adanya kepentingan aktor luar di Somalia mengakibatkan beberapa aktor yang ada di Somalia tidak percaya kepada TFG dan akhirnya menimbulkan hambatan terhadap proses perdamaian di Somalia. Hal ini yang menjadikan proses perdamaian menjadi sangat sulit. Dalam kongres rekonsiliasi yang dilakukan pada tahun 2002 di Eldoret, Kenya, banyak pihak yang berhubungan dengan konflik di Somalia memboikot kongres tersebut dan menolak datang sehingga kongres dilihat sebagai sebuah kegagalan. Alasan dari pihak yang tidak datang dan memboikot kongres tersebut, kebanyakan adalah karena menilai tempat dilaksanakannya kongres tersebut tidak netral. Hal ini bisa menjadi indikasi kecurigaan terhadap kepentingan aktor luar.

Kecurigaan terhadap aktor luar, utamanya terhadap negara tetangga Somalia seperti Ethiopia, juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian ketika IGAD merumuskan mengenai misi perdamaian yang akan dilakukan di Somalia. Dalam perjanjian mengenai tentara yang menjadi bagian misi perdamaian tersebut, disebut bahwa tentara yang terlibat tidak boleh berasal dari

negara tetangga Somalia. Hal ini ditujukan untuk menjaga kenetralan tentara misi perdamaian tersebut.

Kecrigaan ini menjadi satu hal yang menghambat kinerja AMISOM. Al-Shabaab, adalah salah satu kelompok penentang adanya misi AMISOM dan TFG.. Salah satu sebab Al-Shabaab terus memerangi TFG dan AMISOM, adalah karena Al-Shabaab melihat TFG dan AMISOM ini sebagai sebuah perpanjangan tangan barat, yang akan menguasai Somalia untuk kepentingan barat. Karena kecurigaan tersebut, Al-Shabaab terus melakukan perlawanan walaupun sampai harus melakukan taktik gerilya karena terdesak dari Mogadishu. Ketidaksenangan Al-Shabaab ini juga bisa ditarik dari invasi Ethiopia.

Serangan Ethiopia ke Mogadishu ini dikemudian hari diketahui ada dukungan Amerika dibelakangnya. Hal ini berhubungan dengan agenda perang melawan terorisme yang diserukan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Bush Jr.. ICU yang dapat menguasai Mogadishu dengan mengalahkan *warlord-warlord* yang menguasai Mogadishu dinilai sebagai salah satu kelompok Islam radikal dan berpotensi sebagai sumber terorisme. Oleh karena itu, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Ethiopia untuk menggulingkan ICU. Dukungan yang diberikan diantaranya dalam bentuk pelatihan dan penasihat. Meskipun Ethiopia bisa dilihat melakukan serangan disebabkan kepentingan keamanannya sendiri, ada campur tangan Amerika Serikat tidak bisa dipungkiri. Apalagi adanya keengganan tentara Ethiopia untuk mundur setelah melakukan invasi dikarenakan tentara AU belum siap mengambil alih. Setelah tentara AU siap mengambil alih, baru tentara Ethiopia mau mundur.⁸⁶ Hal ini tentu mengakibatkan kecurigaan kelompok Islam fundamental yang ada di Somalia, bahwa serangan tentara Ethiopia ini adalah serangan pesanan Amerika Serikat, dan tentara AU (misi AMISOM) yang menggantikan tentara Ethiopia ada hubungannya juga dengan Amerika Serikat. Apalagi bila memperhatikan bahwa AMISOM mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan bahkan tentara Uganda yang menjadi salah satu unsur pasukan AMISOM diketahui dibayar oleh Amerika

⁸⁶*U.S. support key to Ethiopia's invasion*, diakses dari http://usatoday.com/news/world/2007-01-07-ethiopia_x.htm pada 12 Juni 2012, jam 04.04 WIB

Serikat. Hal-hal tersebut terdengar sangat mencurigakan oleh milisi Islam fundamental.

Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah bagi proses perdamaian di Somalia karena pihak milisi yang telah mencurigai ada keterlibatan pihak barat, tentu akan sulit untuk mempercayai kenetralan proses perdamaian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pihak yang menolak untuk berdialog karena kenetralan dipertanyakan. Pihak-pihak ini yang kemudian melakukan serangan terhadap misi AMISOM dan TFG yang menghambat kinerja AMISOM dan memperlambat proses perdamaian karena tentara AMISOM dan TFG harus melawan milisi yang menguasai daerah di Somalia agar kondisi keamanan dapat meningkat dan memungkinkan terjadinya proses perdamaian.

Hal ini juga yang menjadi pertanyaan ketika kenetralan TFG dan AMISOM dipertanyakan. Apakah TFG ini benar-benar dari Somalia untuk Somalia atau merupakan bentukan pihak tertentu untuk melaksanakan kepentingan pihak tersebut di Somalia? Apakah AMISOM ini benar-benar misi yang dibuat dengan netral tanpa kepentingan pihak luar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengakibatkan proses perdamaian terhambat, karena munculnya kecurigaan-kecurigaan pihak-pihak yang bertikai sehingga proses perdamaian dan negosiasi terhambat.

Secara langsung, hal ini merupakan hambatan bagi terciptanya perdamaian di Somalia, karena bagaimanapun, kesamaan pandangan dan keinginan diperlukan agar tercipta perdamaian.

Meskipun begitu, kita dapat menarik sebuah hubungan antara adanya sentimen terhadap pihak asing dengan pelaksanaan misi AMISOM. Dengan adanya sentimen terhadap pasukan asing, pasukan asing yang masuk ke dalam konflik ini, cenderung untuk mengalami kesulitan untuk mendapatkan penerimaan dari penduduk Somalia. AMISOM yang pasukannya berasal dari penduduk Afrika, memiliki kedekatan dengan penduduk Somalia sebagai sesama penduduk Afrika. Hal inilah yang menyebabkan penerimaan warga cenderung lebih baik

daripada bila misalnya misi ini dilakukan oleh pasukan multinasional dari benua lain.

IV.2.ii.Politik lokal di Somalia

Dalam membicarakan perdamaian di Somalia, kita tidak bisa meninggalkan Somaliland dan Puntland. Hal ini dikarenakan bagaimanapun kedua lepasan ini adalah salah satu bagian dari negara Somalia.

Somaliland dan Puntland, secara umum adalah daerah yang cukup tenang bila dibandingkan dengan Somalia selatan yang dikuasai oleh Al-Shabaab dan menjadi daerah perang antara Al-Shabaab melawan TFG dan AMISOM. Somaliland dan Puntland penting dalam proses perdamaian, karena untuk menciptakan perdamaian di Somalia, rekonsiliasi adalah salah satu syaratnya. Rekonsiliasi berarti bahwa semua pihak akhirnya berdiri menghadap arah yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula, yaitu perdamaian dan persatuan.

Puntland, adalah satu daerah semi otonom yang berdiri paska Siad Barre diturunkan. Puntland secara umum masih mau diajak berdialog oleh TFG untuk proses rekonsiliasi dan perdamaian di Somalia. Namun tidak begitu dengan Somaliland. Somaliland adalah salah satu negara lepasan Somalia yang memiliki pemerintahannya sendiri. Meskipun begitu, negara ini tidak diakui oleh dunia internasional. Somaliland yang sudah memiliki pemerintahan sendiri cenderung enggan untuk berdialog dengan TFG untuk kemudian bersatu kembali ke dalam Somalia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pemerintahan lokal Somaliland tidak ingin kehilangan kekuatan dan kendali yang sudah berhasil dipegang dan juga karena tidak ingin terlibat dengan konflik yang terjadi di Somalia selatan.

Belum lagi dengan banyaknya faksi yang ada di Somalia, seperti Ahlussunnah Wal Jamaah yang lebih moderat daripada Al-Shabaab, dan *warlord-warlord* yang didukung pihak tertentu seperti Ethiopia dan semacamnya yang menguasai daerah-daerah tertentu di Somalia. Banyaknya aktor politik dalam negeri Somalia membuat proses perdamaian menjadi agak rumit karena semua

pihak memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dan akan sulit untuk menemukan suatu solusi yang bisa menjawab semua kepentingan pihak yang ada di Somalia.

AMISOM dalam hal ini, tentu mengalami sedikit kesulitan, karena salah satu tugasnya adalah mendorong terciptanya dialog yang menuju perdamaian di Somalia. Dengan adanya pihak yang tidak ingin mengalah, mengakibatkan diaog menjadi susah terjadi dan akhirnya menghambat kinerja AMISOM dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat proses rekonsiliasi nasional yang berujung pada perdamaian.

Namun, bila kita melihat dalam konteks yang lebih besar, keragaman kelompok di Somalia bisa juga menjadi sebuah keuntungan. Dengan banyaknya kelompok, mengakibatkan situasi politik menjadi beragam. Kondisi politik yang beragam ini menguntungkan di sisi AMISOM dalam mendukung TFG karena posisi politik kelompok-kelompok lain di Somalia bisa digunakan untuk keuntungan melawan kelompok yang melawan perdamaian di Somalia seperti Al-Shabaab. Contoh dari hal ini adalah gerakan Ahlussunnah Waljamaah. Gerakan Islam ini berbeda pandangan dengan Al-Shabaab, dan hal ini menyebabkan gerakan ini akhirnya bersekutu dengan TFG yang didukung AMISOM untuk memerangi Al-Shabaab. Bergabungnya Ahlussunnah Waljamaah mengakibatkan daerah tengah Somalia menjadi tertutup untuk Al-Shabaab sehingga pergerakan dan basis Al-Shabaab menjadi berkurang. Hal ini terlihat dari peta dukungan Somalia pada tahun 2012 dimana Somalia bagian tengah dan perbatasan bagian tengah dan tenggara dikuasai oleh kelompok yang mendukung TFG sehingga Al-Shabaab terjepit dan pergerakannya menjadi terbatas hanya ke selatan.

IV.2.iii. Kenetralan AMISOM

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kenetralan misi AMISOM juga dipertanyakan dan bisa menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan pada akhirnya bila misi AMISOM ini tidak netral, yang terjadi adalah sebuah intervensi oleh pihak asing yang pada akhirnya merembet kepada kecurigaan adanya upaya untuk membentuk sebuah pemerintahan yang disusupi kepentingan pihak asing.

Misi AMISOM adalah misi yang dibuat untuk mendukung TFG dalam proses perdamaian di Somalia. Bila AMISOM dicap tidak netral, maka hal ini juga akan membuat TFG dicap tidak netral dan dianggap sebagai campur tangan asing untuk melancarkan kepentingan asing di Somalia. Kalaupun tercipta perdamaian, maka perdamaian itu adalah perdamaian semu karena tidak sesuai dengan semua pikiran pihak yang bertikai. Serangan akan terus terjadi terhadap pemerintahan dan mengakibatkan perdamaian tidak tercipta secara sempurna. Gerakan *insurgent* masih ada dan kekerasan akan terus terjadi.

Hal inilah yang menjadi salah satu kendala AMISOM dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berhubungan dengan tugasnya untuk mendorong proses dialog dan proses perdamaian Somalia.

IV.2.iv. Faktor sosial masyarakat Somalia

Faktor sosial masyarakat Somalia secara umum lebih dekat ke Timur Tengah, daripada ke Afrika. Somalia adalah salah satu daerah yang mendapat pengaruh peradaban Islam dengan cukup kuat. Hal ini dikarenakan Somalia berada sangat dekat dengan pusat Islam dunia, yang berada di Timur Tengah. Kedekatan ini mengakibatkan Somalia secara umum berbeda dengan negara Afrika secara umum. Somalia kental dengan budaya arab, berbeda dengan kebanyakan negara Afrika. Hal ini membuat gerakan-gerakan Islam tumbuh pesat di Somalia.

Gerakan Islam ini, rupanya tidak diimbangi dengan persatuan klan-klan yang ada di Somalia sehingga muncul banyak sekali gerakan dan klan yang berbeda-beda. Ada kelompok Islam moderat yang berada di Somalia bagian tengah, dengan nama Ahlussunnah Wal Jamaah, ada juga Islam yang fundamental seperti Al-Shabaab. Banyaknya gerakan Islam ini tentu mengakibatkan munculnya gerakan Islam yang bervariasi. Salah satu ujung variasi tersebut adalah gerakan Islam fundamentalis. Gerakan Islam yang satu ini, menjadi masalah bagi misi perdamaian, karena dengan banyaknya gerakan-gerakan yang muncul, menjadikan aktor yang terlibat menjadi sangat banyak dan hal ini

memperumit upaya untuk perdamaian. Gerakan-gerakan yang banyak ini tentunya memiliki kepentingan tersendiri dan hal ini yang menjadikan Somalia sebagai sebuah negara tanpa pemerintahan pusat yang efektif karena semua pihak yang memiliki kepentingan tidak bisa duduk dalam satu meja dalam sebuah perundingan. Gerakan yang banyak ini juga mengakibatkan munculnya konflik antara mereka sendiri, sehingga membuat fraksi-fraksi di Somalia. Ahlussunnah Wal Jamaah misalnya, adalah sebuah gerakan Islam yang lebih dekat ke ajaran sufisme, dan cenderung lebih moderat daripada Al-Shabaab yang menerapkan hukum Syariah secara keras. Akhirnya karena pertentangan antara Al-Shabaab dengan Ahlussunnah Wal Jamaah ini, Ahlussunnah Wal Jamaah bisa didekati oleh TFG dan akhirnya menjadi sekutu TFG dalam konflik di Somalia. Beberapa kawasan Somalia bagian tengah adalah daerah kekuasaan Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan oleh karena itu, daerah tersebut menjadi aman dari pengaruh Al-Shabaab. Hal ini menyebabkan daerah Al-Shabaab semakin kecil dan sempit, sehingga pergerakan menjadi berkurang dan dapat dengan mudah dikejar oleh pasukan TFG dan AMISOM.

Selain itu, karena melihat keadaan, gerakan Islam fundamental, apalagi yang melakukan aksi kekerasan dan terorisme, kemungkinan untuk berafiliasi dengan jaringan Islam fundamental lainnya sangat besar. Hal ini terbukti pada Al-Shabaab yang akhirnya mengumumkan afiliasinya dengan jaringan Al-Qaeda. Dengan melihat kondisi seperti ini, sangat dikhawatirkan bila nantinya Somali jatuh di bawah kendali Islam fundamentalis yang menerapkan hukum Syariah secara keras. Hal ini juga yang menjadi sebab Amerika Serikat memberikan dukungan kepada AU untuk melakukan misi AMISOM, agar TFG dapat memegang kendali pemerintahan Somalia dan menjauhkan kemungkinan Somalia menjadi Afghanistan kedua.

IV.2.v. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan misi

Dalam keberhasilan misi AMISOM, kita dapat melihat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan misi AMISOM. Keberhasilan misi AMISOM

antara lain karena kapabilitas dan kapasitas misi AMISOM. Secara garis besar, kita dapat melihat bagaimana hubungan antara faktor sosial masyarakat Somalia ini dengan keberhasilan AMISOM. Yang pertama, dengan keadaan masyarakat Somalia yang beragam dan banyaknya pengaruh Islam dari Timur Tengah di daerah Somalia, mengakibatkan keadaan penduduk Somalia sebagai sebuah keuntungan bagi AMISOM. Keuntungan yang dapat diambil adalah dengan keadaan masyarakat yang banyak terdapat pengaruh agama Islam dan keadaan masyarakat yang masih rapuh akibat konflik dan kelaparan, mengakibatkan gerakan Islam radikal muncul. Hal ini berhubungan dengan kepentingan Amerika Serikat yang mempunyai agenda perang melawan terorisme global. Gerakan Islam radikal yang muncul, mengakibatkan Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan untuk memerangi terorisme, melihat Somalia sebagai daerah yang potensial untuk tumbuh menjadi sebuah daerah basis terorisme atau tempat bersembunyinya teroris-teroris. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pemerintah pusat yang berkuasa secara penuh di Somalia, sehingga kontrol terhadap daerah Somalia menjadi sangat kurang. Dengan keadaan seperti ini, maka yang perlu untuk dilakukan agar terorisme tidak berkembang, salah satunya adalah dengan mendukung terciptanya sebuah pemerintahan yang berdaulat, kuat, dan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjaga stabilitas dan keamanan di daerahnya sendiri. Upaya untuk mendukung terciptanya pemerintahan pusat di Somalia ini jauh lebih baik daripada harus menginvasi Somalia karena dengan mendukung terciptanya pemerintahan pusat ini, stabilitas dan keamanan yang tercipta dapat bertahan lebih lama. Upaya untuk mendukung terciptanya pemerintahan pusat adalah dengan mendukung TFG yang berupaya untuk membentuk pemerintahan pusat. Dukungan yang diberikan adalah dengan membantu misi AMISOM dalam beberapa hal. Bantuan yang diberikan antara lain adalah bantuan pelatihan dan juga bantuan dana yang diberikan untuk membiayai tentara Uganda. Bantuan-bantuan ini yang mengakibatkan AMISOM memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung TFG..

Bila dilihat dari sisi ini, keadaan sosial masyarakat Somalia mendukung kesuksesan misi AMISOM, karena dengan keadaan seperti itu, AMISOM mendapat dukungan yang besar untuk pelaksanaan misinya.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan misi AMISOM adalah fakta bahwa AMISOM adalah sebuah misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional Afrika. Hal ini menyebabkan adanya semacam sentimen dari penduduk Somalia yang merasakan misi AMISOM secara langsung. Berbeda dengan pada saat misi perdamaian dilakukan oleh pasukan asing. Pasukan AMISOM yang berasal dari sama-sama negara Afrika, tentu memberikan sebuah perasaan yang berbeda daripada pada saat pasukan asing yang masuk ke Somalia. Meskipun tidak ada suatu pernyataan resmi atau penelitian mengenai respon penduduk Somalia, ada perbedaan saat yang melakukan misi perdamaian adalah orang-orang yang dirasa lebih dekat, secara geografis, ataupun secara sosial. Secara geografis dan sosial, dirasa lebih dekat karena sama-sama dari Afrika, dan tentunya sesama orang Afrika, tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh masyarakat Somalia. Dengan perasaan seperti ini, pasukan AMISOM relatif dapat lebih diterima oleh penduduk Somalia daripada pasukan asing seperti pasukan UNITAF pada 1990-an.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan keberhasilan misi AMISOM adalah dari sisi tugasnya sendiri. Salah satu pengukuran keberhasilan misi AMISOM adalah keberhasilan AMISOM melaksanakan tugas yang dimandatkan. Mandat ini cukup jelas dengan tugasnya, yaitu mendukung TFIs, mendukung dialog rekonsiliasi dan mendukung terciptanya kestabilan. Pertama, tugas AMISOM adalah mendukung TFIs, dalam hal ini TFG. Kesuksesan AMISOM dalam hal ini memiliki dua dimensi. Pertama, keberhasilan ini karena adanya kejelasan posisi pemerintah. Dengan demikian, perkembangan dalam proses perdamaian menjadi terarah, karena dengan adanya pemerintahan pusat, pihak yang mengupayakan perdamaian jelas dan bisa didukung. Bila tidak ada pemerintah pusat, maka tidak ada pihak utama dalam proses perdamaian, sehingga proses perdamaian cenderung akan terhambat oleh tidak adanya pihak yang mendukung persatuan/menjadi payung bagi banyak kelompok masyarakat di Somalia. Kedua, dengan adanya TFG, AMISOM menjadi mudah dalam memberikan dukungan terhadap perdamaian. Tentara Nasional Somalia dan Polisi Somalia bisa dibangun lagi untuk membentuk keadaan yang aman untuk menuju proses stabilisasi Somalia agar perdamaian bisa

terwujud karena adanya TFG. Sebelumnya, Tentara Nasional Somalia terpecah pada saat penggulingan Siad Barre dan kembali ke klan dan suku. Namun setelah muncul TFG, kelompok-kelompok yang mendukung TFG, memberikan dukungan kekuatan tentaranya untuk kembali membentuk Tentara Nasional Somalia dibawah TFG.

Mandat yang jelas dan tepat juga menjadi sebab keberhasilan AMISOM. Mandat yang diberikan ke AMISOM adalah hasil dari pengamatan mengenai kondisi Somalia. Setelah diadakan pengamatan kondisi Somalia, baru dirumuskan mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Somalia agar pasukan yang dikirim dapat menghasilkan proses perkembangan menuju perdamaian yaitu Somalia yang bersatu.

Faktor selanjutnya yang menjadi penentu keberhasilan AMISOM adalah dari kekuatan misi dan dukungan terhadap misi itu sendiri. Misi AMISOM adalah salah satu misi yang bisa dikatakan sebagai sebuah misi yang paling susah karena tidak adanya pemerintahan pusat yang berkuasa atas Somalia. Walaupun ada TFG, namun masih ada beberapa kelompok yang tidak mengakui dan melawan TFG sehingga pemerintahan pusat tidak berjalan secara efektif. Hal ini adalah hambatan terbesar terhadap misi AMISOM karena harus melindungi TFG yang merupakan bakal pemerintahan pusat dan juga sebagai pihak yang mengupayakan terciptanya perdamaian dengan mengupayakan persatuan semua unsur masyarakat Somalia. Namun dengan dukungan yang besar terhadap AMISOM, AMISOM memiliki kekuatan untuk melaksanakan misinya, baik dari unsur tentara, polisi, maupun dari unsur sipil. Walaupun pada awalnya jumlah pasukan yang dibutuhkan mengalami hambatan, jumlah pasukan misi terus bertambah dari Uganda dan Burundi sehingga mencapai jumlah yang relatif besar untuk mendukung TFG. Dari unsur polisi, pelatih polisi berhasil dikumpulkan dari beberapa negara Afrika dan dilatih di Kenya. Dari dukungan politik, banyak negara yang memberikan dukungan terhadap AMISOM, karena AMISOM ini dilaksanakan oleh AU yang disetujui oleh negara-negara Afrika. Dengan dukungan yang relatif besar, AMISOM bisa melaksanakan tugasnya sehingga akhirnya pada tahun 2011, ibukota Somalia berhasil dikuasai oleh TFG dan AMISOM.

IV.3. AU sebagai organisasi regional yang melakukan misi perdamaian

Setelah melihat mengenai keberhasilan misi perdamaian AMISOM, kita akan mencoba melihatnya dalam gambar yang lebih besar.

Misi AMISOM adalah sebuah misi yang dilaksanakan oleh AU, sebuah organisasi kontinental seperti EU di Eropa. AU adalah persatuan negara di benua Afrika. AU ini membawahi beberapa organisasi regional Afrika, seperti IGAD dan ECOWAS. Pembentukan AU ini adalah perkembangan dari OAU untuk memperkuat fungsi institusi dan kekuatan yang lebih daripada OAU, baik dalam sisi ekonomi, keamanan, maupun sosial. Perkembangan yang signifikan adalah perkembangan dalam bidang keamanan.

Dalam AU ada sebuah dewan yang disebut PSC (*Peace and Security Council*). Dewan ini adalah sebuah dewan yang membawahi bidang perdamaian dan keamanan Afrika. PSC ini yang berperan besar dalam misi-misi perdamaian yang dilakukan oleh AU. PSC berperan sebagai sebuah dewan yang mengotorisasi dan mengurus segala macam mengenai misi perdamaian, seperti dalam dialog mengenai bagaimana misi perdamaian tersebut berbentuk, siapa yang melakukan, tentara dari negara mana saja yang diterjunkan, bagaimana pembiayaan tentara tersebut, mandat seperti apa yang diberikan kepada misi tersebut.

Paska terbentuknya AU ini, kita melihat adanya sebuah fenomena yang menarik, di mana AU menjaid sangat aktif dalam melakukan misi perdamaian, terutama di benua Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan dalam misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional (dalam hal ini, kontinental). Beberapa contoh misi yang dilakukan oleh AU adalah AMID di Darfur, Sudan, dan AMISOM di Somalia.

Sebenarnya, pelaksanaan misi perdamaian oleh organisasi regional sudah diatur dalam Piagam PBB, yang membahas mengenai misi perdamaian. Disitu disebutkan bahwa dalam misi perdamaian, pihak yang pertama melakukan misi perdamaian adalah dari pihak regional, dan bila dirasa tidak mampu, maka PBB akan menurunkan misi perdamaian untuk membantu terciptanya perdamaian.

Dari pasal tersebut saja terlihat sebenarnya aturan mengenai misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional sudah ada sejak PBB dibentuk. Namun kenyataannya hingga Perang Dingin, dan beberapa tahun setelah Perang Dingin usai, kita melihat mayoritas misi perdamaian dilakukan oleh PBB. Hal ini disebabkan oleh pada masa Perang Dingin, organisasi regional belum terbentuk, atau walaupun sudah terbentuk, belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk melakukan misi perdamaian. Pada masa ini, negara-negara masih terombang-ambing antara dua pihak superpower antara Barat dengan Uni Soviet. Keadaan dunia yang seperti ini membuat perkembangan organisasi regional menjadi tidak optimal karena selalu ada pengaruh dari pihak superpower. Proxy-war yang terjadi juga mengakibatkan dalam satu kawasan, sulit untuk terciptanya persatuan yang mengarah kepada pembentukan organisasi regional yang sehat. Hal ini dapat dilihat pada masa Perang Dingin di Asia Tenggara, di mana banyak terdapat kekuatan asing yang mempengaruhi, seperti bagaimana terjadi perang vietnam, perpecahan vietnam utara dengan vietnam selatan, dan juga pada kamboja. Meskipun masih banyak negara yang menginginkan terbentuk organisasi regional yang kuat dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar yang memiliki kepentingannya sendiri, dengan pengaruh seperti ini, hal tersebut sangat sulit untuk terjadi. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional tidak banyak mengalami kemajuan pada masa Perang Dingin.

Paska Perang Dingin, Uni Soviet runtuh dan Amerika tampak menjadi satu-satunya superpower di dunia. Pada masa ini, pengaruh-pengaruh antara dua pihak sudah menghilang, dan organisasi regional sudah mulai bisa berkembang. Meskipun begitu pada awal tahun 1990-an paska Perang Dingin selesai, misi perdamaian masih banyak dilakukan oleh PBB. Hal ini disebabkan walaupun organisasi regional sudah mulai berkembang, kapasitas dan kapabilitas organisasi regional untuk melaksanakan misi perdamaian masih belum mencukupi. Dalam kasus Afrika, OAU masih belum berkembang karena pada masa itu, negara di Afrika masih diliputi masalah dalam negerinya masing-masing. Afrika Selatan masih sibuk dengan masalah politik apartheidnya. Negara di Afrika Timur masih ramai dengan kepemimpinan diktator dan masih banyak kasus kejahatan

kemanusiaan di Afrika. Hal ini membuat tiap negara sibuk sendiri dan organisasi regional belum begitu berkembang.

Pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, organisasi-organisasi regional yang ada di Afrika mulai tumbuh dan mampu memberikan dukungan terhadap penciptaan perdamaian di daerahnya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan misalnya, adanya dukungan ECOWAS di Afrika Barat untuk terciptanya perdamaian di Sierra Leone dan juga Liberia. IGAD di daerah timur juga mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai organisasi regional kawasan tersebut untuk menciptakan perdamaian di daerah mereka.

Namun, yang menjadi masalah adalah kapasitas dan kapabilitas organisasi-organisasi ini masih sangat kurang untuk melakukan misi perdamaian. Hal ini dikarenakan setiap negara masih diributkan oleh masalahnya sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan dukungan teknis baik pasukan maupun pendanaan untuk misi perdamaian masih sangat kurang bila mengandalkan dari negara anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu, PBB masih terus memberikan pendampingan dan bantuan untuk organisasi regional untuk melakukan misi perdamaian di kawasan. Hal ini sangat wajar, karena bahkan PBB sekalipun mengalami masalah pendanaan. Namun PBB masih jauh lebih baik dalam masalah tersebut karena secara dukungan, PBB mendapat dukungan secara global dari seluruh negara anggota PBB.

Meskipun kita melihat bagaimana kekurangan yang masih ada dalam misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional, kita dapat melihat bahwa ini adalah salah satu pergeseran yang terjadi dalam pelaksanaan misi perdamaian. PBB tentu senang dengan adanya pasukan penjaga perdamaian yang menjaga perdamaian di kawasannya sendiri, karena hal ini berarti mengurangi beban PBB.

Membahas mengenai misi perdamaian oleh organisasi regional Jetley, menerangkan mengenai jenis kerjasama antara PBB dan organisasi regional. Pada dasarnya, kerjasama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: konsultasi, bantuan diplomatis, bantuan operasional, *co-deployment*, *joint operations*. Dalam melihat AMISOM, kerjasama antara PBB dengan AU bisa dilihat lebih cocok sebagai

memberikan bantuan konsultasi dan diplomatis. Agar AMISOM bisa diterjunkan, misi ini berhubungan dengan PBB dalam hubungannya untuk otorisasi misi ini. Contoh bantuan diplomatis tersebut adalah mengenai persenjataan AMISOM. AMISOM tidak bisa berjalan sendirian, karena bagaimanapun masih ada embargo senjata terhadap Somalia dan karena hal ini, AMISOM tidak dapat mempersenjatai diri sendiri untuk melaksanakan misinya. PBB untuk mendukung AMISOM, mengangkat sebagian embargo senjata agar senjata dapat masuk ke Somalia untuk kepentingan misi. AMISOM kurang masuk ke dalam klasifikasi yang lain karena tidak sesuai. AMISOM dalam melaksanakan misinya mendapatkan bantuan, tetapi tidak dari PBB. Begitupun juga dengan *co-deployment* dan *joint operations*. Kedua jenis ini tidak masuk karena AMISOM adalah misi perdamaian yang dilakukan oleh AU dengan tentara yang berasal dari negara-negara Afrika anggota AU.

Terlepas dari bagaimana jenis kerjasamanya, AMISOM adalah sebuah bukti bahwa organisasi regional sudah mulai melaksanakan misi perdamaian yang dijalankan sebagian besar oleh organisasi regional tersebut, dalam hal ini AU.

AU, dalam hal ini, menjadi salah satu pionir dalam misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional. Afrika, adalah laboratorium konflik dunia, di mana semua jenis konflik nyaris ada disini. Hal ini menyebabkan AU dapat menjadi pelopor dan menjadi model bagaimana sebuah organisasi regional berhadapan dengan masalah perdamaian. AU walaupun masih dalam keadaan seperti ini di mana misi-msinya banyak yang masih didukung oleh pihak luar, dinyatakan gagal dan belum mencapai target yang diharapkan, dan masih mencari bentuk misi perdamaian yang terbaik, perlu diapresiasi sebagai sebuah upaya untuk mengupayakan perdamaian yang jauh lebih luas, dan lebih baik. Upaya AU untuk membentuk kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan misi perdamaian juga perlu untuk didukung agar kelak dengan keberhasilan AU untuk membentuk kapasitas dan kapabilitasnya serta menemukan bentuk misi perdamaian terbaik, akan terbentuk sebuah kerangka kerja mengenai bagaimana organisasi regional melaksanakan misi perdamaian.

AU dalam hubungannya dengan OAU dan perkembangan arsitektur keamanan, adalah sebuah organisasi lanjutan dari OAU. Salah satu perkembangan dalam kelanjutan AU dari OAU ini adalah adanya perkembangan untuk menangani masalah keamanan. Dalam diskusi yang mengarah ke diadopsinya *Constitutive Act* pada Juli 2000, tim yang melakukan negosiasi menemukan kenyataan bahwa OAU tidak dapat menangani masalah keamanan dengan baik. Refleksinya ke AU adalah AU harus bekerja untuk memastikan perlindungan warga sipil dalam situasi konflik dari hal-hal seperti kejahatan perang, kejahatan akan kemanusiaan, dan genosida. *Constitutive Act* yang diadopsi, kemudian menjadi sebuah arsitektur keamanan dan intervensi perdamaian pada saat AU diluncurkan pada tahun 2002. Untuk mengoperasionalisasi arsitektur intervensi keamanan yang baru ini, dalam sesi umum pertama di Majelis AU, membentuk sesuatu yang sering disebut *African Peace and Security Architecture* (APSA). Pada 9 Juli 2002, negara anggota AU mengadopsi protokol berhubungan dengan pembentukan *Peace and Security Council of the African Union* (PSC AU), yang menjadi titik masuk, menentukan modalitas untuk tindakan dan mengidentifikasi pengaturan institusional yang akan mendukung pekerjaan dewan dalam pemenuhan tugasnya untuk pencegahan dan manajemen konflik di Afrika. Dalam operasionalisasinya, PSC ini baru aktif bila organisasi regional tidak dapat menangani masalah di daerahnya, atau saat organisasi regional ini meminta bantuan ke AU.⁸⁷

Dengan adanya misi AMISOM ini, adalah sebuah bukti adanya proses dari AU untuk menuju terbentuknya organisasi kontinental (regional) yang mampu melaksanakan misi perdamaian dan menjaga perdamaian serta keamanan di daerahnya sendiri secara mandiri, walaupun dengan tantangan mengenai bagaimana organisasi regional yang berada di bawah payung AU bertindak dalam menghadapi masalah keamanan ini.

⁸⁷ Andreas Stensland, Walter Lotze, dan Joel Ng, *Regional Security and Human Rights Interventions: A Global Governance Perspectives on the AU and ASEAN*, dalam jurnal *Security in Practice* 8.2012 [NUPI REPORT, 2012], hal. 26-29

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Somalia adalah sebuah konflik internal yang terjadi selama 2 dekade lebih tanpa adanya penyelesaian konflik yang berarti. Pada awal konflik di tahun 1990-an, sempat ada dua misi perdamaian PBB yang datang dibantu dengan misi dukungan perdamaian yang dimotori oleh Amerika Serikat. Namun, misi-misi ini tidak berhasil mendatangkan perdamaian di Somalia, walaupun satu misi yaitu misi UNITAF dilihat berhasil melaksanakan mandatnya. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana kondisi konflik di Somalia dan juga pelaksanaan misi perdamaian pada masa itu. Hingga kini, perdamaian di Somalia masih belum terjadi secara sepenuhnya, ditunjukkan dengan masih banyaknya perlawanan terhadap upaya untuk mewujudkan perdamaian. Kondisi di Somalia juga membantu memperlambat proses perdamaian sehingga perdamaian tidak kunjung terjadi. Selain karena pada dasarnya di Somalia ini terdapat beberapa klan dengan sistem klan yang kuat, banyak warganya terpecah belah menjadi beberapa faksi/golongan berdasarkan kepentingan. Beberapa golongan ini, dibedakan dari sisi pemahaman agamanya. Somalia, yang dekat dengan Timur Tengah, menjadikan negara ini mendapat banyak sekali pengaruh dari kawasan tersebut, salah satunya adalah agama. Islam di Somalia sangat kuat, walaupun secara umum jumlah warga Kristen dan Islam hampir berimbang. Karena kuatnya Islam di Somalia ini, menjadikan munculnya beberapa golongan, termasuk juga golongan Islam fundamentalis yang termasuk ke dalam kelompok garis keras. Kelompok ini menginginkan diterapkannya hukum Syariah yang kuat di Somalia, dan oleh karena itu berusaha untuk menguasai Somalia. Kelompok ini yang hingga misi AMISOM diterjunkan, masih terus melancarkan serangan, bahkan hingga ke luar negeri, yaitu di Burundi dan Uganda. Kelompok ini, yang bernama Al-Shabaab, juga mengumumkan afiliasi mereka dengan jaringan Al-Qaeda, jaringan yang masuk ke dalam daftar jaringan teroris yang menjadi musuh utama dalam agenda perang melawan terorisme Amerika Serikat. Selain itu, munculnya Somaliland sebagai negara lepasan, dan Puntland sebagai sebuah daerah semi

otonom, mengakibatkan kondisi politik di Somalia menjadi semakin rumit. Pembajakan Teluk Aden juga menjadikan Somalia ini penuh dengan masalah yang perlu diperhatikan oleh dunia internasional. Keadaan tersebut menunjukkan bagaimana kompleksnya kondisi konflik di Somalia.

Misi AMISOM, yang dilaksanakan oleh AU atas usulan IGAD dan didukung oleh PBB dan Amerika Serikat, adalah sebuah misi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Somalia. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan perdamaian di Somalia setelah negara tersebut terpecah dan dilanda bahaya kemanusiaan yaitu kelaparan. Somalia juga perlu distabilkan karena Somalia adalah sebuah negara yang strategis di Afrika Timur. Hal ini ada hubungannya dengan perdagangan dunia, stabilitas kawasan, dan juga untuk menekan persebaran dan pertumbuhan terorisme. Bila Somalia masih terus kacau, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan masalah sampingan lainnya.

Misi ini adalah salah satu terobosan dalam misi perdamaian di Afrika, karena misi ini adalah sebuah misi yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi regional (kontinental) Afrika yang merupakan sebuah organisasi baru. Hal ini sangat menarik untuk dilihat, karena walaupun secara umum sudah disinggung mengenai keterlibatan organisasi regional dalam penciptaan perdamaian lewat misi perdamaian, hingga tahun 2000-an, hal tersebut sangat jarang terlihat di mana misi perdamaian dilakukan kebanyakan oleh PBB. AU, dalam hal ini, bisa disebut sebagai sebuah organisasi kontinental yang sedang mencari bentuk misi perdamaian yang paling pas untuk dilakukan di Afrika, di mana bentuk dan jenis konflik paing banyak terjadi.

Dalam pelaksanaannya, misi AMISOM ini sudah berjalan dari tahun 2007 dan mandatnya terus diperpanjang hingga sekarang oleh PBB. Hingga kini, banyak pencapaian yang telah berhasil dicapai oleh misi ini, namun apakah pencapaian tersebut signifikan dalam upaya penciptaan perdamaian di Somalia, dan mampu memberikan kontribusi mengenai pengembangan model misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional? Jawaban hal tersebut teletak pada kinerja AMISOM di lapangan.

AMISOM, dalam pelaksanaannya di lapangan, dilihat kesuksesannya. Kesuksesan AMISOM diukur berdasarkan pada keberhasilan melaksanakan tugas yang dimandatkan, dan menggunakan kriteria kesuksesan misi perdamaian Pushkina. Dalam melihat kesuksesan misi perdamaian, Pushkina memaparkan empat kriteria yang dilihat sebagai hal-hal yang penting dari sebuah misi perdamaian. Kriteria tersebut dilihat dari bagaimana misi perdamaian dapat membentuk sebuah keadaan di mana perdamaian yang ada memperhatikan nilai keamanan insani, dan juga membentuk keadaan perdamaian yang berkelanjutan. Kriteria-kriteria tersebut adalah adanya pembatasan konflik, pengurangan penderitaan kemanusiaan, pencegahan penyebaran konflik keluar negara, dan adanya upaya resolusi konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian yang berkelanjutan.

AMISOM, setelah dilihat dari sisi kinerja dan aspek-aspek lainnya dalam pelaksanaannya, bisa dibilang relatif berhasil dengan beberapa catatan. Hasil tersebut diambil setelah melihat kriteria Pushkina yang dimodifikasi agar sesuai dengan misi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi regional, karena pada dasarnya Pushkina membuat kriteria tersebut untuk mengukur misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Pada kriteria pertama, kita bisa mengatakan bahwa kriteria pertama dapat disebut relatif terpenuhi karena walaupun kekerasan masih terjadi, sudah relatif berkurang dengan melihat perkembangan yang ada di Somalia. Kriteria kedua, Misi AMISOM relatif belum berhasil. Hal ini dikarenakan ada satu penanda yang relatif belum berhasil, yaitu pemulangan kembali pengungsi walaupun pelanggaran HAM relatif berkurang. Kriteria ketiga, AMISOM relatif tidak berhasil. Ketidakberhasilan AMISOM ini dapat dilihat dari penyebaran konflik keluar daerah. Selain itu, efek samping konflik juga banyak yang keluar daerah, sehingga mengakibatkan banyak terjadinya konflik dan masalah baru di luar Somalia yang mengganggu keamanan internasional. Kriteria keempat, adalah kriteria yang sedikit dirubah untuk menyesuaikan dengan kondisi misi AMISOM yang belum selesai pada masa penelitian. Kriteria keempat ini relatif berhasil karena AMISOM berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan diadakannya dialog yang membicarakan mengenai rekonsiliasi nasional dan juga dialog antara pihak-pihak

yang berkonflik dalam konflik di Somalia. Dengan adanya dialog ini, sesuai dengan kondisi konflik Somalia, dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan karena ada perkembangan untuk menciptakan kondisi perdamaian yang berkelanjutan. Dari keempat kriteria ini, AMISOM relatif berhasil pada dua kriteria. Satu kriteria setengah berhasil, yaitu kriteria kedua, di mana pelanggaran HAM berhasil ditekan, walaupun pemulangan pengungsi kembali relatif belum berhasil. Kriteria ketiga yang terlihat relatif tidak berhasil dilakukan oleh misi AMISOM. Secara hitungan angka, dari 4 kriteria, keberhasilan AMISOM relatif lebih banyak daripada kegagalannya. Oleh karena itu, walaupun perdamaian belum tercapai, namun proses menuju perdamaian relatif mengalami kemajuan yang cukup besar.

AMISOM juga relatif berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ada di mandat AMISOM. Dalam kinerjanya, ada pencapaian yang berhasil dicapai oleh AMISOM, diantaranya pengamanan Mogadishu, TFG yang berhasil bermarkas di Mogadishu dengan perlindungan AMISOM, terbentuknya kembali SNA dan terbentuk dan dilatihnya personel SPF, menahan garis pertahanan sehingga daerah yang berhasil dikuasai tidak direbut kembali oleh milisi, membantu penyaluran bahan bantuan kemanusiaan di daerah kerja AMISOM, memberikan pengawalan kepada relawan kerja kemanusiaan yang meminta, mendukung terciptanya proses dialog dan rekonsiliasi menuju perdamaian di Somalia, dan perlindungan terhadap TFIs dan infrastruktur kunci. Beberapa faktor yang menyebabkan misi AMISOM ini berhasil adalah mandat yang jelas dan tepat sasaran, faktor kedekatan AMISOM dengan Somalia dalam hal geografis/fisik karena sama-sama berasal dari Afrika dan kedekatan emosional karena sesama bangsa Afrika, misi AMISOM yang mendukung TFG, dan tentara yang relatif kuat dan cukup untuk melaksanakan misi dukungan.

Dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa peran AU dalam misi perdamaian di Somalia, sesuai dengan hipotesis sebelumnya. AMISOM dilihat berhasil dalam misi perdamaianya walaupun dengan beberapa catatan dan beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, namun secara umum, keberhasilan dan kinerjanya positif. Oleh karena itu, peran AU dalam misi perdamaian di Somalia

yang diwujudkan dalam AMISOM, relatif cukup baik dalam memajukan proses menuju perdamaian di Somalia. Hal ini juga menunjukkan bagaimana misi perdamaian sudah mulai bergeser pergerakannya dari dilakukan secara langsung oleh PBB, menjadi dilakukan oleh rekanan PBB di regional, seperti organisasi regional walaupun mungkin belum sepenuhnya dilakukan oleh organisasi regional tersebut.

Dengan melihat kondisi seperti ini, kita dapat melihat bagaimana AU sebagai sebuah organisasi regional dalam melaksanakan misi perdamaannya. AMISOM adalah bentuk misi perdamaian yang dilakukan oleh AU sepenuhnya, walaupun ada pembiayaan dan dukungan yang diberikan oleh pihak luar yang berkepentingan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan AU. AU masih belum bisa mendanai misi perdamaian sepenuhnya, ditambah lagi dengan banyaknya konflik yang terjadi yang harus ditangani oleh AU. Bisa diargumenkan juga bahwa dalam misi perdamaian, banyak negara yang tidak siap untuk memberikan dukungan secara teknis, walaupun dukungan politis diberikan. Dalam kasus AMISOM, pasukan perdamaian relatif sulit untuk dikumpulkan dan pasukan yang dikirimkanpun dapat dikirim berkat adanya dukungan dari pihak luar. Salah satu sebabnya adalah karena banyak negara di Afrika masih berkebutuhan dengan konflik internal yang ada di negara tersebut sehingga mengakibatkan kekuatan pasukan difokuskan untuk kepentingan negara tersebut terlebih dahulu. Meskipun begitu, AMISOM adalah sebuah perkembangan bagi AU dalam pelaksanaan misi perdamaian, karena sudah mulai mengurangi keterlibatan pihak dari luar dalam pelaksanaan misi tersebut, terutama dari sisi komponen misi perdamaian tersebut, baik dari tentara, tenaga polisi, dan komponen sipil.

Saran:

Dalam misi AMISOM dan konflik Somalia, masih banyak sisi menarik yang perlu diteliti lebih lanjut.

Dalam situasi konflik yang masih terus berlangsung, tentu masih ada banyak kemungkinan skenario bagaimana arah perdamaian menuju. Melihat

kondisi saat ini, Al-Shabaab sedang berada dalam kondisi yang mulai melemah. Namun, serangan-serangan masih terus terjadi dan Al-Shabaab masih terus menjaga daerah-daerah kekuasaannya. Anehnya, keadaan keamanan di daerah yang dikuasai oleh Al-Shabaab cenderung lebih terkontrol. Contohnya adalah pada cerita jurnalis BBC yang meliput Al-Shabaab. Di kota yang dikuasai Al-Shabaab di luar Mogadishu, barang-barang yang mereka bawa tidak perlu dibawa terus keluar mobil dan bahkan jendela juga dibuka (karena jendela mobil mereka dilapisi oleh kaca film, dan di daerah Al-Shabaab tidak diperbolehkan seperti itu, karena ketakutan soal siapa dan apa yang ada di dalam mobil tersebut.) dengan barang ditinggalkan di dalam mobil sehingga orang yang lewat bisa melihat isi dalam mobil tersebut. Setelah bertemu dengan anggota Al-Shabaab, barang yang ada dalam mobil masih tetap ada, berbeda bila hal tersebut dilakukan di Mogadishu. Hal ini dikarenakan di daerah Al-Shabaab, hukum syariah ditetapkan dengan keras, sehingga pencurian dihukum dengan memotong anggota bagian tubuh. Oleh karena itu, pencuri takut mengambil dan akhirnya pencurian relatif kecil. Apakah dengan demikian sebenarnya Al-Shabaab ini justru memberikan kestabilan terhadap daerah yang dikuasainya? Apakah kemungkinan ada pengaruh penerimaan masyarakat? Bagaimanakah persepsi penduduk Somalia mengenai misi perdamaian yang berlangsung di Somalia? Apakah dengan banyaknya misi perdamaian yang berlangsung tanpa hasil yang signifikan seperti terciptanya perdamaian dan bersatunya Somalia, penduduk Somalia tidak lagi terlalu peduli dengan hal tersebut? Karena bagaimanapun, penerimaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam sebuah misi perdamaian. Misi perdamaian tanpa adanya legitimasi publik terhadap misi tersebut, hanya akan menjadi kendaraan elit-elit dan kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan atas Somalia. Penduduk tidak terwakili dan akhirnya perdamaian tidak benar-benar terwujud. Hal ini tentu membuat misi perdamaian tersebut gagal melaksanakan misi utamanya yaitu menciptakan perdamaian di daerah misi tersebut diterjunkan.

Soal lain, adalah mengenai masalah pembajakan. Pembajakan di laut Somalia adalah salah satu yang terparah. Dengan kondisi seperti itu, seharusnya dunia internasional merespon dengan berusaha untuk mencegah terjadinya

pembajakan. Dan dunia internasional memang memberikan perhatian mengenai masalah pembajakan ini. Namun pada kenyataannya, pembajakan terus terjadi. Mengapa pembajakan terus terjadi walaupun dunia internasional sudah memberikan perhatian? Hal ini bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Archer, Clive. 2001. *International Organizations*, London: Routledge
- Dagne, Ted. 2010. *Somalia: Current Conditions and Prospects for a Lasting peace*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Francis, David J. 2008. *PEACE & CONFLICT IN AFRICA*. London: Zed Books.
- MacQueen, Norrie. 2006. *Peacekeeping and the International Systems*. New York: Routledge.
- Mulugeta, Kidist. 2009. *The Role of Regional and International Organizations in Resolving the Somali Conflict: The Case of IGAD*. Addis Ababa: Friedrich Ebert-Stiftung
- O'Neil, John Terence dan Nicholas Rees. 2005. *United Nations Peacekeeping in The Post Cold War Era*. New York: Routledge.
- Paul, T.V. 1994. *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers*. Cambridge: Cambridge University Press
- Rachmawaty, Diah Aty. 2004. *Intervensi Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Resolusi Konflik (Studi Kasus: Intervensi PBB di Somalia 1992-1995)*, Tesis S2, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional. Jakarta.

JURNAL:

- Bratt, Duane. 1997. "Assessing the Success of UN Peacekeeping Operations". dalam *International Peacekeeping*, Vol.3, No.4, 1997, hal. 64-81
- International Crisis Group. 2007. "Somalia: The Tough Part Is Ahead" dalam *Policy Briefing Africa Briefing No.45*. (Nairobi/Brussels, 26 January 2007).
- Lake, Anthony. 2002. "Peacekeeping: Defining Success", dalam *Peace Colloquy*, No.1, 2002
- Mack, Andrew J.R. 1975. "Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict", dalam *World Politics*, Vol. 27, No. 2 (Januari 1975)
- Ng, Joel, Andreas Stensland dan Walter Lotze. 2012. *Regional Security and Human Rights Interventions: A Global Governance Perspectives on the AU and ASEAN*, dalam jurnal *Security in Practice* 8.2012

McKenzie, Jr., Kenneth. 2001. "The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning", dalam *Quadrennial Defense Review, Chapter III*. 2001

Murithi, Tim. 2009. *The African Union's Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid Mission in Darfur*, dalam *Journal of Peace, Conflict and Development*, Issue 14, July 2009

Pushkina, Darya. 2006. "A Recipe for Success? Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission", dalam jurnal *International Peacekeeping*, Vol.13, No.2, Juni 2006

INTERNET:

3000 delegates to attend Somalia's national Reconciliation Congress. 2007. diakses dari http://english.people.com.cn/200703/19/eng20070319_359027.html

A.J.N. Judge, "Types of international organization" diakses di <http://www.uia.org/uiadocs/orgtypepec.htm>

Al-Shabaab. 2008. diakses dari http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html
AMISOM Background, diakses dari <http://amisom-au.org/about/amisom-background/>

AMISOM Police. 2008. diakses dari <http://amisom-au.org/mission-profile/amisom-police/>

Background and Political Development, diakses dari http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Background.htm

Background Note: Somalia, diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2863.htm>

BBC News. 2003. "Somali Warlord Quits Peace Talks", , diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2488171.stm>

BBC News. 2003. "Somalia Peace Conference Postponed" diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6899684.stm> pada 7 Juni 2012, jam 15.13 WIB

BBC News. 2011. "Somalia's al-Shabaab Rebels Leave Mogadishu", diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14430283>

Conflict Research Consoortioum, "Peacemaking", diakses dari www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/peacemkg.htm,

Frequently Asked Question. 2008. Diakses dari <http://amisom-au.org/about/frequently-asked-questions/>

IRIN, "Somalia: A turtous road ahead in search of peace", diakses dari <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/157f219de83e61803c7259d3c256f0fe.htm> pada 13 Maret 2007

Hanson, Stephanie dan Eben Kaplan. 2007. *Somalia's Transitional Government*, diakses dari <http://www.cfr.org/somalia/somalias-transitional-government/p12475#p2>

House of Commons Foreign Affairs Committee, Piracy off the coast of Somalia, Tenth Report of Session 2010-12. 2012. diakses dari <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmfaaff/1318/1318.pdf>

Hull, Cecilia dan Emma Svensson. 2008. *African Union Mission in Somalia (AMISOM) Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges*, diakses dari <http://www.foi.se/upload/projects/Africa/FOI-R--2596--SE.pdf>

Ibrahim, Mohammed. 2011. "Foreign Aid Worker Is Killed and Colleague Is Wounded in Somali Capital", *The New York Times*, diakses dari http://www.nytimes.com/2011/12/30/world/africa/aid-worker-killed-in-mogadishu-somalia.html?_r=1

ICRC. 2012. "Somalia News". <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/somalia-news-2011-01-12.htm>

Jetley, Lt Gen Vijay Kumar. *Peacekeeping by Regional Organisations*, diakses dari http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-af/2010/2010-3/eng/2010_3_05-E-Jetley.pdf

Launch of the African Union, Diakses dari http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches_&_Statements/HE_Thabo_Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union,%209%20July%202002.htm

Maalim, Abdilatif. 2012. *ASWJs Relationship With The TFG Explained*. diakses dari

http://www.somaliareport.com/index.php/post/398/ASWJs_Relationship_With_The_TFG_Explained

Mehta, Vijay. 2012. *The UN Doctrine on the Responsibility to Protect*, hal 2, diakses dari

<http://www.unitingforpeace.com/resources/speeches/The%20UN%20Doctrine.pdf>

Menlu Somalia: Aliansi Al-Shabaab dan Al-Qaida Bukan Berita Baru. 2012. Diakses dari <http://www.voanews.com/indonesian/news/Menlu-Somalia-Aliansi-Al-Shabab-dan-al-Qaida-Bukan-Berita-Baru-139136629.html>

Military Component. 2008. diakses dari <http://amisom-au.org/mission-profile/military-component/>

Mogadishu residents appreciate AMISOM Hospital. 2011. diakses dari <http://amisom-au.org/2011/09/mogadishu-residents-appreciate-amisom-hospital/>

MSF names Somalia aid workers killed in Mogadishu. 2011. diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16362616>

Political Affairs Unit. 2008. diakses dari <http://amisom-au.org/mission-profile/political-affairs-unit/>

Preventive Diplomacy and Peacekeeping, diakses dari www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch4b.htm

Shaw, Carolyn M.. 2004. *Regional Peacekeeping: An Alternative to United Nations Operations?*, diakses dari lin.unb.ca/texts/JCS/Fall95/Shaw.pdf

Somalia. 2011. Diakses dari <http://www.wfp.org/countries/somalia>

Somalia's al-Shabaab join al-Qaeda. 2011. diakses dari

www.bbc.co.uk/news/world-africa-16979440 pada 13 April 2012

Somalia Transitional Government. 2008. <http://www.cfr.org/somalia/somalias-transitional-government/p12475>

The Economist, To Protect sovereignty, or to protect lives?, diakses dari <http://www.economist.com/node/11376531>

The Failed States Index 2011. 2011. diakses dari <http://www.foreignpolicy.com/failedstates>

The Supreme Islamic Courts Union/ al-Ittihad Mahakem al-Islamiya (ICU), diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/icu.htm>

The Telegraph. "Six killed when mortars aimed at Somalia palace land on refugee camp". 2012.

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/somalia/9153166/Six-killed-when-mortars-aimed-at-Somalia-palace-land-on-refugee-camp.html>

Training Begins for AMISOM Police Instructors. 2010 diakses dari <http://amisom-au.org/2011/09/training-begins-for-amisom-police-instructors/>

UNITED NATIONS OPERATION IN SOMALIA I, diakses dari <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm>

UNITED NATIONS OPERATION IN SOMALIA II, diakses dari <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2p.htm> dan <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2b.htm>

UNOSAT, Spatial Analysis of Somali Pirate Attacks in 2009. 2009. diakses dari http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SO/CE20100714SOM/UNOSAT_SOM_CE2010-PiracyAnalysis_Report_HR_v1.pdf

USAToday. 2007. *U.S. support key to Ethiopia's invasion*, diakses dari http://usatoday.com/news/world/2007-01-07-ethiopia_x.htm

Xinhuanet. 2007. *U.S. Pledges Support for Somalia Reconciliation Conference*, diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/22/content_5878995.htm

Yussuf Kalib. *Horn of Africa: Conflict and Consequences*. Diakses dari <http://www.shebacss.com/docs/poeyh005-09.pdf>

DOKUMEN RESMI:

AMISOM. AMISOM Mandat. Diakses dari http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Mandat.htm

International Crisis Group. 2008. *Somalia: To Move Beyond The Failed State*, Africa Report No. 147 – 23 December 2008, International Crisis Group

Press Release AMISOM. 2012. "Rebuilding Lives and Livelihoods Farm Goods Enter Mogadishu Markets Following Successful Joint Operation", diakses dari <http://amisom-au.org/2012/05/rebuilding-lives-and-livelihoods-farm-goods-enter-mogadishu-markets-following-successful-joint-operation/>

Status of Mission Agreement between The Transitional Federal Government of the Somali Republic and The African Union on The African Union Mission in Somalia (AMISOM), dokumen resmi, diakses dari <http://amisom-au.org/?wpdmact=process&did=NjEuaG90bGluaw==> pada 28 Mei 2012, jam 12.38 WIB